

**LAPORAN
PENELITIAN KOMPETITIF 2010
Sosial Keagamaan**

**REPRESENTASI ISLAM (RADIKAL) DALAM MAJALAH SABILI
Sebuah Analisis Wacana Kritis**

Oleh:

- 1. Ridwan, S.Ag, M.Hum (Ketua Tim)**
- 2. Siti Maimunah, S.Ag, M.Hum (Anggota)**
- 3. Nurdin Laugu, S.Ag, S.S., M.A. (Anggota)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
DESEMBER 2010**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Januari 1988 yang ditindaklanjuti melalui Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Keagamaan DEPAG RI pada tanggal 5 Pebruari 2004, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tha	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dhal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	za	z	zet
س	sin	s	es
ش	shin	sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ḏa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ayn	‘	koma terbalik di atas
غ	ghayn	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
هـ	ha	h	ha
لام	lam alif	la	el dan a
ء	hamzah	'	apostrop
ي	ya	y	ye

2. Vokal:

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...	fathah	a	a
◌ِ...	kasrah	i	i
◌ُ...	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
...ي	fathah dan ya	ai	a dan i
...و	fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

حسين : Ḥusain حول : ḥaula

3. Maddah

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah dan alif	ā	a dan garis kecil di atas
اِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis kecil di atas
اُ	ḍammah dan wau	ū	u dan garis kecil di atas

KATA PENGANTAR

Akhirnya, penelitian tentang representasi Islam (radikal) dalam majalah *Sabili* ini dapat kami rampungkan. Sebagai sebuah penelitian kelompok, penelitian ini dapat disebut sebagai hasil kompromi dari berbagai pandangan yang, melalui dialog yang intens, harus mengabaikan beberapa perbedaan di antara tim peneliti.

Ucapan terima kasih patut diberikan kepada pihak majalah *Sabili* yang secara ramah dan terbuka menerima kami, terutama S Rivai Hutapea sebagai pemimpin redaksi *Sabili*. Para pembaca *Sabili* sebagai mitra diskusi kami dalam *Focus Group Discussion* (FGD), narasumber, dan pentraskrip hasil wawancara juga merupakan pihak-pihak yang layak menerima ucapan terima kasih kami. Terakhir, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ditpertaiss Kementerian Agama RI yang telah memberi kesempatan kami untuk melakukan penelitian ini. Bagi kami, kesempatan ini memiliki makna yang tidak bisa dinilai hanya dari aspek bantuan materialnya.

Selanjutnya, kami berharap bahwa penelitian ini akan menjadi bahan bacaan yang layak dikomentari oleh pembaca dan mendapat masukan-masukan yang konstruktif.

Yogyakarta, 20 Desember 2010

Tim Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	1
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang Masalah	6
B. Perumusan Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Signifikansi Penelitian	12
BAB II KERANGKA TEORITIK	13
A. Peta Gerakan Islam Kontemporer	13
B. Media Massa, Representasi, dan Realitas	16
C. Kajian Riset Sebelumnya	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	20
A. Tempat dan Waktu Penelitian	20
B. Metode Penelitian	21
C. Teknik Pengumpulan Data	24
D. Teknik Analisis Data	26
BAB IV MAJALAH <i>SABILI</i> DAN MEDIA ISLAM DI INDONESIA	26
A. Islam Indonesia dan Media Massa	26
B. Majalah <i>Sabili</i> dan Islam	31
BAB V ISLAM DALAM MAJALAH <i>SABILI</i>	51
A. Islam dan Negara	52
B. Islam dan non Muslim (Barat)	62
C. Islam dan Kelompok Minoritas	72
D. Islam dan Perempuan	79

E. Islam dan Moralitas Masyarakat	88
BAB VI PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN:	107
1. Daftar Majalah <i>Sabili</i>	107
2. Transkrip Rekaman Wawancara	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini memiliki ajaran dan nilai-nilai yang universal. Keberlakuannya menembus batas-batas geografis dan politik, dan melintasi sekat-sekat masyarakat dengan aneka ragam budaya dan adat-istiadat. Keyakinan ini, paling tidak, didasarkan pada pernyataan al-Qur'an bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Selain itu, pembawa risalah Islam ini, nabi Muhammad, dinyatakan oleh Allah sebagai utusan untuk seluruh umat manusia atau --dalam bahasa al-Qur'an-- *rahmatan li al 'âlamîn*.¹ Islam dengan nilai-nilai universal inilah yang kemudian disebut sebagai Islam normatif, sakral, tidak berubah-ubah, dan “tunggal.”

Namun, bahwa Islam yang “tunggal” ini diartikulasikan dan dipraktikkan secara “beragam” oleh umat Islam adalah sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Islam yang universal ini ternyata diterima oleh manusia sesuai dengan pengalaman, problem, kemampuan intelektual, sistem budaya lokal, dan segala keragaman yang ada. Ruang dan waktu, tempat manusia berada, tampaknya menjadi faktor dari munculnya keragaman tersebut. Tidaklah aneh bila dalam Islam dikenal dua aliran besar: Syiah dan Sunni. Dalam Sunni sendiri, muncul

¹ Lihat surah *al-Mâ'idah*, 5/3: “Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu.” Lihat pula, surah *al-Anbiyâ*, ' 21/107: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk *rahmatan li al 'âlamîn*, (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

empat mazhab fiqih: Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali. Di sana juga dikenal Islam Indonesia, Islam, Mesir, Islam Saudi Arabia, Islam Iran atau Islam Afrika.²

Keragaman praksis Islam historis ini menyebabkan sulitnya tercipta sebuah representasi Islam yang monolitik di media massa. Alih-alih seragam, Islam historis ini bahkan sering hadir dan/atau dihadirkan dalam beragam wajah yang saling bertentangan. Di satu tempat Islam hadir sebagai ajaran yang moderat dan toleran, tetapi di tempat lain sebagai ajaran yang ekstrem dan tidak toleran. Dua film, *Ayat-ayat Cinta* dan *Fitna*, adalah dua contoh yang bisa disebut di sini. Film pertama menampilkan Islam model pertama, sedangkan film kedua menampilkan Islam secara sebaliknya. Dalam film kedua ini, Islam menjelma menjadi sesuatu yang menakutkan dan menebarkan teror; darah mudah tertumpah; dan kaum perempuan sangat termarjinalkan.

Di sini, masing-masing media memiliki pretensi sebagai pengungkap Islam dan “ekspresi Islam” yang sebenarnya. Bagi Geert Wilders, penulis skenario dan sekaligus sutradara film *Fitna*, potret Islam yang menebar kebencian dan umat Islam yang haus darah dalam filmya itu memang merefleksikan realitas ajaran dan ekspresi Islam yang sesungguhnya. Untuk tujuan ini, ia pun menampilkan dan menyandingkan beberapa fragmen dokumentasi perilaku negatif umat Islam dengan teks-teks al-Qur'an. Namun, bagi media Islam, potret Islam sebagaimana dalam film *Fitna* itu sama sekali tidak mencerminkan realitas ajaran dan umat Islam yang sebenarnya. Potret negatif Islam dan umat Islam

² Naguib Mahfûz, *Waṭanî Miṣr: Ḥiwârât ma'a Muḥammad Salmâwî*, (Kairo: Dâr al-Syurûq, 1997), hal. 25-6.

semacam itu --meminjam bahasa majalah Islam *Sabili*-- tidak ubahnya seperti bensin yang membakar semangat islamfobia.³

Beberapa pertanyaan pun patut dimunculkan. Mungkinkah media/bahasa menangkap dan menyajikan realitas apa adanya?⁴ Apakah bahasa media bisa dianggap sebagai sesuatu yang netral dan dapat dilepaskan dari pembicara (baca: wartawan/media) dan masyarakat pembacanya? Bukankah setiap pemberitaan di media itu dimaksudkan untuk mempengaruhi dan mengarahkan pembaca yang diandaikannya (*imagined reader*) kepada sesuatu hal atau tujuan, sehingga realitas yang ditampilkan pun telah mengalami pemilahan (*postulated reality*)? Jika watak media seperti ini, lantas bagaimana dengan media yang mengklaim sebagai media Islam atau penyambung aspirasi umat Islam? Realitas Islam seperti apakah yang dihadirkan oleh media ini? Dalam kaitannya dengan keragaman Islam di atas, corak Islam seperti apa yang ingin direpresentasikannya kepada masyarakat pembacanya?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini sangat diperlukan, mengingat antara lain disinyalir bahwa keragaman representasi Islam dalam media ini, sedikit atau banyak, juga merupakan akibat tidak terhindarkan dari beragamnya motif media dalam memilih “model” pemberitaan, dari yang murni ideologis sampai pada yang semata-mata berorientasi bisnis. Apalagi, jumlah penerbitan majalah di Indonesia terus mengalami penambahan, sehingga berakibat pada semakin tingginya tingkat persaingan antar perusahaan penerbit majalah. Di sini, penerbit

³ Lihat, *Majalah Islam Sabili*, No. 8 TH.XIV 2 Nopember 2006/10 Syawal 1427, hal. 44.

⁴ Lihat, Stuart Hall, *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*, (London: The Open University, 2003), hal. 24-5.

majalah diandaikan telah melakukan studi lapangan dan pemikiran matang tentang segmen pembaca yang dibidiknya (*imagined reader*).

Dalam konteks inilah, majalah Islam *Sabili* menarik untuk dikaji. Ada beberapa alasan yang bisa disebut. Pertama, majalah ini secara eksplisit menyebut dirinya sebagai “majalah Islam.” Dengan penegasan ini, majalah *Sabili* seolah-olah telah membuat batas yang tegas tentang Islam dan non-Islam atau muslim dan non muslim. Hanya saja, penegasan ini masih belum secara jelas menunjuk kelompok Islam tertentu sebagai pembaca yang diandaikannya. Hal ini karena di sana dikenal, misalnya bila mengikuti penyederhanaan yang dilakukan Pierre Chacia, kategori Islam konservatif, reformis, dan sekularis.⁵ Di sinilah, pengkajian lebih jauh tentang model “Islam” yang direpresentasikan majalah ini perlu dilakukan.

Kedua, majalah ini telah terbit sejak 1992, sehingga majalah ini telah melalui dua rezim, orde baru dan orde reformasi. Ini berarti akan bisa dilihat kesinambungan dan ketidaksinambungan dalam keyakinan dan keinginan media ini terhadap Islam dan umat Islam. Apa yang berubah dan tidak berubah dalam pemberitaan media ini pada kedua rezim itu tentu menarik dilihat. Hal ini mengingat bahwa sebagaimana dimaklumi, dua rezim ini telah memberikan kesempatan dan peluang yang berbeda dalam mengaktualisasikan keyakinan. Di sini dapat disebut sebuah contoh, yaitu asas tunggal. Bila dalam rezim pertama, semua organisasi kemasyarakatan dan politik, suka atau tidak, “harus” menjadikan Pancasila sebagai asas organisasinya, maka dalam era kedua keharusan semacam

⁵ Pierre Cachia, *An Overview of Modern Arabic Literature*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990), hal. 4-5.

ini tidak dikenal lagi. Bahkan, di era kedua ini, peraturan-peraturan daerah yang berbasis syariah atau yang lebih dikenal dengan “perda syariah” bermunculan di berbagai daerah di Indonesia. Dengan sosiopolitik yang berbeda ini, dapat diasumsikan bahwa model Islam yang direpresentasikan majalah ini di dua era tersebut tentu berbeda. Bila pembagian Islam ideal dan aktual diikuti, maka dapat pula diasumsikan bahwa media ini mengartikulasikan Islam ideal di Indonesia pada rezim pertama dan Islam aktual pada rezim kedua.

Ketiga, dari berbagai terminologi yang sering muncul dalam majalah, seperti syariat Islam, al-Qur’an, Sunnah, *salafus shalih*, jihad, dan bom syahid, di samping terminologi-terminologi Arab untuk beberapa kolomnya (*Ibroh*, *Muhasabah*, *Tadabbur*, *Tarqiyah*, dan *Khazanah*), maka ada indikasi kuat bahwa corak Islam yang direpresentasikan oleh majalah *Sabili* --mengikuti klasifikasi Rippin-- adalah Islam radikal.⁶ Indikator ini tentu perlu dilacak lebih jauh dengan menelaah secara seksama pemberitaan-pemberitaan yang ditampilkan dalam majalah *Sabili*.

Keempat, meskipun terdapat indikasi kuat menampilkan corak Islam radikal, majalah *Sabili* tidak secara tegas beratribusi pada kelompok-kelompok yang selama ini dianggap sebagai radikal, seperti Tarbiyah (selanjutnya menjelma menjadi Partai Keadilan Sejahtera/PKS), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bila orang dapat mengidentifikasi dirinya atau diidentifikasi sebagai orang PKS, orang MMI atau orang HTI, maka

⁶ Rippin membuat empat klasifikasi tipologi respon umat Islam terhadap modernitas: tradisional, radikal, modernis, dan sekuleris. Lihat, Peter Riddell, *Islam and the Malay-Indonesian World: Transmissions and Responses*, (Singapura: Horizon Book, 2001), hal. 82.

identifikasi “orang Sabili” tidak dikenal. Pembacaan mendalam diperlukan untuk mengetahui ke arah mana majalah Sabili cenderung beratribusi: ke salah satu kelompok radikal ini atau merupakan kelompok tersendiri. Jika kemungkinan kedua adalah yang benar, maka penelitian tentang pembaca *sabili* dan afiliasi politiknya akan dapat menguak kemungkinan motif non ideologis (baca; ekonomis/bisnis) majalah dalam memilih model representasi Islam, di samping juga --secara tidak langsung-- dapat membuktikan persebaran paham radikal (jika memang demikian model Islam yang direpresentasikan majalah *sabili*) di kelompok-kelompok di atas. Selain keempat hal ini, alasan lain tentu saja karena, sepanjang pengetahuan peneliti, belum ditemukan orang yang secara khusus mencoba melihat representasi Islam dalam majalah yang memiliki semboyan “Meniti Jalan Menuju Mardhatillah” ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada tiga pertanyaan penting untuk diangkat sebagai titik bidik terhadap persoalan penelitian ini. Pertama, bagaimana majalah *Sabili* merepresentasikan Islam? Kedua, kelompok Islam atau corak Islam seperti apa yang disuarakan oleh majalah Sabili? Ketiga, mengapa *Sabili* memilih model representasi Islam seperti itu: murni ideologis ataukah plus motif ekonomis/bisnis?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang dapat muncul dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi masalah representasi “Islam” dalam

kaitannya dengan negara, non muslim (Barat), kelompok minoritas, perempuan, dan moralitas masyarakat. Bentuk atau model representasi, kelompok atau corak Islam yang direpresentasikan, dan alasan yang mendasari pemilihan model representasi juga menjadi fokus dari penelitian ini.

D. Signifikansi Penelitian

Secara sosial keagamaan, penelitian ini sangat penting karena hasilnya akan memberikan wawasan yang sangat bermakna kepada masyarakat untuk memahami salah satu corak dan warna keagamaan Islam di Indonesia. Dengan wawasan tersebut, bisa ditemukan berbagai alasan yang mendasari dan sekaligus solusi alternatif dalam kaitannya dengan militansi dan ekstremitas keberagamaan, dua hal yang sering dianggap sebagai penyemai benih-benih terorisme.

Secara akademik, hasil penelitian ini diyakini sangat penting untuk memberikan kontribusi keilmuan dan memperkaya studi-studi Islam berkenaan dengan keragaman pemikiran dalam masyarakat Islam. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis, penelitian ini tentu juga cukup penting bagi pengembangan ilmu tentang analisis wacana yang masih jarang digunakan dalam studi-studi Islam. Selain itu, penelitian ini dapat menambah cakrawala baru dalam studi Islam melalui pendekatan analisis wacana kritis.

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Peta Gerakan Islam Kontemporer

Sejak abad ke-18, Islam kembali menemukan semangat kebangkitannya setelah lama terkungkung oleh kebodohan, keterbelakangan, dan kolonialisme Barat. Ide-ide pembaharuan pun dilontarkan oleh banyak tokoh, seperti Muhammad ibn Abdul Wahhab (1703-1792), Sayyid Ahmad Khan (1786-1831), Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Iqbal. Ide-ide mereka telah menggugah kesadaran untuk maju dan melakukan kreasi dan inovasi besar dalam tradisi Islam. Selanjutnya, pada dekade tiga dekade awal abad ke-20 muncul gerakan-gerakan Islam yang memandang Islam sebagai ideologi politik atau, lebih tepatnya, menganggap dunia politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Islam.⁷ Gerakan-gerakan dimaksud yang berupaya mendefinisikan Islam sebagai sistem politik adalah seperti *al-Ikhwân al-Muslimûn* di Mesir oleh Hasan al-Banna (1906-1949) dan *Jamaat-i Islami* oleh Abu A'la al-Mawdudi (1903-1979).⁸

Berbagai bentuk gerakan (kebangkitan) keagamaan dalam Islam itu dinamai oleh para analisis dengan istilah-istilah yang beragam. Youssef M. Choueiri menggunakan istilah revivalisme, reformisme, dan radikalisme. Menurutnya, gerakan revivalisme bertujuan untuk menghidupkan kembali

⁷ L. Carl Brown, *Religion and State: the Muslim Approach to Politics*, (Colombia: Columbia University Press, 2000), hal. 139-142.

⁸ Oliver Roy, *The Failure of Political Islam*, (London: L.B. Tauris Publishers, 1994), hal. 1-2.

praktik kehidupan yang dipandang murni (puritan) dan bersumber dalam Islam. Meskipun menekankan pentingnya akal dalam beragama, ia bersifat kaku, nonkompromistis, dan menganggap sebagai bid'ah terhadap tradisi yang dipandang tidak bersumber pada kemurnian Islam. Cara mereka memahami al-Qur'an dan Sunnah Rasul sangat harfiah, seperti hukum potong tangan bagi pencuri. Dua tokoh yang dekat dengan kategori ini adalah Muhammad ibn Abdul Wahhab dan Sayyid Ahmad Khan. Gerakan reformisme melihat Islam ideal adalah seperti yang dicontohkan Rasul, tetapi perubahan sejarah merupakan fenomena yang tidak dapat dielakkan. Oleh karena itu, langkah pemurnian bukanlah satu-satunya cara untuk menegakkan kembali misi awal Islam, apalagi dengan mengikuti pola Islam masa Rasul secara harfiah. Yang lebih dibutuhkan adalah pembaharuan pemahaman keagamaan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Model Islam ideal masa Rasul lebih tepat dijadikan sumber pengembangan pemikiran Islam di zaman kontemporer. Meskipun tidak ditemui pada masa Rasul, praktik keagamaan yang tidak menyimpang dari tujuan dan nilai-nilai dalam al-Qur'an dan Sunnah tetap dapat dibenarkan. Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal masuk dalam kategori ini. Gerakan radikalisme dipelopori oleh Sayyid Qutb dan Abu A'la al-Maududi. Bagi gerakan ini, Islam ideal tidak sekedar kembali pada al-Qur'an dan Sunnah atau mencari sintesis antara nilai-nilai Islam dan perkembangan budaya modern. Islam adalah ajaran yang sempurna dan bersifat total, sehingga umat Islam tidak perlu meminjam atau mencari budaya lain guna memenuhi kebutuhan hidup. Tindakan mengadopsi budaya Barat justru dipandang dapat membahayakan dan

memperlemah posisi umat Islam. Yang diperlukan adalah penerapan prinsip-prinsip Islam secara menyeluruh dalam semua bidang kehidupan. Islam dimunculkan sebagai ideologi yang *self sufficient* dan, karenanya, cenderung memperlakukan ideologi atau praktik kehidupan yang berbeda sebagai musuh atau rival. Tidak jarang mereka mengkafirkan kalangan lain yang tidak sejalan dengan pendirian mereka.⁹

Berbeda dengan Youssef M. Choueiri, Rippin mengemukakan empat tipologi (gerakan) umat Islam: tradisional, radikal, modernis, dan sekularis.¹⁰ Apabila empat tipologi ini diperbandingkan dengan kategori M. Youssef M. Choueiri, maka apa yang dimaksud tradisional Rippin itu sama dengan yang maksudkan revivalisme M. Youssef Choueiri dan modernis sama dengan reformisme. Tipologi sekularis Rippin juga dapat disamakan dan dimasukkan dalam klasifikasi modernisme M. Youssef Choueiri. Oleh karena itu, apabila klasifikasi dari kedua pengamat ini dipadukan, maka kombinasinya dapat menjadi: tradisional/revivalis, reformis/modernis/sekularis, dan radikal. Untuk kategori yang terakhir ini, ada yang menyebutnya fundamentalis, ekstrem atau Islamis.¹¹ Hanya saja, istilah-istilah ini tidak diciptakan oleh pengikut gerakan-gerakan itu, karena al-Banna sendiri misalnya menyebut *al-Ikhwân al-Muslimûn* sebagai salafi.¹²

⁹ Tarmizi Taher (et.al), *Radikalisme Agama*, (Jakarta: PPIM, 1998), hal. 8-23.

¹⁰ Peter Riddell, *Islam ...*, hal. 82.

¹¹ Tarmizi Taher (et.al), *Radikalisme...*, hal. 6-7.

¹² Andrew Rippin, *Muslims: Their Religious Beliefs and Practices. Volume 2: The Contemporary Period*, (London and New York: Routledge, 1995), cet. II, hal. 37.

Di Indonesia gerakan reformasi 1998 memberikan peluang bagi kalangan gerakan Islam untuk berekspresi, membentuk organisasi sosial/politik, dan memilih ideologi/asas dan platform. Organisasi-organisasi seperti PKS, HTI, MMI, dan Laskar Jihad pun muncul. Gerakan berbagai organisasi ini disinyalir berada di luar mainstream praktik politik maupun wacana gerakan Islam dominan (seperti Muhammadiyah, NU, dan PPP). Gerakan-gerakan baru ini lebih militan, radikal, skripturalis, eksklusif, berhaluan keras, dan menjadikan agama sebagai bagian dari keyakinan agama. Pandangan-pandangan gerakan baru dapat dilihat antara lain dari media-media yang berafiliasi dan/atau menjadi corong dakwah dan perjuangan mereka. Majalah *al-Wa'yi* atau buletin *al-Islam* (HTI) dan *Ummi* atau *Annida* (PKS). Dalam hal ini, meskipun tidak secara eksplisit menjadi bagian dari gerakan-gerakan baru ini, majalah *Sabili* memiliki pandangan-pandangan yang tidak berbeda, dan untuk itulah, perlu ditelaah ke mana sesungguhnya majalah *Sabili* beratribusi atau memiliki banyak kesamaan dengan gerakan-gerakan baru ini.

B. Media Massa, Representasi, dan Realitas

Kehidupan masyarakat modern bergantung pada media untuk mendapatkan informasi secara cepat dan efisien. Media memungkinkan orang-orang yang tidak memiliki akses langsung kepada pengetahuan, tempat kehidupan sehari-hari mereka didasarkan, untuk mendapatkan pengetahuan. Melalui media, orang-orang mengarungi kompleksitas kehidupan modern dan

menikmati beragam pengalaman sosial budaya.¹³ Tidaklah salah bila media disebut sebagai perluasan alat indera manusia.¹⁴

Hanya saja, selain berfungsi sebagai sumber informasi, media juga memiliki fungsi sebagai sarana hiburan dan pendidikan.¹⁵ Dengan fungsi terakhir ini, media dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, berpikiran terbuka dan maju. Informasi yang ditampilkan media pun diharapkan menjadi pendorong bagi perkembangan kebudayaan masyarakat dan pencegah berbagai unsur-unsur penghambat dan perusak peradaban masyarakatnya.

Karena fungsi-fungsi media inilah, maka realitas yang direpresentasikan oleh media tidak bisa tidak tentu telah melalui konstruksi. Sebelum disajikan kepada khalayak, realitas telah mengalami proses pemilihan dan penonjolan. Pihak media akan menentukan fakta yang harus dipilih, menonjolkan dan membuang bagian-bagian tertentu dari fakta tersebut. Kenyataan ini dapat dilihat dari banyaknya judul berita dari sebuah fakta atau realitas yang sama. Konstruksi realitas dalam media pertama-tama tidak bisa dilepaskan dari persepsi dan ideologi wartawan atau media yang bersangkutan.¹⁶ Realitas, bagi Littlejohn, tidak muncul dalam bentuk asli (apa adanya), tetapi telah terseleksi melalui cara orang itu memandang setiap hal yang ada.¹⁷

¹³ Karen Ross & Virginia Nightingale, *Media and Audiences: New Perspectives*, (Berkshire: Open University Press, 2003), hal. 5.

¹⁴ Marshal McLuhan, *Understanding Media: The Extension of Man*. (New York: McGraw-Hill Book Company, 1964), hal. 1.

¹⁵ Astrid S. Susanto, *Komunikasi Massa*, (Bandung: Bina Cipta, 1982), hal. 21.

¹⁶ Arifatul Choiri Fauzi, *Kabar-Kabar Kekerasan dari Bali*. Cet. I; (Yogyakarta: LKiS, 2007), 26.

¹⁷ W. Stephen Littlejohn, *Theories of Human Communication*. (USA: Wadsworth Publishing Company, 1996), hal. 112-3

C. Kajian Riset Sebelumnya

Sebagai sebuah media yang secara eksplisit menyebut dirinya sebagai media Islam, majalah *Sabili* telah menarik minat beberapa pengamat dan peneliti untuk melihat aspek-aspek tertentu dalam pemberitaannya. Pertama, Nurul Qomariyah, dalam skripsinya, mengamati wacana kredibilitas Megawati saat menjadi presiden dalam rubrik “Sekitar Kita” majalah *Sabili*. Dengan menggunakan teori pengaruh isi media Pamela J. Shoemaker dan Stephen D Reese, pendekatan level ideologi atau pendekatan kultural Brian McNair, dan analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk, penelitian Nurul Qomariyah ini berkesimpulan bahwa Megawati memiliki kredibilitas rendah di mata Majalah Islam *Sabili*. Kinerjanya dinilai sangat buruk, dan ia dianggap sebagai bukan bagian dari tokoh yang Islami dan kurang memiliki keberpihakan kepada kepentingan umat Islam.¹⁸ Karena hanya membatasi pada kredibilitas Megawati dan pada rubrik “Sekitar Kita,” maka penelitian ini belum melihat bagaimana perempuan dan dunia publik umumnya diwacanakan.

Kedua, Ade Rina Farida, dalam tesis S2nya di Universitas Indonesia, melakukan kajian komparatif tentang konstruksi realitas Islam dalam majalah *Gatra* dan *Sabili*. Melalui analisis *framing* dengan konsep Gamson dan Modigliani, ia mencermati bagaimana kedua majalah memberitakan Islam liberal, terutama Jaringan Islam Liberal (JIL), dan apa yang melatarbelakangi pemberitaannya. Tentang majalah *Sabili*, peneliti ini berkesimpulan bahwa

¹⁸ Lihat, Nurul Qomariyah, *Kredibilitas Presiden Megawati Dalam Tajuk Rencana Media: Analisis Wacana pada Rubrik “Sekitar Kita” Majalah Islam Sabili*, (Malang: UMM, 2004), Skripsi tidak diterbitkan.

majalah ini cenderung menganggap Islam liberal sebagai pemikiran yang membahayakan akidah dan mengancam kemurnian ajaran Islam, sehingga sering menggunakan kata-kata pejoratif dan hanya mengambil sumber berita dari kalangan anti Islam liberal.¹⁹ Namun, tampaknya penelitian ini tidak memerinci gagasan-gagasan Islam liberal, sehingga representasi *Sabili* tentang Islam dalam kaitannya dengan masalah-masalah seperti negara dan non muslim tidak tampak.

Penelitian lain tentang *Sabili* dilakukan oleh Ahmad Yasir Saputra dengan memfokuskan pada pemberitaan tentang Piagam Jakarta. Dengan menggunakan analisis wacana model Sara Mills, penelitian ini menunjukkan bahwa majalah *Sabili* ingin menegaskan Piagam Jakarta secara hukum sebagai landasan bagi berbagai peraturan yang bernafaskan syariat Islam.²⁰

Di sini, tampak bahwa beberapa penelitian ini hanya membatasi pada edisi tertentu, rubrik tertentu, dan tema yang sangat spesifik. Hal ini berakibat pada potret yang tidak komprehensif atas representasi Islam tentang berbagai persoalan. Selain itu, penelitian semacam ini tentu tidak bisa melihat adanya kemungkinan perubahan pandangan *Sabili* tentang persoalan-persoalan dimaksud yang, pada gilirannya, akan melahirkan perubahan representasi. Untuk mengisi ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh penelitian-penelitian semacam itu, maka penelitian ini layak hadir.

¹⁹ Lihat, Ade Rina Farida, *Konstruksi Realitas Islam Liberal dalam Media Cetak: Analisis Framing Majalah Gatra dan Sabili*, (Jakarta: UI), Tesis tidak diterbitkan.

²⁰ Ahmad Yasir Saputra, *Pemberitaan Piagam Jakarta Dalam Majalah Islam Sabili*, Skripsi tidak diterbitkan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya adalah menggabungkan antara penelitian teks dan konteks. Sebagai penelitian berbasis teks, maka penelitian ini tidak mengambil tempat khusus. Hanya saja, sebagai penelitian yang juga menggunakan konteks, maka penelitian mengambil tempat di majalah *Sabili* yang beralamat di Jl. Cipinang Cempedak III/11A, Polonia, Jakarta Timur 1330; dan di Yogyakarta atau Jawa Tengah. Tempat pertama sebagai sumber pencarian data penelitian dari redaksi atau pengelola majalah *Sabili*, sedangkan tempat kedua merupakan sumber data penelitian dari pembaca *Sabili*.

Penelitian ini berlangsung dari bulan Juli sampai Desember 2010. Empat bulan pertama untuk penelusuran kepustakaan, sedangkan dua bulan berikutnya untuk pendalaman analisis dengan melihat konteks majalah *Sabili*, yaitu redaksi dan pembaca *Sabili*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan/paradigma kritis. Keyakinan dasar paradigma ini dapat dilihat dalam tiga tataran. Pertama, secara ontologis penelitian ini melihat bahwa realitas yang dilahirkan majalah *Sabili* telah dibentuk oleh berbagai faktor, seperti sosial, politik, budaya, ekonomi, etnik, dan gender. Oleh karena itu, realitas apapun yang diproduksinya tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang steril atau tidak dapat berubah, karena semuanya terlahir oleh suatu

kepentingan. Dengan keyakinan tersebut, paradigma kritis memiliki suatu upaya untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi di balik penciptaan wacana dalam majalah *Sabili*: hanya murni kepentingan ideologis (baca: keimanan/keislaman) atau juga sarat kepentingan-kepentingan seperti bisnis/ekonomis.

Kedua, secara epistemologis, penelitian ini meyakini bahwa paradigma kritis tidak bebas nilai (*value-laden* atau *value-mediated-findings*) dalam arti antara objek yang dikaji dan temuan yang diperoleh tidak bisa dilepaskan dari subjektivitas peneliti. Peneliti bersifat subjektif dan harus memiliki keberpihakan dalam rangka membongkar ketimpangan yang terjadi pada suatu realitas. Pada tataran metodologis, penelitian dengan paradigma kritis ini meyakini bahwa antara peneliti dan informan atau subjek penelitian harus ada dialog yang bersifat dialektis untuk mendapatkan suatu data yang benar-benar akurat.²¹

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis sumber data. Pertama, data literer atau kepustakaan, yaitu pembacaan dengan seksama isi berita majalah *Sabili*. Berdasarkan isi yang terkandung di dalamnya, dilakukan klasifikasi yang disusun secara logis. Hanya saja, data tekstual, yang biasanya dibaca dengan analisis isi (*content analysis*)²² tidak cukup memadai untuk membongkar motif

²¹ Guba, dkk. "Competing Paradigm in Qualitative Research" dalam Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (Editor), *The Sage Handbook of Qualitative Research*, (London: Sage Publications, 2005), ham. 109-110.

²² Hamad menjelaskan bahwa analisis isi ini lebih bersifat kuantitatif sehingga terlalu menekankan pada pesan yang tampak (*manifest content*) yang implikasinya kurang

dan tujuan di balik sebuah teks yang tertulis dalam majalah Sabili (ideologis, idealis, ekonomis atau politik). Di sini, langkah lain pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh pengetahuan tentang konteks.

Kedua, informan penelitian. Dalam penelitian ini akan digunakan tiga kelompok informan, yaitu pelaku media/redaksi majalah Sabili, pembaca majalah Sabili, dan pakar media, budaya, dan politik Islam. Pelaku redaksi dimaksud adalah wartawan dan staf inti majalah Sabili. Dari orang-orang ini diharapkan dapat diperoleh informasi tentang dasar penentuan tajuk, editorial, dan rubrik berita; pemilihan sumber berita; manajemen majalah; pendanaan majalah; dan penerimaan jenis iklan. Pembaca majalah Sabili juga menjadi unsur penting karena dapat memberikan informasi mengenai latar belakang pendidikan, keluarga, lingkungan, dan level sosial ekonomi dari para pembaca aktif majalah tersebut, di samping pengetahuan dan sikap mereka terhadap berbagai persoalan yang menjadi bahasan penelitian. Dari para pakar diharapkan dapat diperoleh masukan tentang perilaku media, pengaruh budaya, dan pergumulan Islam dalam aneka ragam konteks sosial dan politik masyarakat. Ketiga kelompok informan ini merupakan komponen fundamental, mengingat dapat menjelaskan secara mendalam tentang isi yang terkandung di balik realitas wacana teks majalah Sabili. Sebagai sebuah studi analisis wacana kritis, penggunaan komponen tersebut merupakan suatu keharusan²³ dalam rangka membongkar makna-makna,

memperhatikan konteks (tidak membahas *latent content*) dan juga mengabaikan makna simbolik dari pesan (*symbolic meaning of messages*). Lihat, Hamad, Ibnu. *Konstruksi*, hal. 32-3.

²³ Lihat Hamad, Ibnu. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 47.

baik yang tersirat maupun yang tersurat, dari realitas teks yang disajikan oleh majalah *Sabili*.

Penelitian ini akan menggunakan tiga jenis metode pengumpulan data sebagai berikut. Pertama, kepustakaan/dokumentasi, yaitu menghimpun majalah *Sabili* dan karya-karya ilmiah yang disajikan dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, dan makalah-makalah yang relevan dengan topik penelitian. Kedua, wawancara mendalam dengan informan penelitian sebagaimana telah disebutkan di atas. Ketiga, observasi langsung, yaitu melihat secara riil tentang situasi dan kondisi realitas objektif di lapangan, sehingga peneliti akan memiliki wawasan empirik untuk memahami objek yang dikajinya. Keempat, *focus group discussion* (FGD) yaitu metode yang digunakan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman informan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui pemaknaan mereka secara interaktif berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu.²⁴ Dengan kata lain, penelitian ini juga akan melakukan sebuah kegiatan etnografi yang diarahkan pada pencarian informasi mengenai proses lahirnya wacana Majalah *Sabili*. Oleh karena itu, penelitian ini menuntut peneliti untuk datang kepada redaksi Majalah *Sabili*, di samping juga mengambil sejumlah informan dari pembaca majalah dan pakar tentang media-media Islam untuk memahami konteks sosiokultur muncul majalah dan model pemberitaan *Sabili*.

²⁴ Denzin, *Handbook*, hal. 364-365.

D. Teknik Analisis Data

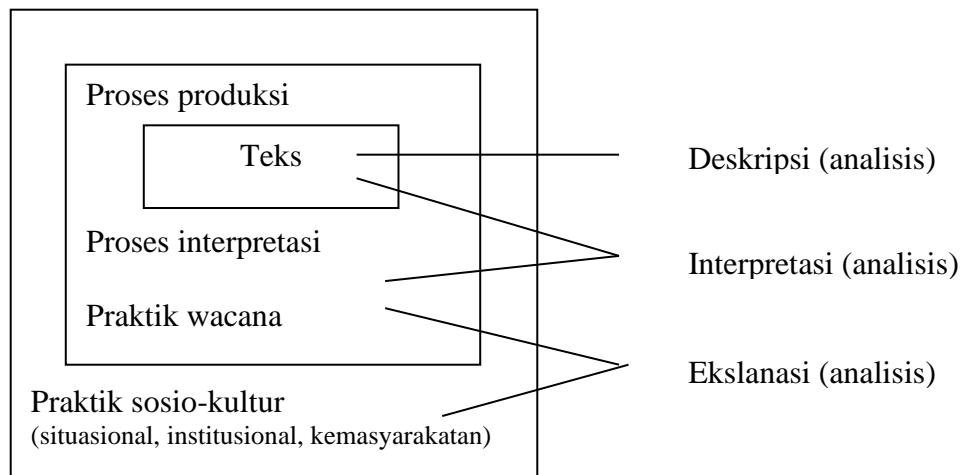
Untuk mengolah dan membaca data yang ada, peneliti memilih metode analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis- CDA*) yang merupakan salah satu perwujudan dari kajian bahasa kritis (*Critical Language Study – CLS*). CLS ini muncul sebagai upaya untuk membumikan beberapa teori budaya kritis modern yang di antaranya adalah: *pertama*, pentingnya teori ideologi²⁵ sebagai mekanisme kekuasaan (*power*) dalam masyarakat modern, dan juga bahasa dilihat sebagai lokus utama ideologi; *kedua*, menyebarnya pengaruh karya Michel Foucault mengenai peran wacana terhadap pengembangan spesifik bentuk-bentuk kekuasaan modern; dan *ketiga*, teori besar Jurgen Habermas tentang teori aksi komunikatif yang menyoroti cara kerja komunikasi yang mengalami distorsi. Ketiga teori ini dianggapnya bersifat teoritik. Dengan menggunakan CDA, teori-teori itu dapat menjadi pisau analisis yang tajam atas wacana yang diproduksi oleh Majalah Sabili tersebut.²⁶ CDA ini akan melalui tiga tahap analisis, yaitu deskripsi terhadap teks, interpretasi terhadap hubungan antara teks dan interaksi, dan eksplanasi terhadap hubungan antara interaksi dan konteks sosial.²⁷ Secara ilustratif, ketiganya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.²⁸

²⁵ Teori ini cukup penting untuk memahami ideologi yang direpresentasikan oleh Majalah Sabili yang dikenal banyak orang begitu sangat radikal. Istilah tersebut dapat didalami melalui Chris Barker dalam *Cultural Studies: Theory and Practice* (London: Sage Publications, 2000) dan *The Sage Dictionary of Cultural Studies* (London: Sage Publications, 2004); Stuart Hall dalam *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*, (London: The Open University, 2003).

²⁶ Lihat Fairclough, *Language and Power*, (London: Pearson Education Limited, 2001), hal. 10.

²⁷ Fairclough, Norman. *Language*, hal. 91.

²⁸ Lihat Hamad, Ibnu. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 47.

Dimensi Wacana**Dimensi Analisis Wacana**

BAB IV

MAJALAH *SABILI* DAN MEDIA ISLAM DI INDONESIA

A. Islam Indonesia dan Media Massa

Bagi umat Islam di Indonesia, media massa dapat dikatakan tidaklah asing. Apa yang disebut sebagai “media massa Islam” atau “media bernuansa Islam” telah muncul sejak lama. C. Smith memperkirakan media umat Islam muncul pertama kali pada tahun 1953. Ia menyebut *Duta Masyarakat*, sebuah media yang menjadi organ *Nahdatul Ulama*.²⁹ Ada pula yang berpendapat bahwa media massa Islam muncul pertama kali di bumi nusantara pada tahun 1934 dengan terbitnya *Pandji Islam* 1934 yang dipimpin oleh Zainal Abidin Ahmad.³⁰ Bahkan, Hanazaki menyebut beberapa media massa yang lahir pada 1913 dalam pengaruh Serekat Islam (SI), yaitu *Sinar Djawa* (Semarang), *Panjaran Warta* (Betawi), dan *Saroetomo* (Surakarta).³¹

Media massa (cetak) di banyak tempat diyakini dapat menjadi alat yang efektif untuk penyebarluasan sebuah informasi (baca: ideologi). Di Mesir, misalnya, pada paroh pertama abad ke-20, sebuah rentang waktu pencarian identitas bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaan, media cetak telah menjadi pilihan para aktivis sosial politik, baik yang kiri/sosialis maupun yang kanan/fundamentalis. Masing-masing sadar bahwa agar pandangan-

²⁹ Edward C. Smith, Edward Cecil Smith, *A History of Newspaper Suppression in Indonesia, 1949-1965* (Jakarta: Grafiti Press, 1983), 109.

³⁰ Tribuana Said, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila* (Jakarta: Gunung Agung, 1988), 7.

³¹ Yasuo Hanazaki, *Pers Terjebak* (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1998), 9.

pandangannya tersebar luas dan diterima masyarakat, pilihan instrumen media ini menjadi niscaya.³² Keniscayaan inilah yang mendorong orang seperti ‘Alī Ṭaha, salah satu tokoh dalam novel *al-Qāhirah al-Jadīdah* yang berkecenderungan sosialis, untuk mengenyampingkan pikiran melanjutkan studi magisternya atau menjadi pegawai di perpustakaan universitas dan lebih memilih mendirikan majalah mingguan *al-Nūr al-Jadīd* (Cahaya Baru) sebagai alat menyerukan reformasi sosial. Sebagaimana ditirukan dan diceritakan oleh Aḥmad Badīr, salah satu temannya, kepada Mahjūb ‘Abd al-Dā’im, ‘Alī Ṭaha pernah berkata:³³

"Biarlah kita serahkan penelitian kepada para peneliti, biarlah kita pusatkan ambisi kita pada sesuatu yang lebih luhur, dan biarlah seluruh perjuangan kita untuk Mesir dan bagaimana ia berubah dari bangsa budak menjadi bangsa yang merdeka."

Media massa, sebagaimana tampak dalam istilahnya, merupakan alat atau sarana penghubung antar elemen masyarakat. Secara tersirat, dalam media ada pihak yang disebut "pengirim," "penerima," dan "pesan." Pihak pengirim biasanya seorang atau sekelompok orang yang berposisi atau memposisikan diri sebagai *agent*, sedangkan pihak penerima biasanya adalah masyarakat kebanyakan yang menjadi target dari pesan pengirim. Tujuan pengirim adalah untuk mempengaruhi, menstimulir, dan mengajak masyarakat agar bersama-sama

³² Begitu strategisnya fungsi media di sini, sehingga peran historis media Mesir bagi tumbuhnya partai-partai di sana diibaratkan sebagai rahim, tempat *nūḥah* partai-partai Mesir terbentuk. Harian *al-Muayyad* yang *dilaunching* oleh Syaikh ‘Alī Yūsuf pada tahun 1889 menelorkan partai (*al-Iṣlāḥ ‘alā al-Mabādi’ al-Dustūrīyah*) yang baru muncul secara resmi pada 9 Desember 1907. Harian (*al-Liwā’*) yang *dilaunching* oleh Muṣṭafā Kāmil pada tahun 1900 itu muncul tujuh tahun lebih awal dari deklarasi berdirinya (*al-Ḥizb al-Waṭanī*). Demikian pula harian (*al-Jarīdah*) yang menjadi jubah para tuan tanah dan intelektual *al-mutagarribūn* adalah satu-satunya corong (*Ḥizb al-Ummah*). Lihat, Jamāl Badawī, *Nazarāt fī Tārīkh Miṣr* (Kairo: Dār al-Syurūq, 1994), 23.

³³ Naḥīb Maḥfūz, *al-Qāhirah al-Jadīdah* (Kairo: Maktabah Miṣr, tt.), 207 dan 163.

berada di jalur yang diidealkannya.³⁴ Oleh karena itu, di tempat mana pun media massa memiliki fungsi informasi, mendidik, dan kritik, di samping kritik.³⁵

Melihat kekuatan dan fungsi media seperti ini, dapatlah dipahami bila berbagai kelompok atau organisasi Islam di Indonesia menjadikan media sebagai penopang eksistensinya. Selain organisasi Islam dan media yang telah disinggung di atas, untuk menyebut beberapa contoh lain, ada *Suara Muhammadiyah* (terbit 1 Januari 1920 oleh Muhammadiyah), *Gema Islam*, *Kibat* (mulai terbit 20 Mei 1953, *Pelita* (awal tahun 1970-an), dan *Republika* (mulai terbit 4 Januari 1993 oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).

Sebagai media Islam,³⁶ tentu saja media-media ini memiliki perhatian besar kepada Islam dan kepentingan umat Islam. Isu-isu tentang Islam dan aspirasi dan kepentingan umat Islamlah yang direpresentasikan oleh media-media ini. Hal ini wajar karena dari sudut sosiologis, media Islam itu tidak akan ada jika tidak ada kelompok masyarakat muslim yang menginginkannya atau, dengan kata lain, karena ada kelompok masyarakat muslim yang menginginkan media Islam itu muncul, maka munculah media Islam itu. Pendek kata, media Islam tentu saja merupakan representasi kepentingan dari aspirasi masyarakat muslim.

³⁴ Kedudukan media massa, bagi McQuail, berada di antara dua lapisan social, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Media massa pun memiliki fungsi penghubung dalam sebuah masyarakat. Lihat, Erman Anom, *Media Sebagai Alat Pembangunan Masyarakat Aceh*,

³⁵ Rusydi Hamka & Rafik (Peny.), *Islam dan Era Informasi*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), hal. 8

³⁶ Zaim Uchrowi mengklasifikasi media Islam dalam dua kelompok. Pertama, media yang menyebut dirinya Islam dan menggunakan atribut formal Islam. Kedua, media yang mengembangkan nilai-nilai Islam, tanpa menonjokan atribut formal Islam. Lihat, Herry Muhammad, *Jurnalisme Islam dan Tanggung Jawab Moral Wartawan Muslim* (Surabaya: 1992).

Hanya saja, dalam perkembangannya media telah menjadi intitusinya sendiri yang seringkali keluar dari kepentingan dan aspirasi masyarakat yang melahirkannya. Media telah terkooptasi, misalnya, oleh kepentingan bisnis dan politik tertentu sehingga posisi dan peran media tidak lagi independen sebagaimana pada masa awalnya yaitu mengakomodasi dan mengartikulasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat pendukungnya.³⁷

Fenomena terakhir inilah, paling tidak, yang dirasakan oleh sebagian aktivis keruhanian Islam di kampus-kampus perguruan tinggi umum pada awal tahun 1980-an. Menghadapi rezim Orde Baru yang otoriter dan “tidak ramah” terhadap umat Islam, media Islam lebih memilih untuk bersikap lunak dan mengamankan urusan “keamanan” izin dan bisnisnya daripada menyuarakan posisi umat yang terpinggirkan vis a vis negara. Umat Islam pun tidak memiliki media yang kuat. Di bidang ini, umat Islam dapat dikatakan sudah “kalah” dari umat lain. Media massa Islam sangat lemah dan terkesan “menghindari” pemberitaan yang bisa menghadapkannya dengan penguasa. Akibatnya, Islam dalam media bercorak sangat apolitis dan nyaris menyentuh lingkaran kekuasaan.

Tentu saja, wajah Islam apolitis dalam media ini mengundang keprihatinan sebagian generasi muda muslim produk kampus tersebut yang *nota bene* “melek” politik. Islam, bagi mereka, adalah sebuah sistem yang komprehensif, meliputi totalitas kehidupan: dunia dan akhirat. Ia mengatur hubungan vertikal manusia dengan Allah dan hubungan horisontalnya dengan

³⁷ Dedi Jamaludin Malik, “Kekuatan Media Bukan di Pihak Islam, wawancara khusus Suaka News Edisi 5, <http://suakaonline.com/2009/06/13/%E2%80%9Ckekuatan-media-bukan-di-pihak-islam%E2%80%9D/>, 31 Nopember 2010.

sesamanya. "*Al-Dīn* (Islam) itu akidah, syariah, dan politik. Allah terlalu sayang untuk membiarkan masalah manusia tanpa arahan dan *tashrī'* (pemberian syariah)," kata Shaykh 'Alī al-Manūfī menjawab pertanyaan salah seorang muridnya, apakah tidak sebaiknya kelompoknya menjauhi politik.³⁸ Di tempat lain ia menyatakan bahwa mereka yang mengira bahwa ajaran-ajaran Islam hanya mengenai aspek spiritual atau ibadah saja, menurutnya, jelas keliru. Islam itu, baginya, aqidah dan ibadah, tanah air dan kebangsaan, agama dan negara, spiritual, al-Qur'an, dan pedang.³⁹

Oleh karena itu, dalam pandangan mereka, dunia media Islam di Indonesia perlu diberi suntikan "darah segar." Suntikan dimaksud adalah dengan melahirkan media yang memiliki "muatan" yang selama ini nyaris tidak tersentuh oleh media Islam yang ada, yaitu muatan politik. Media Islam, bagi mereka, harus berani menyuarakan isu-isu Islam dan aspirasi umat Islam yang, saat itu, tidak berdaya berhadapan dengan rezim yang tidak ramah kepadanya. Media Islam harus dapat menjadi juru bicara masyarakat muslim yang tanpa kuasa sejak lama dalam sejarah Indonesia merdeka meskipun menjadi umat beragama mayoritas; berani mengambil risiko apapun untuk berada di garda depan dalam membela dan memajukan umat Islam; dan mengambil posisi penyeimbang dari media-media lain yang kurang berpihak kepada umat Islam. Akhirnya, majalah Sabili pun lahir dengan membawa semangat semacam ini.

³⁸ Najīb Mahfūz, *al-Sukkarīyah* (Kairo: Maktabah Miṣr, tt.), 84 dan 294.

³⁹ Lihat, Najīb Mahfūz, *al-Sukkarīyah*, 294-5:

"تعاليم الإسلام وأحكامه شاملة تنظم شؤون الناس في الدنيا والآخرة، وأن الذين يظنون أن هذه التعاليم إنما تتناول الناحية الروحية أو العبادة دون غيرها من النواحي مخطئون في هذا الظن، فلا إسلام عقيدة وعبادة ووطن وجنسية ودين ودولة وروحانية ومصحف وسيف."

B. Majalah *Sabili* dan Islam

Sejarah bangsa Indonesia menyaksikan bahwa hubungan antara Islam dan negara kerap kali diwarnai dengan ketegangan. Persoalan apakah Indonesia merdeka harus didasarkan pada prinsip-prinsip sekular atau agama telah menjadi problem sentral sejak awal.⁴⁰ Polemik di antara para *founding fathers* tentang dasar negara pun terjadi secara berkepanjangan, bahkan hingga jauh setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, meskipun telah dicapai kompromi politik yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara oleh dua kelompok yang, oleh Maarif dan Anshari, disebut dengan kelompok nasionalis Islam dan kelompok nasionalis sekular.⁴¹ Di masa Orde Lama ketegangan ini kembali menghangat dalam Parlemen Majelis Konstituante 1956-1959 dan berujung pada pembubaran majlis ini oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali kepada UUD 1945 setelah majlis tidak dapat mengambil kesepakatan tentang ideologi dan dasar negara: Islam atau Pancasila.

Beberapa *clash* fisik juga muncul di banyak daerah, menyertai ketegangan hubungan Islam dan negara di tingkat elit dan parlemen ini. DI (*Dârul Islâm*) atau NII (Negara Islam Indonesia) diproklamkan oleh Soekarmadji Maridjan Kartosuwiryo tanggal 7 Agustus 1949 di Jawa Barat, tetapi kemudian ditumpas

⁴⁰ Borchers, H., *Hardline Islamist Discourse in Indonesia: Sabili and the International Dimension*, <http://www.slideshare.net/h.borchers/borchers-h-2004-hardline-islamist-discourse-in-indonesiasabili>, 18 Nopember 2010.

⁴¹ Lihat, A. Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1996). Lihat pula, Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juli 1945, dan Sejarah bKonsensus Nasional antara Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959* (Jakarta: Rajawali Press, 1986).

oleh Soekarno dan sang pemimpin dieksekusi mati pada tanggal 5 September 1962.⁴² Di Sulawesi Selatan gerakan DI/TII (Tentara Islam Indonesia) dikomandoi oleh Kahar Muzakar. Sebagaimana gerakan di pusat, Jawa Barat, gerakan yang muncul pada 1951 dan mengklaim sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo ini juga juga ditumpas dan sang komandan pun tertembak mati dalam suatu penangkapan pada Pebruari 1965.⁴³

Di masa Orde Baru gesekan antara Islam dan negara (baca: pemerintah) juga sering terjadi. Pada tahun 1970-an muncul gerakan yang lebih dikenal dengan “Jaringan Komando Jihad.” Gerakan ini dipelopori oleh para veteran DI/TII atau NII, seperti Ateng Djaelani Setiawan (di masa NII Kartosuwiryo sebagai KPW wilayah VII Jawa Barat, Dodo Muhammad Darda’ (putra Kartosuwiryo), Masduki, dan H. Ismail Pranoto atau Hispran. Hanya saja, sebagaimana teman-teman dan para pendahulunya, mereka pun pada Pebruari 1983 ditangkap akibat adanya informan yang ditanam pemerintah, Danu Muhammad Hasan, dan dihadapkan di Pengadilan Jakarta.⁴⁴

Peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa sejarah kelam lain yang menjadi bukti atas hubungan Islam dan negara yang saat itu kurang sehat. Peristiwa ini sedikit banyak dilatari oleh keinginan pemerintah Orde Baru pada era tahun 1980-an untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi di Indonesia

⁴² Ahmad Yani Anshori, *Islam dan Negara-Bangsa di Indonesia: Studi Terhadap Perjuangan ke Arah Negara Islam di Dalam Parlemen Konstituante (1956-1959) dan di Luar Parlemen*, disertasi pada UIN Syarif Hdayatullah 2006 tidak diterbitkan, 8-9.

⁴³ Lihat, Syafaruddin Usman Mhd, *Tragedi Patriot & Pemberontakan Kahar Muzakkar* (Narasi, 2009).

⁴⁴ Lihat, Ken Conboy, *INTEL: Inside Indonesia's Intelligence Service* (Jakarta-Singapore: Equinox Publishing, 2004), 137-8.

dengan membuat dan mensosialisasikan Rancangan Undang-Undang (RUU) no 5/1985 tentang pemberlakuan asas tunggal Pancasila.⁴⁵ Dalam peristiwa ini korban berjatuhan di pihak masyarakat (Islam). Bahkan, salah seorang tokoh masyarakat, yang dituduh sebagai “dalang” peristiwa 12 September 1984 tersebut dan kemudian dipenjara, menulis eksepsi pembelaannya di depan pengadilan dengan judul “Musuh-musuh Islam Melakukan Ofensif terhadap Umat Islam Indonesia.”⁴⁶

Di pentas politik Internasional umat Islam juga diposisikan sebagai korban. Suara negara-negara Islam atau yang mayoritas penduduknya Islam nyaris tidak terdengar (baca: didengar) dalam kancah politik antar negara yang terlembaga dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pendudukan Israel terhadap Palestina yang tidak kunjung berakhir adalah salah satu contoh akibat dari posisi tawar umat Islam yang rendah di hadapan bangsa-bangsa Barat sebagai penopang eksistensi negara Israel. Dalam hal ini, Barat bahkan terkesan lebih memilih satu negara Israel yang kecil daripada seluruh negara Arab yang berpenduduk mayoritas Islam.

Namun, kondisi umat Islam yang sedang terpuruk akibat kebijakan global dan lokal (Orde Baru) saat itu menjadi sebuah *blessing in disguise* (anugerah terselubung). Ketegangan-ketegangan dan, terkadang, *clash* fisik antara negara dan umat Islam tersebut telah mendorong intensifikasi rasa identitas keagamaan

⁴⁵ Lihat, Umi Kholisyah, *Peristiwa Tanjungpriok 1984 (Sebuah Kajian Sejarah Sosial)*. Skripsi 2010 Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Universitas Negeri Malang, tidak diterbitkan.

⁴⁶ <http://olgariki.multiply.com/journal/item/8>, 23 Des 2010.

di sebagian kalangan umat Islam.⁴⁷ Dalam tekanan penguasa, keberagamaan umat pada awal 1980-an malahan semakin menguat. Kesadaran tentang Islam bahkan menjamur bak cendawan di musim hujan di kampus-kampus yang bisa disebut “sekular.” Semangat religiusitas umat yang meningkat ini sering dikenal sebagai kebangkitan Islam (*Islamic Revivalism*).

Kebangkitan Islam ini ditandai oleh munculnya gerakan Islam baru yang memiliki basis ideologi, pemikiran, dan strategi gerakan yang berbeda dengan gerakan atau ormas-ormas Islam yang telah ada sebelumnya, seperti NU, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Irsyad, dan Jamaat Khair.⁴⁸ Ini ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok pengajian “Usroh” yang banyak terdapat di kampus-kampus ternama di Indonesia pada awal 1980-an.⁴⁹

Kelompok-kelompok pengajian *usroh* ini, yang pada awalnya dikembangkan di masjid Salman ITB, selanjutnya mengalami beberapa pergeseran kepada pola gerakan, yang diilhami langsung oleh gerakan *al-Ikhwān al-Muslimūn*. Pergeseran ini mendapat momentum oleh kedatangan para alumnus Timur Tengah. Mereka pun memberikan pengaruh besar dalam materi pembinaan, metode dakwah, sistem pengorganisasian, kaderisasi, dan perubahan

⁴⁷ Fred R. Von der Mehden, “Malaysia dan Indonesia,” dalam Shireen T. Hunter (ed.) *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan* (Yogya: Tiara Wacana, 2001), 272.

⁴⁸ Agung Pardini, *Majalah Islam Sabili: Media Revivalis Gerakan Tarbiyah (1988-1993)*, <http://www.scribd.com/doc/15912915/Majalah-Sabili-Media-Revivalis-Sejarah>, 5 Oktober 2010.

⁴⁹ Secara harfiah, *usroh* ini berarti keluarga, namun secara konseptual dan aktual *usroh* merupakan unit terkecil (sel) dari sebuah gerakan yang lebih luas. Sesungguhnya sistem *usroh* ini telah lama dikenal dalam nomenklatur gerakan Islam kontemporer karena sistem ini menjadi tulang punggung dari program kaderisasi organisasi *al-Ikhwān al-Muslimūn* di Mesir dan *Jama'at-i Islami* di Pakistan. Lihat, Martin van Bruinessen, *Genealogies of Islamic Radicalism in post-Suharto Indonesia*, http://www.let.uu.nl/martin.vanbruinessen/personal/publications/genealogies_islamic_radicalism.htm, 17 Nopember 2010.

nama gerakan. Nama kegiatan dakwah kampus akhirnya berubah dari *usroh* menjadi gerakan *Tarbiyah*. Pengaruh besar mereka ini tampaknya akibat dari tiga hal. Pertama, mereka secara formal adalah alumnus dari beberapa perguruan tinggi di kawasan yang selama ini menjadi kiblat mayoritas umat Islam Indonesia dalam melihat keberagamaannya, yaitu Timur Tengah. Kedua, mereka secara faktual menguasai idiom-idiom Arab yang, oleh banyak umat Islam di Indonesia, diidentikkan dengan Islam. Ketiga, mereka telah melihat dari dekat atau bahkan mengalami dan merasakan berbagai dampak kelahiran gerakan *al-Ikhwān al-Muslimūn* selama kuliah di Timur Tengah.

Salah satu bentuk strategi dakwah yang coba dikembangkan oleh para aktivis gerakan Tarbiyah dalam menyebarkan ide-ide keislamannya adalah dengan membangun sebuah media massa Islam. Mereka yakin bahwa media massa memiliki peran sentral dan strategis bagi pengembangan dakwah. Selain itu, mereka tampaknya juga telah belajar dari fakta bahwa sikap Barat terhadap Islam lebih dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap umat Islam daripada oleh umat Islam itu sendiri. Persepsi Barat seperti ini, dalam banyak hal, muncul akibat dari Islam di media Barat yang dihadirkan dalam citra negatif dan, pada gilirannya, melahirkan sikap Barat yang anti Islam atau dikenal dengan istilah “islamophobia.”⁵⁰ Dengan kata lain, media massa, bagi mereka, dapat

⁵⁰ Istilah “Islamophobia” merupakan istilah yang relatif baru dalam perdebatan public, sehingga banyak pengertian yang dihadirkan. Namun, *The Runnymede Trust*, sebuah komisi tentang muslim Inggris dan *Islamophobia* di Inggris menyatakan bahwa istilah *Islamophobia* menunjuk pada permusuhan tanpa dasar terhadap Islam. Istilah ini juga menunjuk pada akibat-akibat praktis dari permusuhan seperti itu dalam diskriminasi tidak adil terhadap individu dan kelompok muslim, dan pada pengeluaran umat Islam dari percaturan sosial dan politik (*the term Islamophobia refers to unfounded hostility toward Islam. It refers also to the practical consequences of such hostility in unfair discrimination against Muslim individuals and*

memainkan peran ganda: menyebarkan Islam sebagaimana yang mereka idealkan dan counter balance terhadap media-media Barat atau yang bermodel Barat yang cenderung menyudutkan umat Islam.⁵¹

Oleh karena itu, pada pertengahan tahun 1980-an, persisnya tahun 1984, lahir majalah baru berukuran setengah folio bernama SABILI yang secara literal dalam bahasa Arab berarti “JALANKU.” Nama ini tampaknya diambil dari satu kata dalam al-Qur’an surah *Yūṣuf*: 108,⁵² yang mencerminkan semangat para penggagas untuk melahirkan gerakan dakwah ideal. Sebagaimana makna yang tersurat dan/atau tersirat dari ayat tersebut, mereka menginginkan majalah ini sebagai bagian dari gerakan dakwah untuk menyeru ke jalan Allah dengan menawarkan konsep dan argumentasinya kepada masyarakat. Mereka menjadikan majalah sebagai media mereka untuk menyeru kepada apa yang mereka percaya sebagai Islam yang benar.

Selain sebagai sarana penyebaran dakwah dan “corong” gerakan, majalah Sabili juga menjadi semacam sarana pendidikan bagi kader-kadernya. Fakta bahwa banyak aktivis muslim dari kampus-kampus perguruan tinggi negeri (PTN) tidak dapat mengakses sumber-sumber Islam yang tertulis dengan banyak

communities, and to the exclusion of Muslims from mainstram political and social affairs). Lihat, *The Runnymede Trust*, 1997, 1

⁵¹ Ada banyak film TV, serial drama, talk show, dan kartun, tempat umat Islam dilukiskan sebagai tidak berperadaban, anti modern, anti demokrasi, teroris, fundamentalis, radikal, militan, barbarik, dan anti Barat. Peristiwa kekerasan individual atau gerakan ekstrimis di negara-negara Islam selalu diatribusikan oleh media Barat kepada Islam. Lihat, Siddiqi, A. (1999). “Islam, Muslims, and the American Media” dalam A. Haque (Ed.), *Muslims and Islamization in North America* (Maryland: Amana Publications), 204.

⁵² قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“Katakanlah: “Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik.”

Arab menambah urgensi kelahiran majalah ini. Dus, majalah ini dapat berperan sebagai referensi bagi para kader dalam mengadakan pendalaman materi secara mandiri setelah mendapatkan pendidikan melalui model pembelajaran berbentuk *halaqah* atau *liqā'* yang mengandalkan materi ajar dari seorang *murabbi* (guru/mentor).⁵³

Majalah ini didirikan oleh para aktivis muslim yang terhimpun dalam lembaga KTAI (Kelompok Telaah dan Amaliah Islam). Pemimpin redaksi merangkap pemimpin umum dan penanggung jawab adalah Rahmat Abdullah (dengan naman samaran Abu Fida) sedangkan dewan redaksi adalah Muhammad Zainal Muttaqin (nama samarannya Muhammad Ishaq atau Abu Rodli) dan Ade Erlangga Masdiana. Penanggung jawab distributor dan proses *setting* dan *lay out* masing-masing dipegang oleh Arifianto dan Ahmad Fery Firman.

Berbeda dengan majalah-majalah Islam lain sebelumnya dan sudah dikenal secara luas oleh umat Islam seperti *Panji Masyarakat*, *Suara Muhammadiyah*, *Media Dakwah* (DDII), *Suara Hidayatullah*, dan *Ar-Risalah* (PERSIS Bandung) yang memiliki izin terbit yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan, baik SIT (Surat Izin Terbit), STT (Surat Tanda Terbit) maupun SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), majalah *Sabili* terbit tanpa dilengkapi oleh izin resmi apapun dari pemerintah. Hanya saja, *Sabili* tetap terbit laiknya sebuah gerakan bawah tanah dan beredar di masjid-masjid dan kelompok-kelompok pengkajian Islam di kampus-kampus dengan mempersiapkan jawaban,

⁵³ Martin van Bruinessen, *Genealogies of Islamic Radicalism in post-Suharto Indonesia*, http://www.let.uu.nl/martin.vanbruinessen/personal/publications/genealogies_islamic_radicalism.htm, 17 Nopember 2010.

bila sewaktu-waktu dipermasalahkan, bahwa majalah ini untuk kalangan sendiri dan terbatas.⁵⁴ Salah satu alasan *Sabili* untuk terbit tanpa izin resmi adalah karya ongkos pengurusan izin sangat mahal dan persyaratannya juga sulit dipenuhi.⁵⁵ Namun, sikap *Sabili* ini dapat dibaca sebagai sebuah bentuk protes terhadap sistem politik yang dianggapnya tidak mengakomodasi hak-hak umat Islam untuk menyatakan gagasan dan aspirasinya.

Dalam pengantar editorial edisi pertama *Sabili* dinyatakan bahwa kelahiran *Sabili* lebih didorong oleh kenyataan tidak adanya media yang menghadirkan potret Islam secara otentik dan komprehensif, mendidik umat Islam dengan ide dan pikiran Rabbānī, dan membimbing mereka kepada jalan hidup yang *hanīf*.⁵⁶ Pernyataan ini menarik mengingat sebelum *Sabili*, sebagaimana telah disebutkan di atas, telah banyak majalah Islam yang muncul. Pernyataan *Sabili* ini tampaknya hanya bisa dipahami dalam konteks bahwa saat itu media-media Islam cenderung mengabaikan apa yang dipandang *Sabili* sebagai bagian tidak terpisahkan dari Islam, yaitu politik. Absennya Islam politik inilah yang ingin diisi oleh hadirnya majalah *Sabili*.

Sayangnya, edisi *Sabili* yang pertama ini juga menjadi terakhir karena *Sabili* kemudian menghilang dari peredaran akibat kekurangan dana dan sumber daya manusia yang secara serius menangani media ini. Namun, *Sabili* muncul

⁵⁴ Rivai Hutapea, Wawancara, 19 Nopember 2010.

⁵⁵ Telah dimaklumi bahwa izin resmi pemerintah saat itu memang sulit diperoleh, kecuali bagi individu atau kelompok yang memiliki hubungan dekat dengan otoritas politik terutama Golongan Karya. Lihat, Krishna Sen dan David T. Hill, *Media, Culture, and Politics in Indonesia*, (UK: Oxford University Press, 2000), 60.

⁵⁶ *The History of Sabili*, 2.

lagi pada tahun 1988 dan terbit sebagai majalah dua mingguan. Periode 1988-1993 ditandai oleh tiras yang terus meningkat, mulai dari 2000 eksemplar (1988) sampai 25.000 eksemplar (1991). Oplah *Sabili* pun terus menanjak menjadi 30.000 eksemplar, 35.000 eksemplar, 45.000 eksemplar, dan menjadi 60.000 eksemplar pada 1993.⁵⁷

Selain karena format ukuran majalah yang baru, yaitu setengah folio, daya tarik *Sabili* juga disebabkan oleh isi pemberitaan maupun oleh cara konstruksi gagasan yang ingin dihadirkan kepada khalayak pembacanya. Berbeda dengan majalah-majalah Islam yang lain, majalah *Sabili* memiliki fokus revitalisasi Islam dalam konteks gerakan dakwah sebagai isi utama berita. Berbagai hambatan, internal dan terutama eksternal, dalam proses revitalisasi ini menjadi fokus pemberitaan. Liputan-liputan tentang kondisi umat Islam yang tertindas di berbagai belahan dunia juga banyak menghiasi setiap edisi *Sabili*. Sumber berita dunia Islam di dapat langsung dari kontributor *Sabili* di luar Negeri atau dari majalah-majalah Islam (terutama dari Timur Tengah dan Pakistan) dan pers Barat. Sumber berita *Sabili* dimaksud antara lain: *al-Muslimūn* (Pakistan), *Qaḍāyāh Daulah* (Palestina), *al-Jihād* (Peshawar, Pakistan), *al-Haras al-Waṭānī* (Saudi Arabia), *Liwā' al-Islām*, *al-Bayān*, *al-Insān* (Paris), *Palestin Muslimah* (London), *News Week* dan *Times*.⁵⁸

Menariknya, pemerintah Orde Baru, yang dikenal sangat sensitif terhadap hal-hal yang berada di luar “jalur” kebijakan represifnya, seolah-olah

⁵⁷ Agus Muhammad, *Jihad Lewat Tulisan: Kisah Sukses Majalah Sabili dengan Beragama Ironi*, www.pantau.com, Juli 2001.

⁵⁸ Agung Pardini, *Majalah Islam Sabili*, 11.

mendiamkan *Sabili* beroperasi tanpa izin. Ada banyak tafsir atas hal ini.⁵⁹ Salah satunya bahwa keberadaan *Sabili*, sejak kemunculannya, belum menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan negara yang menjadi prioritas pemerintah Orde Baru. Tafsir ini diperkuat oleh fakta bahwa dalam pemberitaan politik, *Sabili* lebih banyak menjadikan politik luar negeri, terutama politik di dunia Islam, daripada politik dalam negeri.⁶⁰

Namun, begitu stabilitas negara terusik, pemerintah pun mengambil tindakan. Inilah yang dihadapi *Sabili* saat menampilkan surat dari seorang pembaca pada edisi ke-7/TH. V 20 Nopember-5 Desember. Surat tersebut berisi kisah pelecehan seksual dan keyakinan yang dialami oleh seorang perempuan muslim berjilbab oleh beberapa orang yang menggunakan liontin kalung berbentuk salib. Sang perempuan mengaku dibawa paksa mereka ke sebuah tempat di Rawamangun dekat kampus IKIP (kini Universitas Negeri) Jakarta, dilucuti perhiasaannya, dan disuruh mengatakan kata-kata Kristen. Untungnya, ia berhasil lolos. Surat ini dianggap oleh pihak pemerintah sebagai berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), dan editor *Sabili* pun dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk memberikan klarifikasi. Akhirnya,

⁵⁹ Tafsir pertama menyatakan bahwa *Sabili* lahir berbarengan dengan bermulanya sikap akomodatif negara terhadap umat Islam. Negara saat itu menghadapi tekanan politik dari kelas menengah muslim yang sedang tumbuh agar umat Islam mendapatkan representasi lebih besar di pemerintahan. Salah satu perwujudan sikap akomodatif pemerintah adalah disyahnannya Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama menjadi undang-undang tahun 1989. Tafsir lain mensinyalir bahwa Presiden Soeharto, yang saat itu hubungannya dengan petinggi militer yang sebelumnya menjadi tangan kanannya kurang harmonis, berupaya mengambil hati kelompok-kelompok Islam. Lihat, Dwi Pratomo Yulianto, *Militer dan Kekuasaan: Puncak-Puncak Krisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia* (Yogyakarta: Narasi, 2005), 276-7. Lihat pula, Agung Pardini, *Majalah Islam Sabili*, 11-2.

⁶⁰ Aay Muhammad Furqon, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Teraju, 2004), 134.

meskipun tanpa pernah memenuhi panggilan klarifikasi, pengelola *Sabili* memutuskan untuk berhenti terbit sementara setelah edisi ke-10 dan ke-11/TH.V Januari-Februari 1993 sedang dalam proses cetak, mengingat resiko besar akan dihadapi bila para aktivis Islam dan pengelola *Sabili* menjadi target pemerintah.⁶¹

Setelah rezim Orde Baru jatuh pada Mei 1998, kebebasan pers dibuka lebar-lebar oleh Orde Reformasi. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dijamin dan dilindungi oleh negara. Bila di era sebelumnya, media menjadi instrumen pemerintah dan kebijakan redaksi harus sesuai dengan kebijakan komunikasi pemerintah, maka di era Reformasi media menjadi instrumen komunikasi pemilik. Kebebasan dan tanggung jawab media diletakkan dalam bingkai keseimbangan yang selaras dan serasi, secara jurnalistik, etika, dan hukum.⁶² Pengawasan dan kontrol media lebih diberikan kepada masyarakat sebagai pembacanya. Oleh karena itu, izin publikasi dapat diperoleh dengan mudah oleh industri-industri media. Jumlah izin publikasi yang dikeluarkan pasca tumbanganya Orde Baru meroket dari 289 menjadi 1.379 meskipun data terakhir menunjukkan bahwa hanya 556 publikasi yang masih bertahan hingga sekarang.

Media-media Islam pun bermunculan laiknya laron menyambut “cahaya” kebebasan. *Ummi, Annida, Saksi, Tarbawi, Al Izzah, Darul Islam, Salafy, Percikan Iman, Hayatul Iman, Gema Islam, El-Fata,* dan *Islamia* adalah beberapa

⁶¹ *The History of Sabili*, 3.

⁶² Lihat, A. Muis, ”Perkembangan Kehidupan Pers di Era Reformasi” dalam S. Sularto (ed.), *Humanisme Dan Kebebasan Pers; Menyambut 70 Tahun Jakob Oetama*. Cet. I; (Jakarta: Buku Kompas, 2001), h. 147-148.

majalah Islam yang dapat disebut yang muncul pasca tumbangny rezim Orde Baru.

Sabili kemudian terbit lagi pada Juni 1998 di bawah manajemen perusahaan PT. Bina Media *Sabili* dan mendapatkan SIUPP dari departemen informasi pada 30 Juli 1998.⁶³ Dengan manajemen dan modal SIUPP ini, *Sabili* membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas, menemukan “pembaca-pembaca fanatik” baru, dan mengeruk keuntungan dari oplah dan iklan. Segmen yang bisa dibidiknya tidak lagi terbatas pada remaja-remaja masjid dan anggota ROHIS (Kerohanian Islam, yaitu kelompok-kelompok kajian agama di sekolah), tetapi juga masyarakat muslim pada umumnya, terutama para profesional muda muslim.

Dengan segmen pembaca yang meluas, *Sabili* menjelma menjadi “majalah semua kalangan muslim.” Pembacanya menembus batas usia, jenis kelamin, afiliasi politik, aliran agama, dan organisasi kemasyarakatan. Berbagai sekat dan jarak yang memisahkan berbagai kelompok muslim ini seolah-olah terjembatani oleh *Sabili*. Hal ini karena pembaca *Sabili* tidak disatukan oleh organisasi kemasyarakatan, tetapi oleh keinginan “kembali kepada Islam,” yang mereka pahami sebagai mengandung ajaran yang “universal” dan “sempurna:” ibadah dan muamalah, akidah dan aksi nyata, privat dan publik atau agama dan politik.

Sabili, sebagaimana terungkap secara eksplisit dari visinya, bertekad menjadi media pengendali informasi dan advokasi umat Islam. Umat Islam yang diangankannya adalah umat yang berakidah Islam lurus, berdasarkan al-Qur’an

⁶³ *Sabili*, No.3 TH. VI, 4 Agustus 1998, 2.

dan Sunnah, tangguh, dan berwawasan ke depan. Melalui media Islam yang berwibawa dan para jurnalis yang profesional dan berakhlak mulia, *Sabili* ingin mengawal umat agar tidak meninggalkan Islam dalam menjalani kehidupannya yang terus berkembang.⁶⁴

Dari visi dan misinya, terlihat bahwa pendiri dan pengelola *Sabili* secara tegas menjadikan media ini sebagai alat “dakwah.” Penegasan ini menarik mengingat mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Islam. Dalam istilah “dakwah” Islam, tersirat sebuah upaya untuk mengajak seseorang atau sekelompok orang kepada Islam. Hanya saja, bila diletakkan dalam konteks sosio-politik Indonesia, tempat *Sabili* lahir, maka penegasan *Sabili* tersebut akan mudah dipahami. Akibat dari kebijakan Orde Baru yang cenderung mendeligitimasi politik Islam, maka historisitas Islam Indonesia pun menjadi minus politik, padahal Islam, dalam pandangan *Sabili*, itu serbamencakup termasuk masalah politik. Berislam tanpa politik sama artinya dengan belum berislam secara total, dan *Sabili* ingin melakukan “dakwah” atau mengajak umat Islam untuk menjalankan Islam secara total (*kāffah*) ini. Selain itu, *Sabili* tampaknya ingin mengajak umat Islam untuk tidak segan-segan menampilkan simbol-simbol dan identitas Islam di ruang publik seperti memakai busana muslim, satu hal yang pada era-era sebelumnya diabaikan umat Islam akibat dari kebijakan rezim yang mensterilisasi ruang publik dari simbol agama (Islam).

⁶⁴ Visi *Sabili* adalah sebagai media pengendali informasi dan advokasi umat Islam. Misinya adalah: 1) menjaga akidah dan ukhuwah umat; 2) menyajikan ajaran Islam secara utuh berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah; 3) melahirkan jurnalis dai yang profesional, penuh dedikasi, dan berakhlak mulia; 4) membentuk generasi muslim yang tangguh dan berwawasan ke depan; dan 5) membangun citra penerbitan Islam yang berwibawa.

Oleh karena itu, tidaklah aneh bila pada rezim reformasi ini *Sabili* memberikan ruang yang semakin besar kepada politik mutakhir Indonesia, dengan tentu saja tanpa mengabaikan isu-isu politik internasional. Pada edisi Nopember 1998, misalnya, *Sabili* mengangkat situasi panas menjelang Sidang Istimewa MPR sebagai telaah utamanya dengan *headline* “Buat Apa Habibie?” *Headline* ini menelaah berbagai goyangan terhadap Habibie, presiden RI saat itu, baik dari dalam maupun dari luar negeri, baik dari umat Islam maupun dari umat non-Islam. Selain itu, *Sabili* juga memuat potret buram umat Islam selama ini dengan beragam tragedi yang dialaminya: tragedi Priok, Tasikmalaya, DOM Aceh, Nipah Sampang, Ujung Pandang, dan tragedi Banyuwangi. Potret-potret buram ini diberinya judul “Buah Karya Mereka Yang Anti Islam.”⁶⁵

Di sini dapat dikatakan bahwa *Sabili* hadir sebagai media yang diperuntukkan untuk dan menyuarakan aspirasi umat Islam. Umat Islam dimaksud adalah umat Islam yang meyakini bahwa agama yang dipeluknya itu memberinya serangkaian pedoman bagi kehidupannya sebagai individu dan anggota masyarakat di dunia dan akhirat dan dalam ruang privat dan publik. Mereka sadar bahwa Islam yang mereka praktikkan selama ini adalah Islam individual, bukan Islam sosial, dan keberagamaan mereka adalah “keberagamaan yang minus” (komitmen sosial-politik). Namun, mereka bertekad untuk mulai menjalankan Islam secara total. Islam, bagi mereka, harus mewujudkan di tengah keluarga dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁶⁵ *Sabili*, No.9 TH. VI, 11 Nopember 1998, 21-29 dan 40-41.

Dengan model masyarakat muslim yang diangankannya seperti ini, *Sabili* menjadikan para intelektual dan tokoh muslim, yang mendukung penerapan Islam di ruang publik, sebagai sumbernya. Tokoh-tokoh seperti Daud Rasyid,⁶⁶ Al Habib Muhammad Rizieq Syihab,⁶⁷ Adian Husaini,⁶⁸ dan Hartono Ahmad Jaiz⁶⁹ menghiasi artikel-artikel yang dimuat di majalah *Sabili*. Mereka adalah para tokoh yang dapat dikatakan sebagai representasi dari Islam formalis sebagai lawan dari Islam substansialis. Bagi mereka, para tokoh Islam terakhir ini adalah agen-agen Zionis yang ingin memperlemah Islam.

Ini semua menjadikan majalah *Sabili* sebagai majalah yang memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri. Ia berhasil menampilkan model yang berbeda dari majalah-majalah Islam yang telah muncul sebelumnya. Peredarannya tidak hanya terbatas pada generasi muda masjid, para aktivis organisasi Islam, dan anggota Kerohanian Islam (ROHIS) di kampus-kampus dan sekolah-sekolah seperti di masa Orde Baru, tetapi di masa Orde Reformasi ia bahkan dapat dengan mudah ditemukan toko-toko dan kios-kios buku atau majalah. Ia dibaca

⁶⁶ Ia sekarang sebagai dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada tahun 1990-an, ia aktif menulis di *Media Dakwah* dan dikenal sebagai pengkritik utama cendekiawan muslim Indonesia, Nurcholis Madjid, yang dinilainya sebagai penyebar ide sekularisme di Indonesia. Lihat, Ade Armado, "Citra Kaum Pembaharu Islam dalam Propaganda Media Dakwah" dalam *Ulumul Qur'an*, IV:3, 1993.

⁶⁷ Ia adalah pemimpin ormas Front Pembela Islam (FPI), yang didirikan oleh para *ḥabaib*, *ustāz*, dan *'ulamā'* pada 17 Agustus 1998. Berdirinya ormas ini dimotivasi oleh maraknya dekadensi moral masyarakat. Oleh karena itu, ormas ini dikenal sebagai berada di garda depan dalam memberantas kemaksiatan. Dalam aksinya, ormas ini tidak mengenyampingkan penggunaan kekerasan. Lihat, Jajang Jahroni, "Defending the Majesty of Islam: Indonesia's Front Pembela Islam (FPI) 1998-2003," *Studia Islamika*, 11, No. 2 (2003): 197-255.

⁶⁸ Ia dikenal sebagai bagian dari kaum Islamis yang menyerukan penerapan Syariah di Indonesia. Ia sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan Amerika dan gagasan-gagasan Islam liberal. Lihat, Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (UK: Princeton University Press, 2000), hal. 109-110.

⁶⁹ Ia belakangan dikenal sebagai pengkritik keras gagasan-gagasan Islam liberal yang diusung oleh Jaringan Islam Liberal (JIL).

oleh masyarakat dengan beragam usia, kelas ekonomi, profesi, dan level pendidikan. Daerah peredarannya tidak hanya terbatas di Jawa, apalagi Jakarta, tetapi juga di luar Jawa. Survey Nielsen Media Research Indonesia berikut, misalnya, menjelaskan segmen pembaca *Sabili* di tahun 2006-2007.⁷⁰

⁷⁰ <http://pasangiklansabili.blogspot.com/search/label/profile%20pembaca>, 18 Desember 2010.

Profil Pembaca Majalah *Sabili*

A. Jenis kelamin:

Pembaca Pria	: (59 %)
Pembaca Wanita	: (41 %)

B. Usia:

Remaja usia 15-34 th.	: (87 %)
Dewasa usia 35-39 th.	: (5 %)
Dewasa usia 39 th	: (8 %)

C. Pekerjaan:

Pegawai / professional	: (35 %)
Pelajar/mahasiswa	: (20 %)
Ibu rumah tangga	: (10 %)
Pegawai biasa	: (15 %)
Pensiunan	: (13 %)
Wiraswasta	: (5 %)

D. Pendidikan:

SLA	: (40 %)
Universitas/Akademi	: (29 %)
SLP	: (20 %)

E. Wilayah Distribusi:

DKI Jakarta & BOTABEK	: (50 %)
Jawa Barat	: (11 %)
Jawa Tengah	: (7 %)
Jawa Timur	: (6 %)
Sumatera	: (16 %)
Kalimantan	: (4 %)
Sulawesi	: (4 %)
Bali, Nusa Tenggara	: (1 %)
Maluku Irian Jaya	: (1 %)
Luar negeri	: (1 %)

Survey di atas menunjukkan bahwa majalah *Sabili* dibaca oleh banyak orang dari beragam kelompok masyarakat. Hanya saja, Survey juga menunjukkan bahwa majalah *Sabili* lebih populer di kalangan remaja, profesional, dan

siswa/mahasiswa muslim. Usia mereka sekitar 15-34 tahun dan mengecap pendidikan sekolah menengah atau universitas. Sebaliknya, pembaca *Sabili* dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan usia 35 tahun ke atas relatif sedikit. Selanjutnya, pembaca *Sabili* umumnya berasal dari kota besar, yaitu JABOTABEK (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi) dengan 50% pembaca, sedangkan pembaca dari luar Jawa hanya sekita 1-4%, kecuali Sumatera (16%).

Hanya saja, survey di atas belum menunjukkan organisasi massa atau model Islam, tempat pembaca *Sabili* beratribusi: sekuleris, moderat atau radikal/fundamentalis. Dari sisi latar pembaca (usia, profesi, dan pendidikan), memang ada kesamaan antara pembaca *Sabili* dan kelompok atau organisasi massa Islam yang biasa dikategorikan radikal/fundamentais, seperti Gerakan Tarbiyah (yang selanjutnya bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).⁷¹ Tentu saja, kesamaan ini hanya bisa dijadikan sebuah indikator bagi model Islam yang direpresentasikan oleh majalah *Sabili* dan dianut oleh pembaca *Sabili*, sehingga perlu diteliti lagi lebih menyeluruh.

Kekhasan dan keunikan *Sabili*, baik format maupun isi, pada akhirnya pernah mengantarkannya sebagai majalah Islam paling populer. Pada tahun 1993, tiras majalah *Sabili* mencapai 60.000 eksemplar setiap edisinya. Setelah rezim Orde Baru tumbang, oplah *Sabili* terus berkisar antara 70.000 dan 80.000. Bahkan, menurut survey pembaca yang diadakan oleh AC Nielsen Indonesia

⁷¹ Lihat, Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2003).

tahun 2000-2002, *Sabili* menduduki rangking dua dari sepuluh majalah terpopuler di Indonesia. Prestasi ini tentu sangat bermakna bagi majalah yang mengandalkan pendanaannya dari sirkulasi, bukan iklan, seperti majalah *Sabili*. Sebagaimana dituturkan oleh pemimpin redaksinya, S Rivai Hutapea, dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa pemasukan majalah *Sabili* dari iklan sangat kecil karena tidak lebih dari 10%.⁷²

Hanya saja, belakangan pamor *Sabili* tampaknya tidak seterang sebelum dan awal-awal era Reformasi. Bila pada awal tahun 2000-an tiras *Sabili* bisa menembus hampir setengah juta (menurut survey AC Nielsen di atas, persisnya 476.000) eksemplar,⁷³ maka belakangan tirasnya hanya berkisar di angka 40.000-an.⁷⁴ Angka ini, bila dibandingkan dengan oplah koran atau majalah Islam lain, memang masih terbilang besar. Namun, bila melihat perkembangan dan prestasi *Sabili* sebelumnya, angka ini jelas menunjukkan bahwa *Sabili* mengalami penurunan tiras secara tajam. Bila meroketnya *Sabili* sebelumnya disebabkan oleh keunikannya, baik bentuk maupun ini, pertanyaannya di sini adalah apakah tiras yang menurun ini akibat dari ketidakkonsistenan *Sabili* dalam menjaga keunikannya. Bila *Sabili* masih konsisten dalam keunikannya ini, apakah penurunan itu harus dibaca sebagai adanya perubahan di pihak pembaca. Bila hal terakhir ini yang terjadi, lantas apakah ini bermakna bahwa Islam yang direpresentasikan *Sabili* pada dasarnya tidak bisa membuktikan sebagai dapat dibumikan dan dirasakan kebaikannya oleh masyarakat. Beragam pertanyaan ini,

⁷² S. Rivai Hutapea, *Wawancara*, 16 Nopember 2010.

⁷³ *Sabili* No. 11 TH. XII 17 Desember 2004/5 Dzul Qa'dah 1425, hal. 57.

⁷⁴ S. Rivai Hutapea, *Wawancara*, 16 Nopember 2010.

terutama yang terkait dengan konsistensi pemberitaan *Sabili* dalam merepresentasikan Islam karena inilah yang menjadi fokus penelitian, tentu saja, menarik untuk dicari jawabannya.

BAB V

ISLAM DALAM MAJALAH *SABILI*

Bab ini akan mendiskusikan dan menganalisis wajah Islam dalam pemberitaan majalah *Sabili*. Bila Islam didefinisikan sebagai sebuah “wahyu” atau “ajaran Tuhan” yang diturunkan kepada nabi Muhammad untuk kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat,⁷⁵ maka bagaimana wahyu atau ajaran ini dipahami dan berusaha ditebarkan oleh majalah *Sabili*; model Islam seperti apa yang ingin dihadirkan olehnya; mengapa ia memilih model Islam seperti itu; dan apa argumen yang dibangunnya.

Hanya saja, mengingat Islam mencakup banyak aspek kehidupan,⁷⁶ maka pembahasan tentang wajah Islam dalam majalah *Sabili* ini akan dibatasi pada lima isu yang bisa merefleksikan kesadaran yang tinggi para pengelola dan pembaca *Sabili* tentang politik atau, lebih tepatnya, penerapan Islam di ruang publik. Kelima isu dimaksud adalah negara, non muslim (Barat), kelompok minoritas, perempuan, dan moralitas masyarakat. Sepintas, kelima isu ini hanya memiliki dimensi sosial atau praksis Islam, tetapi sebenarnya kelimanya tidak terlepas dari dimensi keyakinan Islam, apalagi dimensi Islam yang praksis ini

⁷⁵ Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *al-Fiqh al-Islāmī fī Ṣaubih al-Jadīd* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1968, hal. 30. Lihat pula, Muḥammad Sāfiq Gharbāl, *al-Mausū‘ah al-‘Arabīyah al-Muyassarrah*, jilid I (Beirūt: Ihyā’ al-Ṭurās al-‘Arabī, 1960), hal. 154-155.

⁷⁶ Islam, sebagai agama (al-dīn), dapat diidentikkan dengan syariat yang merupakan kumpulan perintah, hukum, keyakinan, dan praktik yang diharuskan Islam untuk diaplikasikan demi mewujudkan tujuan-tujuan reformasinya di masyarakat. Lihat, Andy Darmawan, dkk., *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), hal. 3.

belum secara formal mendapat ruang implementasinya dan baru “diperjuangan” dan “diwacanakan” untuk diakui secara legal-formal.

A. Islam dan Negara

Islam, bagi *Sabili*, adalah agama dengan serangkaian tuntunan bagi manusia demi kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Ia tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama dan dunia sekitarnya. Bahkan Islam adalah satu-satunya sistem yang betul-betul sesuai (*compatible*) untuk mengatur urusan dunia Islam dan seluruh umat manusia. Pendek kata, Islam, dalam pandangan *Sabili*, adalah sebuah sistem yang komprehensif, meliputi totalitas kehidupan. Islam itu akidah, syariah, dan politik. Islam itu dunia dan akhirat.

Sebagai agama yang mengatur pelbagai kehidupan dan penghidupan manusia, maka nilai-nilai dasar dan norma-norma asasi Islam itu, dalam pandangan *Sabili*, memberi pedoman dasar mengenai beragam kegiatan manusia. Dengan demikian, sistem Islami, bagi *Sabili*, adalah sistem (politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain) yang berdasarkan syariah Islam. Ini dapat dilihat antara lain pada label-label “Islam” yang digunakan *Sabili* dalam *headlinenya*, seperti *Pilih Islam atau Kita Jadi Pecundang*⁷⁷ dan *Kader Partai Islam Diteror*.⁷⁸

⁷⁷ Lihat, *Sabili* No. 24 TH. VI 16 Juni 1999/2 Rabi’ul Awwal 1420.

⁷⁸ Lihat, *Sabili* No. 19 TH. XI 9 April 2004/19 Shafar 1425.

Ajaran Islam ini, bagi *Sabili*, tidak bisa dibandingkan dengan ajaran atau ideologi-ideologi lain. Islam terlalu tinggi untuk bisa dibandingkan dengan ajaran atau ideologi lain. Membandingkan komunisme dengan Islam, misalnya, dipandanginya sebagai sama artinya dengan membandingkan manusia dengan Tuhan yang menciptakannya. Islam berbasiskan wahyu, sedangkan komunisme hanyalah temuan pikiran manusia yang sangat terbatas. Ajaran Islam mengandung apa yang disebut dengan konsep *rabbānīyah*. Segalanya berorientasi kepada Allah. Seluruh ajarannya bersandar pada konsep ketuhanan.⁷⁹

Keyakinan dasar *Sabili* ini, paling tidak, menyebabkan pemberitaan *Sabili* memiliki dua ciri penting, yang bisa jadi membuatnya berbeda dari media-media Islam lainnya. Pertama, kesadaran politik *Sabili* sangat tinggi. Bahkan, dalam konteks ini, bisa dikatakan bahwa tiada berita dalam setiap edisi *Sabili* yang tanpa ulasan politik, lokal dan internasional. “Berpolitik atau *melek* politik sama pentingnya dengan shalat dan puasa,” inilah kira-kira alasan *Sabili*. Ahmad Hatta, misalnya, pernah menulis artikel berjudul “Muslim Wajib Berpolitik” dalam rubrik *Tadabbur*. Baginya, berp politik dan memaksimalkan peran politik adalah merupakan kegiatan suci dalam beribadah kepada Allah. Ia pun menukil pernyataan Imam al-Ghazali dalam *Ihyā’ Ulūm al-Dīn*.⁸⁰

Dunia adalah ladang akhirat. Agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Kekuasaan dan agama adalah kembaran. Agama adalah tiang, penguasa adalah penjaga. Bangunan tanpa tiang akan rubuh, dan apa yang tidak dijaga akan hilang. Keteraturan dan kedisiplinan tidak akan terwujud kecuali dengan penguasa.”

⁷⁹ *Sabili* No. 22 TH. VII 19 April 2000/14 Muharram 1421, hal. 28-29.

⁸⁰ *Sabili* No. 06 TH. XI 9 Oktober 2003/13 Syaban 1424, hal. 70-1.

Islam, sebagai sebuah agama yang penuh dengan nilai-nilai keruhanian, di mata *Sabili*, tidak terlepas dari politik. Nilai-nilai Islam, menurutnya, sangat perlu diberi peran dalam soal pemerintahan dan kepemimpinan. Oleh karena itu, umat Islam harus membangun wawasan tentang misi dan visi politik Islam. Ini, dalam pandangan *Sabili*, merupakan hal yang fundamental. Jika visi dan misi tidak jelas, maka yang akan muncul bukanlah politik Islam, melainkan Islam politik. Artinya, Islam akan dipolitisir untuk kepentingan politik tertentu, dan yang berlangsung bukanlah mengislamkan politik, melainkan mempolitikkan Islam.⁸¹

Di sini, *Sabili* menolak apa yang disebut sebagai desakralisasi politik yang dipandanginya sebagai bagian dari teologi sekular. Sekularisasi dalam politik bermakna bahwa dalam masyarakat, tidak seorang pun berhak memerintah atas otoritas “hak Tuhan.” Jika ini diikuti, maka menurut *Sabili*, kenyataan ideologis bahwa politik perlu diisi dengan nilai-nilai keislaman akan tersingkir, institusionalisasi agama akan dipinggirkan, dan fungsi agama akan diminimalisir. Selain merenggangkan hubungan agama dan politik, desakralisasi politik dianggap *Sabili* bukan jaminan bagi keamanan dan kebahagiaan masyarakat, karena ideologi politik sekular bisa saja mendorong berbagai tindakan yang semena-mena, sebagaimana peristiwa agresi Amerika (Barat) terhadap Iraq.⁸²

⁸¹ *Sabili* No. 26 TH. XI 16 Juli 2004/28 Jumadil Awal 1425, hal. 103-4

⁸² *Sabili* No. 26 TH. XI 16 Juli 2004/28 Jumadil Awal 1425, hal. 102-3.

Kesadaran politik dimaksud adalah mengamati dunia berdasarkan sudut pandang akidah Islam.⁸³ Islam diyakini sebagai tidak memisahkan antara yang sakral dan profan atau antara agama dan negara, yang telah menentukan sifat Barat yang sekular sejak Zaman Pencerahan. Dengan kata lain, Islam itu selalu politis, yaitu memberikan pedoman pengaturan kehidupan manusia secara menyeluruh, sebagaimana yang dinyatakan oleh sabda nabi Muhammad, “*Siapa pun yang bangun pagi-pagi dengan memiliki perhatian kepada selain Allah, maka ia tidak memiliki urusan dengan Allah. Siapa pun yang bangun tanpa memperhatikan urusan kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka (kaum muslimin).*”⁸⁴

Hanya saja, ada perbedaan tekanan pemberitaan politik *Sabili* antara pra dan pasca reformasi. Bila sebelum reformasi *Sabili* lebih menekankan pemberitaan politik internasional dan sedikit sekali secara eksplisit menyinggung politik nasional, maka setelah reformasi *Sabili* memberikan ruang yang cukup besar kepada politik nasional. Bahkan, pemberitaan kedua ini dilakukannya secara vulgar. Bila bahasan utamanya sebelum reformasi antara lain adalah “Darah dan Air Mata di Bosnia”⁸⁵ dan “Bosnia Afghan Kedua,”⁸⁶ maka setelah reformasi bahasan utamanya antara lain adalah “TNI dan Aceh Tumbal Mega,”⁸⁷

⁸³ ‘Abd al-Qadīm Zalūm, *al-Ḥamlah al-Amīrikīyah li a-Qaḍā’I ‘alā al-Islām*, cet. I (London, Khilāfah Publication, 1996), hal. 1-2.

⁸⁴ Imam al-Ḥāfiẓ Abū Abdullāh al-Hākīm al-Syaibānī, *al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥain*, juz IV (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1978), hal. 320.

⁸⁵ *Sabili* No. 02 TH. V 6-19 September 1992.

⁸⁶ *Sabili* No. 04 TH. V 6-19 Oktober 1992.

⁸⁷ *Sabili* No. 24 TH. X 19 Juni 2003/18 Rabiul Akhir 1424.

“Belajarlah dari Kasus Sisdiknas, PDIP Partai Berbahaya,”⁸⁸ “Kader Partai Islam Diteror,”⁸⁹ dan “Pemilu Presiden Cacat, SBY atawa Golput.”⁹⁰

Ciri kedua adalah Sabili selalu mengajak "kembali ke Islam" atau "kembali ke al-Qur'an dan Sunnah Nabi" sebagai bagian niscaya bagi penyembuhan masyarakat dari berbagai problem yang dihadapinya. “Ketika berpolitik kita harus mengikuti syariah. Ketika berekonomi kita harus mengikuti syariah,” demikian kata Ihsan Tanjung setelah sebelumnya ia mengutip perkataan Sayyid Qutb bahwa inti pilar Islam itu ada tiga, yaitu akidah, ibadah, dan syariah.⁹¹

Kemiskinan, misalnya, dapat diatasi dengan penerapan ajaran zakat. Bagi *Sabili*, ajaran zakat ini, jika diimplementasikan, akan menjamin keadilan sosial, tanpa menghilangkan insting-insting manusia untuk memiliki kekayaan sebanyak mungkin yang menjadi sumber motivasi perjuangan hidupnya. Dengan demikian, Islam menjamin tatanan dunia yang penuh persaudaraan, kebahagiaan, dan keadilan. Perzinahan dan perselingkuhan juga dapat diminimalisir dengan ajaran poligami.⁹² “Tidak boleh lagi ada keraguan,” kata *Sabili* “bahwa Islam adalah satu-satunya jalan keluar bagi segala problematika yang menimpa umat ini, khususnya bangsa ini. Islam adalah saatu-satunya pandangan hidup yang dapat

⁸⁸ Sabili No. 25 TH. X 3 Juli 2003/3 Jumadil Awal 1424.

⁸⁹ Sabili No. 19 TH. XI 9 April 2004/19 Shafar 1425.

⁹⁰ Sabili No. 1 TH. XII 30 Juli 2004/12 Jumadil Akhir 1425.

⁹¹ Sabili No. 4 TH. XI 11 September 2003/14 Rajab 1424, hal. 98-99.

⁹² Ketika seorang penanya bertanya “haruskah ia berpoligami,” Miftah Faridl, pengisi rubrik “Menggapai Sakinah,” antara lain menjawab; “Kebolehan poligami juga sebagai salah satu solusi untuk menjauhi zina, menolong wanita yang jumlahnya lebih banyak daripada pria, menafkahi janda-janda yang memiliki anak-anak yatim dan sebagainya. Lihat, Sabili No. 19 TH. XI 9 April 2004/19 Shafar 1425, hal. 73.

menjelaskan hakikat keadilan di seluruh lapangan kehidupan: ibadah, sosial, budaya, ekonomi, dan politik.”⁹³

Akibat dari pandangan ini, *Sabili* mengkritik dan menolak pemikiran dan konsep apapun yang berasal dari Barat, seperti sekularisme, pluralisme, gender, materialisme, sosialisme, dan apalagi komunisme. Di sini, bisa dicontohkan pandangan *Sabili* tentang keadilan dalam ideologi kapitalisme. Menurutnya, keadilan yang ditawarkan oleh ideologi ini menemui jalan buntu. Hal ini karena keadilan, menurut kapitalisme, hanya dapat diwujudkan bila proses pemenuhan kebutuhan material secara seluas-luasnya dijamin oleh individu dan masyarakat, sehingga kebahagiaan dan peradaban manusia dapat terbina. Ideologi semacam ini, menurut *Sabili*, melupakan aspek rohani dan spiritual manusia sebagai makhluk Tuhan, yang juga menjadi unsur penting dalam kebahagiaan manusia. Inilah, bagi *Sabili*, alasan mengapa orang tetap butuh campur tangan wahyu (baca: Islam) untuk menjelaskan dan mengingatkan tentang makna keadilan, betapa pun tinggi upaya kreasi dan ijtihad manusia.⁹⁴

Model ideal Islam seperti ini adalah Islam pada masa Nabi dan *al-Khulafā' al-Rāsyidūn*. Pemikiran dan penafsiran Islam yang tidak sejalan dengan al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana yang dipraktikkan oleh *al-salaf al-ṣalih* tersebut, bagi *Sabili*, dapat dianggap sebagai sebuah penyimpangan, sehingga tidak bisa diterima. Kecenderungan kelompok ini untuk menjadikan masa kejayaan Islam dulu sebagai referensi ideal bagi penyelesaian berbagai problem

⁹³ Sabili No. 23 TH. X 5 Juni 2003/4 Rabiul Akhir 1424, hal. 75.

⁹⁴ Sabili No. 23 TH. X 5 Juni 2003/4 Rabiul Akhir 1424, hal. 74-75.

kontemporer, di samping seringnya mereka dalam perbincangannya menggunakan terma-terma seperti *sharī‘ah* (hukum Islam), *dustūr* (konstitusi), *ummah*, *jihād*, *silāh* (senjata), dan *sayf* (pedang) membuat "dakwah" kelompok mereka diberi label gerakan reaksioner, radikal atau fundamentalis.⁹⁵

Selanjutnya, sebagai sistem yang komprehensif, Islam pun dianggap *Sabili* telah memberikan kerangka dasar bagi dasar, hukum, dan fungsi negara. Negara merupakan pelaksana atau eksekutor berbagai pedoman yang telah disyariatkan Allah dan merupakan kepemimpinan umat manusia dalam kehidupannya. Dengan kedudukan seperti ini, otoritas negara (baca: pemimpin atau pemerintah) mempunyai tempat istimewa dalam mendapatkan loyalitas masyarakatnya. Bahkan, loyalitas kepada negara atau pemimpin ini, dalam pandangan al-Qur’an, ditempatkan setelah loyalitas kepada Allah dan rasul-Nya.⁹⁶ Melihat posisi strategis negara demikian, di mata *Sabili*, mustahil Islam tidak memberikan kerangka dasarnya.

Bagi *Sabili*, dasar negara Islam, bukan yang lain termasuk pancasila, seharusnya menjadi pilihan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, *Sabili* mendorong pemasukan tujuh kata (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) dalam Piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD 1945. Ironisnya, di sini *Sabili* masih mengamini istilah “negara” kebangsaan seperti

⁹⁵ Reaksioner mengacu pada tendensi untuk mengkonstruksi masa yang ada atau masa depan sesuai dengan model masa lalu yang terbukti handal; radikal menunjuk pada kecenderungan untuk mengganti apa yang dianggapnya ketinggalan zaman secara total; dan fundamentalis mengacu kepada keinginannya untuk kembali pada ajaran Islam fundamental: al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Lihat, Enver M. Khoury, *The Patterns of Mass Movements in Arab Revolutionary Progressive States* (Paris: Mouton, 1970), hal. 53-4.

⁹⁶ Lihat, QS. Al-Nisā’/4:59, “*Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu.*”

Indonesia, satu hal yang berbeda dengan kelompok Islam lain seperti HTI yang menolak negara kebangsaan.⁹⁷ Ini berarti bahwa *Sabili* lebih ingin memperjuangkan penerapan hukum Islam di Indonesia melalui negara daripada berusaha mendorong pendirian negara Islam.

Hukum yang mengatur kehidupan bernegara adalah hukum syariah (al-Qur'an dan Sunnah), bukan hukum positif. Penciptaan manusia dan segala aturannya di dunia, bagi *Sabili*, adalah satu paket. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan manusia dalam bernegara adalah melaksanakan syariah, bukan membuat undang-undang. Dengan kata lain, fungsi negara, menurut *Sabili*, adalah eksekutor, bukan legislator sebagaimana yang dikenal dalam sistem demokrasi. Berbeda dengan sistem demokrasi yang memberikan hak penetapan hukum berada di tangan rakyat yang diwakilkan kepada wakil-wakilnya di lembaga legislatif, Islam menyatakan bahwa penetapan hukum merupakan wewenang Allah. "*Keputusan (hukum) itu hanyalah kepunyaan Allah,*" tegas al-Qur'an.⁹⁸ Untuk penentuan hukum yang belum ada penjelasannya dalam al-Qur'an dan Sunnah, Islam mengenal mekanisme *syūrā*, tempat orang-orang yang mempunyai kapabilitas ketakwaan dan ilmu yang cukup (*ahl al-hill wa-al-'aqd*) bergabung untuk melakukan ijtihad.⁹⁹ Oleh karena itu, dapatlah dipahami

⁹⁷ Hizbut Tahrir (Indonesia) atau HTI menganggap konsep negara bangsa atau nation state adalah produk pemikiran Barat yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Baginya, sistem khilafahlah yang harus ditegakkan sebagai sistem pemerintahan yang islami. Lihat, *Sabili* No. 22 TH. VII 19 April 2000/14 Muharram 1421, hal. 72.

⁹⁸ Lihat, QS. Yūsuf/12:40.

⁹⁹ *Sabili* No. 19 TH. XI 9 April 2004/19 Shafar 1425, hal. 68.

mengapa *Sabili* menyambut dengan hangat, dengan beberapa catatan, peresmian Mahkamah Syariah di Aceh. Ia pun berkomentar:¹⁰⁰

“Wacana Mahkamah Syariah Aceh ini ditunggu banyak kalangan, agar benar-benar dimanfaatkan untuk membuktikan bahwa formalisasi syariat Islam di Nusantara ini bukan isapan jembol dan bahwa syariat Islam benar-benar bisa menjawab problematika masyarakat. Kita doakan saja!”

Melihat fungsi negara yang cukup penting bagi terjaminnya pelaksanaan syariat Islam ini, maka *ghīrah* politik *Sabili*, dalam arti kekuasaan dan signifikansi penguasaannya, pun sangat tinggi. Ia menyadari bahwa sistem politik (baca: demokrasi) jelas tidak dikenal dalam Islam. Namun, menurutnya, umat Islam tidak boleh mengabaikan apa yang disebutnya sebagai “*fiqh al-wāqī*” (fikih realitas). Karena realitas politik Indonesia menyaratkan keikutsertaan dalam pemilu untuk dapat berkuasa, maka *Sabili* mendorong agar umat Islam ikut serta dalam pemilu. “Sejumlah fakta kekinian mengharuskan kita ikut pemilu,” tulisnya.¹⁰¹

Realitas politik yang dimaksud *Sabili* antara lain adalah bahwa sistem demokrasi membuka peluang bagi siapa pun termasuk penjahat, orang kafir, sekular atau penjahat untuk berkuasa. Jika ini dibiarkan, orang-orang seperti itulah yang akan memegang kendali kekuasaan, sedangkan umat Islam yang memiliki komitmen dengan syariat Islam tetap akan terpinggirkan atau bahkan menjadi korban. Apalagi, fakta lain menunjukkan bahwa secara kuantitas jumlah masyarakat non muslim semakin meningkat. Bila partai sekular dan masyarakat terakhir ini yang berkuasa, sikap mereka sudah bisa diprediksi, yaitu memusuhi

¹⁰⁰ *Sabili* No. 18 TH. X 27 Maret 2003/24 Muharram 1424, hal. 105

¹⁰¹ *Sabili* No. 19 TH. XI 9 April 2004/19 Shafar 1425, hal. 66.

Islam dan umat Islam. Selain itu, undang-undang dan kebijakan politik yang mereka buat akan merugikan umat Islam. Mereka tidak mungkin membuat aturan yang sesuai dengan syariat Islam.

Oleh karena itu, ikut serta dalam pemilu, bagi *Sabili*, sama sekali tidak bermakna bahwa umat Islam setuju dengan sistem sekular atau demokrasi. Keikutsertaan ini harus dimaknai sebagai strategi untuk mengubah semua produk hukum yang ada di berbagai negara, termasuk Indonesia, demi meratakan jalan bagi terwujudnya khilafah Islamiyah, dan perubahan itu akan sulit terwujud bila umat Islam tidak ikut berjuang memasukkan wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Inilah nilai positif ikut serta dalam pemilu.¹⁰²

Kekuasaan, dalam pandangan *Sabili*, adalah salah satu media dakwah. Melalui media kekuasaan ini, dakwah Islam diyakininya lebih efektif. Ia menunjukkan data statistik hasil dakwah Rasulullah antara periode Mekah dan periode Madinah. Dakwah periode Mekah, saat Rasulullah tanpa kuasa, yang berlangsung sekitar 13 tahun hanya menghasilkan sekitar 200 orang, sedangkan dakwah periode Madinah, saat Rasulullah “berkuasa,” mampu merekrut jumlah pengikut yang lebih besar. Hanya dalam waktu 10 tahun, Rasulullah berhasil membawa 10.000 pasukannya untuk menguasai Mekah kembali. Bahkan, ketika kota ini dikuasai, seketika sekitar 2000 orang menyatakan masuk Islam.

Dalam kerangka dakwah Islam, kekuasaan dipandang *Sabili* begitu penting. Menurutnya, Islam terkadang tidak bisa diterima dengan kebenaran, tetapi harus melalui kekuasaan. Kekuasaan yang ada tidak digunakan untuk

¹⁰² *Sabili* No. 19 TH. XI 9 April 2004/19 Shafar 1425, hal. 69.

merampas hak asasi manusia dalam beragama, tetapi untuk menyingkirkan penghalang dakwah Islam. Di sini, Sabili mengutip sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim berikut sebagai acuan tentang berdakwah melalui penggunaan kekuasaan:¹⁰³

“Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi tiada tuhan kecuali Allah dan aku utusan Allah, menegakkan shalat, dan membayar zakat. Jika mereka melakukannya, maka darah dan harta mereka mendapat perlindunganku, kecuali dengan hak Islam, sedangkan hisabnya terserah Allah.

Selain komprehensif, ajaran Islam, bagi *Sabili*, juga berlaku di semua tempat dan waktu, *Ṣāliḥ li kulli zamān wa-makān*. Oleh karena itu, *Sabili* memiliki obsesi keberlakuan Islam yang tidak hanya berhenti pada batas teritorial Indonesia, tetapi melintas dan bahkan menembus ke seluruh dunia. Bersatunya bangsa Indonesia dan "umat" Islam lainnya dalam bingkai al-Quran dan Sunnah adalah obsesinya. Inilah yang membuat *Sabili* disebut sebagai berorientasi transnasional.¹⁰⁴

B. Islam dan non Muslim (Barat)

Hubungan antara Islam dan non muslim (Barat) telah mengalami dua fase yang sangat kontradiktif. Pada fase pertama, hubungan itu berlangsung saat Islam atau, lebih tepatnya, dunia Islam berada dalam kemajuan pada abad ke-8, sedangkan Barat sedang mengalami era yang disebut dengan *the dark age*.

¹⁰³ Sabili No. 24 TH. X 19 Juni 2003/18 Rabiul Akhir 1424, hal. 12-3.

¹⁰⁴ Persatuan dunia dalam bingkai Islam ini, bagi *Sabili*, harus dipimpin oleh orang Islam. Menurutnya, “umat Islam tidak boleh menyerahkan nasibnya pada orang lain meski pada orang nomor satu di negara ini.” Lihat Sabili No. 4 TH. IX 15 Agustus 2001/25 Jumadil Awal 1422, hal. 72.

Sebaliknya, pada fase kedua, hubungan itu berlangsung saat dunia muslim dalam kemunduran atau tertinggal dan, di berbagai belahan dunia, menjadi wilayah jajahan Barat. Fase kedua ini bermula dari masa renaissance (abad ke-16) sampai sekarang.¹⁰⁵

Hubungan dua pihak ini pun penuh dengan ketegangan dan kecurigaan. Satu pihak sadar atas ketertinggalannya, tetapi ia pernah mengalami masa keemasan, dan pihak lain memiliki peradaban material yang mempesona, tetapi pada saat yang sama juga menjadi penjajah sehingga mengaburkan pesonanya dan memiliki berbagai kekurangan dalam peradaban immaterialnya.

Oleh karena itu, meskipun sadar atas --memimjam istilah Sabili-- perasaan minder atau inferioritasnya berhadapan dengan Barat, umat Islam pun mencari cara untuk melakukan semacam *self defence mechanism* (mekanisme pertahanan diri). “Kita bukan anti Barat.” tulis Sabili “Kita punya spirit dialogis ‘*al-ḥikmah ḍāllah al-mukmin, annā wajadahā fahuwa aḥaqqu bihā.*’ Hikmah, yang berarti ilmu, kebijaksanaan, pengetahuan, dan nilai adalah harta karun umat Islam yang tercecer, yang harus ia rebut.”¹⁰⁶

Salah satunya adalah dengan terus-menerus melakukan kritik terhadap ajaran agama lain, yang *notabene* dianut oleh mayoritas masyarakat Barat, dan menyebutnya sebagai agama sesat dan menyesatkan serta membandingkannya dengan ajaran Islam yang, dianggapnya agama yang benar. Tentang Trinitas,

¹⁰⁵ W.A.R. Shadid, *Religious Freedom and the Position of Islam in Western Europe: Opportunities and Obstacles in the Acquisition of Equal Right, with an extensive bibliography* (Den Haag: Kok Pharos Publishing House, 1995), hal. 7.

¹⁰⁶ Sabili No. 23 TH. X 5 Juni 2003/4 Rabiul Akhir 1424, hal. 112.

misalnya, *Sabili* mengatakan bahwa umat Kristiani telah meyakini sesuatu yang pada dasarnya tidak diajarkan, bahkan, oleh kitab suci mereka. Ia mengutip pernyataan Dr. G.C. Van Niftrik, teolog asal Belanda, bahwa di dalam Alkitab tidak ditemukan suatu istilah yang dapat diterjemahkan dengan kata “Tritunggal” ataupun ayat tertentu yang mengandung dogma tersebut. Doktrin Trinitas ini, menurut *Sabili*, hanya didukung oleh Kitab Yohanes pasal 5 ayat 7: “Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga; Bapa, Firman, dan Roh Kudus; dan ketiganya adalah satu.” *Sabili* pun menyebut bahwa doktrin ini dianggap palsu oleh *The Holy Bible New International Version*.¹⁰⁷

Sebagai majalah yang bertekad menyuarakan aspirasi umat Islam, majalah *Sabili* pun tidak lepas dari kerangka ini. Ia memiliki rubrik khusus, Bimbingan Tauhid, tempat ia mengkritisi agama lain dan membandingkannya dengan Islam, sebagai agama yang benar. Dalam rubrik ini, sering dimuat berita-berita yang bernada memojokkan Islam. *Blog Gengster Penghujat Islam*,¹⁰⁸ *Kekafiran Doktrin Kristen*,¹⁰⁹ dan *Apologi Kontradiksi Pendeta*¹¹⁰ adalah beberapa contoh judul yang bisa disebut di sini.

Dalam konteks ini, agama Yahudi dan Nasrani dianggap *Sabili* merupakan musuh besar yang selalu berupaya menghancurkan Islam. Bunyi ayat berikut “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: ‘Sesungguhnya petunjuk

¹⁰⁷ *Sabili* No. 24 TH. X 19 Juni 2003/18 Rabiul Akhir 1424, hal. 84.

¹⁰⁸ Lihat, *Sabili*, No. 14 Tahun XVII, 4 Pebruari 2010/1431, hal. 106.

¹⁰⁹ Lihat, *Sabili*, No. 5 Tahun XVIII, 14 Oktober 2010/1431, hal. 60.

¹¹⁰ Lihat, *Sabili*, No. 19 Tahun XI, 9 April 2004/1425, hal. 82.

*Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya). 'Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu,'*¹¹¹ menjadi salah satu dasar dari anggapan tersebut. Dasar *naş* lainnya adalah “*Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik.*”¹¹²

Selain berdasar ayat, *Sabili* juga mengemukakan bukti-bukti historis tentang keinginan Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan Islam. Pada saat perang Ahzab sedang berlangsung, sebagian orang-orang Yahudi menjadi mata-mata orang-orang Arab, sehingga setelah perang berakhir, Nabi menangkap mereka untuk dihukum. Karena kesombongannya, mereka sulit menerima kepemimpinan orang Arab seperti Nabi Muhammad Saw. Mereka berpendapat bahwa orang-orang Arab, terutama suku Quraisy, hanyalah keturunan seorang budak, yaitu Hajar yang cantik (istri Nabi Ibrahim).

Hal yang tidak jauh berbeda juga dialamatkan *Sabili* kepada agama atau para pemeluk Kristen. Apalagi, agama ini dikenal sebagai agama misionaris, dalam arti agama yang mewajibkan para pemeluknya untuk menyebarkan agamanya. Bagi *Sabili*, orang Kristen itu sama dengan orang Yahudi yang tidak memiliki i'tikad baik terhadap orang Islam. Dasar teks yang mereka rujuk antara lain adalah “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka*

¹¹¹ Lihat, QS. al-Baqarah/2: 120.

¹¹² Lihat, QS. al-Mā'idah/5:82.

*adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”*¹¹³

Selanjutnya, Amerika dan sekutunya serta Israel dilukiskan *Sabili* sebagai penjelmaan dari musuh besar Islam ini. Berbagai konflik dan ketidakstabilan di dunia muslim pun diyakini bagian dari rekayasa besar Yahudi dan Nasrani untuk melemahkan umat Islam dan menghancurkan Islam. Demikian pula dengan pendudukan Palestina oleh Israel, serangan Amerika ke Iraq dan Afganistan, dan campur tangan Barat dalam konflik dan perang saudara di Sudan. Ini dianggap *Sabili* sebagai konspirasi non muslim (Barat) terhadap Islam. Apalagi, dalam hal terakhir ini Barat (Amerika dan sekutunya) memberikan dukungan penuh terhadap Israel, musuh bersama mayoritas negara Arab-Islam.

Di sini, agresi Amerika terhadap Irak bisa menjadi contoh. Menurut *Sabili*, dalih Amerika menyerang Irak sangat dipaksakan, dari memburu senjata pemusnah massal sampai membebaskan rakyat Irak dari rezim otoriter Saddam Husein. *Sabili* pun menghubungkan Amerika dan sekutunya dengan “kaum kuffār,” “musuh-musuh Islam,” dan Israel. “Dunia, khususnya dunia Islam terus dikangkangi kaum kuffar ... Apapun yang dilakukan oleh AS dan sekutunya, kita hanya bisa protes ... Amerika tetap saja berjalan dengan agendanya,” kata *Sabili*. Bagi *Sabili*, pada dasarnya tidak ada perang di Irak. Yang ada adalah umat Islam Irak diperangi oleh musuh-musuh yang ingin menguasai negara mereka. Dalam

¹¹³ Lihat al-Qur’an, Surah al-Ma’idah/5:51.

konteks ini, Israel diyakini *Sabili* berkepentingan menenyapkan Irak, yang memiliki banyak peninggalan sejarah Islam. Tentang agenda Israel dalam agresi Amerika dan sekutunya terhadap Irak ini, *Sabili* menulis lebih lanjut:¹¹⁴

“Israel sangat berkepentingan untuk menghilangkan identitas dan nilai-nilai sejarah peradaban kaum muslimin. Jika identitas yang merupakan kebanggaan umat itu lenyap, kaum muslimin tak lagi punya bukti-bukti sejarah. Kalau demikian, ke depannya Israel dengan mudah mengklaim sesuatu lantaran jejak dan bukti-bukti otentik telah lenyap. Tujuan lainnya, agar generasi Islam tak mengenal sejarah dan kejayaan masa lalunya. *The Glory of the past* kaum muslimin hendak dilenyapkan.”

Simbolisme muatualisme antara Amerika dan Israel, di mata *Sabili*, tidak hanya didorong oleh kalkulasi politik. Dalam ideologi, mereka juga bersatu menjadikan Islam dan muslim sebagai musuh-musuh mereka. *Sabili* mendasarkan kesimpulannya ini pada pernyataan Don Wagner, profesor ilmu agama dan Direktur Pusat Studi Timur Tengah di North Park University, bahwa di Amerika terdapat banyak orang, yang disebutnya sebagai “Kristen Zionis,” yang menerjemahkan Kitab Kejadian 12:3-96 sebagai keharusan memberikan dukungan kepada Zionisme. “Mereka menginterpretasikan hal ini bahwa setiap individu atau negara yang mendukung Israel akan diberkati Tuhan. Ia artinya memberikan dukungan politik, ekonomi, dan moral kepada Israel tanpa kritik,” kata Wagner.¹¹⁵

Pelabelan “teroris” yang kerap kali diberikan media Barat kepada Islam dan umat Islam juga dianggap *Sabili* merupakan bagian dari niat buruk Barat untuk menenyapkan Islam dari muka bumi. Dengan label itu, Barat merasa berhak

¹¹⁴ *Sabili* No. 21 TH. X 8 Mei 2003/6 Rabiul Awal 1424, hal. 14-15.

¹¹⁵ *Sabili* No. 24 TH. X 19 Juni 2003/18 Rabiul Akhir 1424, hal. 45.

dan absah untuk mengadakan serangan ke dunia Islam, tanpa pernah merasa khawatir dituduh “agresor.” Dalam rubrik Islaminya, *Sabili* menceritakan adanya seorang penginjil yang menyebut bahwa al-Qur’an dan ajaran Islam penuh dengan kebencian. “Di sini, di dalam al-Qur’an, terdapat kata-kata ‘bunuh mereka,’ ‘bunuh orang-orang kafir itu,” ujar sang penginjil seperti dikutip *Sabili*. Berbagai peristiwa sejenis kemudian disimpulkan *Sabili* dengan tinta tebal, “Mereka (zionis Kristen di Amerika) bersatu memusuhi Islam.”¹¹⁶

Pendefinisian teroris dan bukan teroris terasa kental dengan kepentingan Barat. Apalagi, dapat diamati dan dicari sumber otentiknya, bahwa dalam kepercayaan, agama, dan masyarakat apa pun, ada teroris. Dengan kata lain, fenomena teroris dalam Islam itu bukan tipikalnya, melainkan lazim ditemukan agama apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kasus penahanan Abu Bakar Ba’asyir oleh aparat kepolisian Indonesia tahun 2002 karena dianggap terlibat dalam peristiwa bom Bali, misalnya, dianggap *Sabili* sebagai bagian dari upaya “iblis” Amerika (Barat) dan Zionis Israel untuk menghancurkan dakwah Islam di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.¹¹⁷

Hanya saja, *Sabili* yakin dengan ketahanan umat Islam dalam menerima serangan gencar dari musuh-musuhnya ini. Di samping karena diyakini adanya campur tangan “pertolongan Allah,” ketahanan umat Islam ini telah terbukti dalam sejarah ketika Perang Salib. Oleh karena itu, musuh-musuh Islam pun

¹¹⁶ *Sabili* No. 24 TH. X 19 Juni 2003/18 Rabiul Akhir 1424, hal. 42-3.

¹¹⁷ *Sabili* No. 09 TH. X 14 Nopember 2002/9 Ramadhan 1423, hal. 8-11.

beralih dari perang fisik kepada perang non fisik atau, yang lebih populer, dikenal dengan *ghazw al-fikr* (perang pemikiran).

Kesan adanya sentimen anti Barat dalam majalah *Sabili* memang cukup kuat. “Barat = Amerika + sekutunya; Amerika + sekutunya = Kristen + Yahudi; dan Kristen + Yahudi = musuh umat Islam,” demikian agaknya yang bisa dibaca dari majalah *Sabili* yang, berdasarkan survey AC Nielsen 2000-2003 sebagaimana telah disinggung dalam bab IV, mendapat sambutan yang baik dari pembaca. Judul-judul berita dalam *Sabili*, seperti “Antara Salib dan Bintang David,”¹¹⁸ “Robohkan Tembok Setan Israel,”¹¹⁹ dan “Mereka Bersatu Melecehkan Islam,”¹²⁰ bisa menjadi salah satu bukti yang mengukuhkan kesan yang, oleh Maufur, dapat dikategorikan sebagai *xenophobia Sabili*.¹²¹

Namun, tidaklah mengada-ada bila dikatakan bahwa kesan *xenophobia Sabili* ini disebabkan atau merupakan akibat dari, paling tidak, dua hal. Pertama, pengalaman sosio-historis traumatik. Kontak Islam dengan Barat, terutama di era modern, tidak pernah lepas dari konflik. Selain oleh Perang Salib, kontak keduanya juga ditandai oleh kedudukan Barat sebagai penjajah dan dunia Islam sebagai daerah jajahan. Bahkan, kontak yang terakhir ini telah menyebabkan khilafah Islamiyah runtuh. Negara bangsa yang menggantikannya, di mata orang

¹¹⁸ *Sabili* No. 24 TH. VI 16 Juni 1999/2 Rabiul Awal 1420, hal. 56.

¹¹⁹ *Sabili* No. 1 TH. XII 30 Juli 2004/12 Jumadil Akhir 1425, hal. 43.

¹²⁰ *Sabili* No. 17 TH. XIII 9 Maret 2006/9 Shafar 1427, hal. 46.

¹²¹ Maufur, *Winning the Public Mind: A Study of the Sabili's Xenophobic Discourse and its Impact upon the Readers*. http://www.crcs.ugm.ac.id/news.php?news_id=76, 17 Desember 2010.

Islam, menjadi saksi sejarah atas keinginan penjajah (baca: Barat) untuk memperlumah kekuatan umat Islam. Kontak yang sarat konflik pada akhirnya melahirkan sifat “tidak selalu percaya” dan “curiga” di pihak umat Islam terhadap Barat. Apalagi, setelah era perang dingin, mengikuti pemikiran “clash of civilization” Samuel Huntington, umat Islam seolah-olah menjadi musuh bersama Barat.

Hal kedua yang tidak kalah dalam memberikan andil bagi *xenophobia Sabili* adalah potret Islam di media-media Barat. Tidaklah sulit diamati bahwa media-media Barat melukiskan Islam dan umat Islam sebagai agama dan komunitas beragama yang akrab dengan keterbelakangan, kekerasan, penindasan terhadap perempuan, dan ketidakdemokratisan. Insiden kekerasan yang dilakukan seorang individu atau sebuah gerakan ekstrim di negara-negara Islam acapkali diatribusikan kepada Islam oleh media Barat. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa terorisme selalu dihubungkan dengan Islam.¹²²

Islam dan umat Islam, dalam media Barat, akhirnya selalu tampil dengan potret buram. Mereka muncul di media Barat sebagai teroris, bodoh, suka main perempuan, dan anti demokrasi. Sebaliknya, Barat dimunculkan sebagai penebar kedamaian, pintar, pejuang hak-hak perempuan, dan demokratis.¹²³ Judul-judul seperti “Muslim’s Silence about Radical Islam,”¹²⁴ “Women and Radical

¹²² D. L. Altheide, *Consuming terrorism. Symbolic Interaction*, 2004. 289-308.

¹²³ S. Akbarzadeh, dan B Smith. *The representation of Islam and Muslims in the media*, (Sydney: Monash University Press, 2005).

¹²⁴ <http://www.discoverthenetworks.org/viewSubCategory.asp?id=100>, 5 Nopember 2010.

Islam,¹²⁵ “Islam’s Hatred of Woman’s Laugh,”¹²⁶ “The Real Roots of Islamic Extremism,”¹²⁷ dan “Islamists and the Relentless Drive for Power”¹²⁸ adalah tulisan tentang Islam dan umat Islam yang seringkali muncul di media Barat.

Akibat dari perkembangan pesat teknologi di Barat, pandangan negatif tentang Islam dan umat Islam di media ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, dan ini pada gilirannya berpengaruh terhadap segala kebijakan politik negara dan masyarakat Barat, terutama yang terkait dengan masyarakat muslim. Edward Said, dalam bukunya *Covering Islam*, mengamini fenomena ini dengan menyatakan bahwa berita dan interpretasi media tentang Islam sangat berpengaruh, dan kesuksesan berita lebih dapat diatribusikan kepada pengaruh politik orang-orang dan institusi-institusi yang melahirkannya, daripada kebenaran dan akurasi.¹²⁹

Potret negatif tentang Islam dan umat Islam yang terus-menerus ini akhirnya membuat banyak umat Islam memahami media Barat sebagai musuh dan berkomplot melawan mereka.¹³⁰ *Sabili*, dalam salah satu edisinya,¹³¹ membuat daftar apa yang disebutnya sebagai “rangkaiian pelecehan terhadap Islam di abad ke-21” seperti menyebut Islam sebagai mendorong pembunuhan

¹²⁵ <http://www.discoverthenetworks.org/viewSubCategory.asp?id=98>, 4 Nopember 2010.

¹²⁶ <http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=35483>, 7 Nopember 2010.

¹²⁷ <http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=18083>, 5 Nopember 2010.

¹²⁸ <http://www.geocities.com/martinkramerorg/Ballots.htm>, 4 Nopember 2010.

¹²⁹ Edward Said, *Covering Islam: How the media and the experts determine how we see the rest of the world* (New York: Pantheon Books, 1981), hal. 169.

¹³⁰ A. Siddiqi, “Islam, Muslims, and the American media” dalam A. Haque (Ed.), *Muslims and Islamization in North America* (Maryland: Amana Publications, 1999), hal. 204.

¹³¹ *Sabili* No. 17 TH. XIII 9 Maret 2006/9 Shafar 1427, hal. 46-7.

terhadap orang Yahudi, menghina Rasulullah sebagai orang beringas dan suka perang, memfitnah Islam sebagai agama yang menindas wanita, dan mengusulkan untuk mengebom kota Makkah al-Mukarramah bila terjadi serangan nuklir terhadap Amerika Serikat. Meski pahit untuk diungkapkan, menurut *Sabili*, rangkaian pelecehan ini menjadi bukti bahwa kebencian Barat terhadap Islam dan kaum muslimin bercokol dengan sangat kuat. “Kesan Islamfobi atau kebencian Barat terhadap Islam begitu jelas dalam kasus pemuatan 12 karikatur di harian *Jyllands Posten*,” kata *Sabili*.¹³² “Pada Akhirnya,” masih kata Sabili “umat Islam harus melawan segala bentuk Islamfobi secara kontinyu dan, tentu saja, dengan menggunakan akal sehat.”¹³³

C. Islam dan Kelompok Minoritas

Dalam sistem demokrasi, seseorang dituntut untuk mau berbagi “ruang publik” dengan orang lain. Dalam ruang seperti ini, orang tidak boleh memaksakan keinginannya kepada orang lain. Ruang publik adalah area “negosiasi,” bukan pemaksaan pihak tertentu terhadap pihak lain. Apalagi, masyarakat modern adalah masyarakat yang semakin heterogen dan plural, tempat orang dari berbagai latar sosial, agama, dan afiliasi politik terkadang ditakdirkan untuk menggunakan ruang publik yang sama, seperti Indonesia.

Indonesia merupakan negara demokrasi dalam pengertian di atas. Ia menganut sistem multi agama dan kepercayaan. Kehidupan berbangsanya tidak

¹³² Sabili No. 17 TH. XIII 9 Maret 2006/9 Shafar 1427, hal. 41-2.

¹³³ Sabili No. 8 TH. XIV 2 Nopember 2006/10 Syawal 1427, hal. 45.

didasarkan pada pemaksaan satu nilai kelompok tertentu, tetapi pada suatu dasar yang menjadi kesepakatan bersama (baca: Pancasila), yang diklaim sebagai menjelmakan aspirasi dan kepentingan berbagai elemen bangsa. Meskipun di sini Islam dipeluk oleh mayoritas penduduknya, Indonesia juga mengakui secara resmi keberadaan agama minoritas yang cukup signifikan, seperti Kristen/Protesan, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Dalam konteks ini, melihat bagaimana *Sabili* merepresentasikan Islam dalam kaitannya dengan kelompok minoritas adalah menarik. Ada beberapa alasan kemenarikan tema ini. Pertama, masalah mayoritas-minoritas dalam berbagai aspek, termasuk agama, adalah masalah sensitif, dalam arti mudah membangkitkan rasa saling tidak percaya antara kelompok minoritas dan kelompok mayoritas. Kedua, istilah mayoritas-minoritas terkesan tidak netral. Dalam istilah ini, ada kesan bahwa mayoritas selalu dalam posisi *supordinate*, sedangkan minoritas *subordinate*. Padahal, yang terjadi bisa sebaliknya. Albania adalah contoh terbaik dari hal terakhir ini.¹³⁴ Meskipun mayoritas, secara politik muslim di sana bisa disebut marginal. Ketiga, dalam konteks Islam dan non-Islam di Indonesia, Islam adalah agama mayoritas. Namun, dunia pada umumnya kini didominasi, secara sosial, politik, dan ekonomi oleh pemeluk agama, yang notabene, dipeluk oleh warga bangsa minoritasnya. Akibatnya, kurang bisa dipastikan, apakah sikap muslim di Indonesia terhadap kelompok minoritas itu

¹³⁴ Bandingkan dengan Bosnia dalam *Sabili*, No. 02/TH. V 6-19 September 1992, hal. 36-47 dan No. 04/TH. V 6-19 Oktober 1992, hal. 36-39; Muslim Chechnya dalam *Sabili*, No. 09 TH. X 14 November 2002/9 Ramadhan 1423, hal. 50-64.

merupakan sikap yang sesungguhnya atukah hanya merupakan imbas dan proyeksi atas sikap mereka terhadap warga masyarakat dunia.

Bagi *Sabili*, umat Islam itu terdepan dalam toleransi. *Surat al-Kāfirūn* sering disebut sebagai bukti atas kepeloporan Islam dalam toleransi. Contoh lain dari toleransi Islam adalah apa yang diperbuat oleh Umar ibn al-Khaṭṭāb terhadap gereja al-Qiyāmah. Saat Yerusalem ditaklukan oleh umat Islam, Umar tetap membiarkan gereja ini berdiri, dan ia tidak mau shalat di dalam gereja, karena ia khawatir kelak tentara Islam mengambil gereja ini dan menjadikannya masjid. Gereja pun ini kemudian menjadi tempat paling suci di Yerusalem bagi Kristen.

Di tempat lain, demokrasi dijadikan acuan oleh *Sabili* dalam apa yang disebut sebagai “politik representasi.” Dalam logika *Sabili*, karena umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, maka sudah sewajarnya bila posisi-posisi politik dan berbagai bentuk kebijakan juga dipegang oleh dan menyerap aspirasi umat Islam. Sebaliknya, karena merupakan warga minoritas, maka non muslim juga tidak bisa berharap lebih besar dari yang diperoleh oleh warga mayoritas. “Minoritas harus tahu diri,” demikian kira-kira yang dapat disimpulkan dari pandangan *Sabili* tentang minoritas kaum beragama di Indonesia. Ahmad Sumargono pernah menyatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adaah umat Islam, sehingga presiden harus memperhatikan aspirasinya, terutama yang berhubungan dengan masalah-masalah ideologis. Pandangan serupa juga datang dari Patrialis Akbar. Ia berkata:¹³⁵

“Harus ada perimbangan yang logis antara kelompok Nasionalis dan kondisi sosiologis masyarakat, di mana di Indonesia ini ternyata secara

¹³⁵ *Sabili* No. 4 TH. IX 15 Agustus 2001/25 Jumadil Awal 1422, hal. 75

riil masyarakat muslimnya 85% lebih, ini harus diwakili, sehingga tidak ada alasan bagi siapa pun juga untuk tidak mendukung pemerintahan ini (Megawati-Hamzah Haz, pen).”

Dalam banyak hal, minoritas kaum beragama di Indonesia dianggap *Sabili* telah menerima lebih dari yang seharusnya. Berbagai pos penting di pemerintahan mereka duduki, baik di masa pra maupun pasca reformasi. Jumlah wakil mereka di pemerintahan jauh lebih besar dari jumlah nominal mereka bila di bandingkan dengan jumlah wakil muslim. Fenomena ini lagi-lagi dibaca oleh *Sabili* sebagai bentuk dari “kebaikan” dan “toleransi” umat Islam di Indonesia. Apalagi, bila apa yang dialami dan didapat oleh minoritas muslim di negara-negara lain dipertimbangkan, maka apa yang dinikmati oleh non muslim di Indonesia itu lebih dari cukup.

Hanya saja, sikap demokratis dan toleransi umat Islam Indonesia ini, bagi *Sabili*, seringkali tidak direspon secara baik oleh minoritas non muslim. Alih-alih membalas kebaikan ini dengan kebaikan yang setara, mereka acapkali melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti umat Islam. Sikap mereka ini, dalam pandangan *Sabili*, ibarat “*dike’i athi, ngrogo rempelō*” (diberi satu kebaikan, tetapi minta kebaikan yang lain). Meskipun dinyatakan dalam konteks Islam dan non muslim di Madinah, kutipan berikut tampaknya dimaksudkan *Sabili* untuk menunjukkan toleransi Islam di Indonesia dan sikap non muslim terhadapnya:¹³⁶

“Islam mengajarkan sikap *tasāmuḥ* (toleransi) yang sangat tinggi kepada kelompok lain. Sejarah Islam kaya akan penghormatan dan penghargaan luar biasa yang diberikan kaum muslim kepada non muslim. Tapi sikap *tasāmuḥ* mereka kerap disalahgunakan oleh non muslim. Mereka sering memanfaatkan kebebasan yang diberikan umat Islam untuk melecehkan

¹³⁶ *Sabili* No. 1 TH. VIII 28 Juni 2000/25 Rabiul Awal 1421, hal. 27.

Islam, memfitnah kaum muslimin, mengadu domba, bahkan melakukan pengkhianatan terhadap negara.”

Salah satu sikap tidak terpuji non muslim ini, menurut *Sabili*, adalah penyebaran agama. Mereka menuntut penghapusan SKB Dua Menteri No. 1/1969 dalam pendirian tempat ibadah karena mereka anggap diskriminatif, dapat memicu munculnya kejahatan, berpotensi melanggar HAM, dan bertentangan dengan konstitusi tentang kebebasan beragama dan menjalankan keyakinannya. Bahkan, di banyak tempat mereka diam-diam telah mengabaikan SKB tersebut. *Sabili* menyebutkan kasus Tanjung Barat sebagai contoh. Di sana, persisnya di lingkungan RW 04, mayoritas atau 95% warganya beragama Islam, tetapi jumlah gereja lebih banyak dibanding jumlah masjid, yaitu 3 gereja (satu legal dan lainnya ilegal) dan 2 masjid.¹³⁷

Selain itu, mereka dilukiskan *Sabili* sebagai menempuh segala cara, termasuk memberi godaan materi, untuk menarik umat Islam ke dalam agamanya.¹³⁸ *Sabili* mengidentifikasi 10 cara pemurtadan atau kristenisasi yang digalang oleh para misionaris di Indonesia.¹³⁹ Kesepuluh cara dimaksud adalah melalui pernikahan; menjadikan perempuan muslim sebagai pacar lalu menghamilinya; memberi pekerjaan dan beasiswa; memberi bantuan atas nama kemanusiaan di daerah-daerah miskin dan pedesaan; mengaku pernah menjadi ulama atau keluarga ulama; memasarkan obat-obat terlarang; membangun pendidikan tinggi teologi; korespondensi; menyebarkan buku-buku kekristenan;

¹³⁷ *Sabili* No. 19 TH. XIII 6 April 2006/7 Rabiul Awal 1427, hal. 62-3.

¹³⁸ *Sabili* No. 1 TH. VIII 28 Juni 2000/25 Rabiul Awal 1421, hal. 25.

¹³⁹ *Sabili* No. 24 TH. IX 24 Mei 2002.

dan menggunakan idion-idiom dan atribut-atribut Islam.

Sabili menyatakan bahwa non muslim menggunakan berbagai upaya untuk menghalangi Islam eksis di Indonesia. Ini antara lain dapat dilihat dalam kasus Piagam Jakarta sampai Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Mereka menolak Piagam Jakarta yang mencakup tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” masuk dalam pembukaan UUD 1945, padahal Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah menerimanya dengan bulat. Mereka mengancam bahwa Indonesia bagian Timur akan melepaskan diri jika tujuh kata tersebut masih tetap dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945. Setelah melobi Hatta, keesokan harinya 18 Agustus 1945, tujuh kata tersebut tidak lagi tercantum di dalamnya. Di era reformasi, perseoalan serupa kembali mengemuka. Ketika Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) dan Fraksi Bulan Bintang (FBB) akan memasukkan Piagam Jakarta dalam Pembukaan UUD 1945 dan amandemen pasal 29 UUD 1945, mereka juga menolaknya.¹⁴⁰

Kasus lain adalah ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pengesahan RUU Sisdiknas, kelompok non muslim menggalang kekuatan untuk mempengaruhi anggota DPR agar menunda pengesahan RUU tersebut. Mereka berasalan bahwa pasal tentang pendidikan agama tidak menghargai pluralisme, dan berlawanan dengan hak asasi manusia.¹⁴¹ Keinginan mereka mendapat

¹⁴⁰ *Sabili* No. 25 TH. X 3 Juli 2003/3 Jumadil Awal 1424, hal. 28-9.

¹⁴¹ Pasal dimaksud menyatakan bahwa siswa berhak mendapatkan pendidikan agama menurut agamanya dari guru gema yang sama. Lihat, *Sabili* No. X 10 April 2003, hal. 16-17.

dukungan dari Fraksi PDIP dengan memboikot Rapat Paripurna DPR dengan agenda utama pengesahan RUU menjadi UU. Namun, berkat kegigihan umat Islam, akhirnya RUU Sisdiknas berhasil disahkan meskipun FPDIP memboikot sidang tersebut.¹⁴²

Hal serupa yang, bagi *Sabili*, menunjukkan apa yang disebutnya gejala “tirani minoritas” adalah upaya mereka untuk menjegal Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Menurut *Sabili*, penolakan RUU APP mengarah pada pelecehan terhadap umat Islam. Di balik penolakan, tersirat kekhawatiran terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia. Umat Islam pun diminta waspada dengan upaya-upaya yang menjurus pada tirani minoritas. “Seolah-olah membuktikan,” tulis *Sabili* mengutip perkataan Adian Husain “bahwa aspirasi Islam adalah barang haram.”¹⁴³

Berbagai konflik SARA di Indonesia juga dituding *Sabili* sebagai dampak dari ketidaktahuan diri minoritas non muslim di Indonesia. Di sini, *Sabili* memperbandingkan antara kondisi minoritas non muslim di tengah mayoritas muslim seperti di Jawa di satu sisi, dan antara kondisi muslim yang bukan mayoritas atau seimbang dengan non muslim seperti di Poso dan Ambon di sisi lain. Bila yang pertama dapat menikmati kehidupan penuh keamanan dan kenyamanan, maka yang kedua harus rela hidup dalam tekanan dan ancaman. Itulah alasan konflik Poso dalam beberapa edisi *Sabili* dan cara pemframingan masing-masing, dalam konteks ini, pun bisa dipahami. Kutipan *Sabili* atas

¹⁴² *Sabili* No. 25 TH. X 3 Juli 2003/3 Jumadil Awal 1424, hal. 28-9.

¹⁴³ *Sabili* No. 19 TH. XIII 6 April 2006/7 Rabiul Awal 1427, hal. 60-1.

pernyataan H. Muhammad Adnan Arsal berikut tampaknya bisa mewakili pandangan *Sabili* tentang hal ini:

“Di saat kami jadi minoritas, malah kita yang dizalimi. Itulah yang membuat kami tidak ada pilihan lain, kecuali bersatu. Mudah-mudahan forum yang kami bentuk ini (Forum Silaturrahim dan Perjuangan Umat Islam Poso, pen.) bisa menjadi bargaining yang kuat terhadap ketidakadilan yang diterima muslim Poso selama ini.”¹⁴⁴

D. Islam dan Perempuan

Cara melihat dan mendudukan perempuan, oleh kebanyakan pengkaji Islam, di dunia Muslim dan Barat, dianggap sebagai ciri penting bagi suatu corak keberislaman: sekular, moderat atau Islamis. Ada anggapan bahwa masing-masing corak Islam ini memiliki pandangan yang tidak seragam tentang kedudukan dan peran perempuan dalam dunia privat dan publik, dalam kaitannya dengan kaum laki-laki. Semakin seseorang memberikan peran besar kepada perempuan dan mempersamakannya dalam kedua bidang itu, maka coraknya semakin sekular. Sebaliknya, semakin seseorang mempersempit peran perempuan, terutama dalam dunia publik, maka coraknya semakin Islamis.¹⁴⁵

Bagaimana pandangan *Sabili* terhadap perempuan? Apakah ia mendudukan perempuan sebagai kelompok sosial berstrata kelas dua, sedang strata satunya menjadi milik kaum laki-laki? Apakah perempuan baginya hanya berhak menghuni dan berperan di dunia “dalam” rumah atau juga di dunia “luar” rumah? Atau, ia memberinya hak yang tidak sama dalam kedua dunia tersebut,

¹⁴⁴ *Sabili* No. 19 TH. XIII 6 April 2006/7 Rabiul Awal 1427, hal. 65.

¹⁴⁵ Lihat, *Sabili* No. 02 TH. V 6-19 September 1992, hal. 52-54.

dalam arti memberinya hak besar dalam satu dunia dan membatasinya dalam dunia yang lain? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tampaknya bisa dilacak jejaknya dalam *Sabili* melalui tema-tema seperti pendidikan, cara berpakaian, dan poligami.

Pertama-tama, *Sabili* memandang bahwa, sebagaimana laki-laki, perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan. Bagi *Sabili*, pendidikan itu penting bagi seorang muslim, laki-laki dan perempuan. “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan,” demikian bunyi Hadis Nabi. Ilmu, bagi siapa pun, adalah cahaya yang akan menyinari pemiliknya. Bila setiap individu muslim, laki-laki dan perempuan, telah tercerahkan, maka masyarakat pun akan menjadi baik dan tercerahkan.

Di sini, *Sabili* memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada para tokoh pejuang pendidikan dari kaum perempuan, seperti Kartini, Dewi Sartika, Siti Walidah (Nyai Dahlan), Siti Roehana Koeddoes, dan Rahmah el-Yunusiyah. Tokoh Siti Walidah (Nyai Dahlan), misalnya, diakui *Sabili* sebagai memiliki sumbangan dalam pendirian Organisasi Aisyiyah, sebuah organisasi modern yang didirikan pada tahun 1915 (menjadi salah satu organisasi otonom dalam Muhammadiyah pada tahun 1922) yang ingin memajukan perempuan agar lepas dari penjara pingitan dan kawin paksa. Kini, hampir di seantero nusantara, Aisyiyah hadir untuk menggalang partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan.¹⁴⁶ Mengapresiasi usaha keras perempuan di bidang pendidikan ini, *Sabili* mengutip ungkapan Rahmah el-Yunusiyah yang mengharukan, “Letih

¹⁴⁶ *Sabili* No. 22 TH. IX 2 Mei 2002/19 Shafar 1423, Lembar Khazanah, hal. 20.

anggota badan saya, tapi saya tidak menghiraukannya, karena kekerasan hati tujuan Diniyah School Putri ini untuk seluruh anak bangsanya, Putri Islam.”¹⁴⁷

Pendidikan yang berhak diterima oleh kaum perempuan, dalam pandangan *Sabili*, tidak hanya terbatas dalam ilmu-ilmu agama meskipun pendidikan ini dianggapnya sebagai yang paling utama dan pertama. Perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan ilmu-ilmu umum. Tidaklah mengherankan bila *Sabili* terlihat mendorong perbaikan dan akses dunia pendidikan bagi semua orang. Ia juga sangat apresiatif terhadap perempuan terdidik. Ini antara lain dapat dilihat dalam Lembar Khazanah (el Ka) di salah satu edisi *Sabili*. Di sana *Sabili* menampilkan profil seorang muslimah asal Austria, Sule Tuerk, anggota International Muslim Women Union (IMWU). “Muslimah di Austria sendiri cukup diperhitungkan,” kisah Sule Tuerk sebagaimana ketika diwawancarai *Sabili* “sehingga banyak dari mereka yang telah dilibatkan secara aktif dalam instansi-instansi pemerintah atau swasta ... Mereka kini mulai berpikir untuk mengikuti pendidikan sampai tingkat universitas daripada hanya berdiam di rumah saja.”¹⁴⁸

Jika perempuan dianggap memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki untuk menerima pendidikan, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah peran yang harus dimainkan oleh kaum terdidik dari dua jenis kelamin itu juga dianggap sama. Hal ini mengingatkan bahwa setiap ilmu butuh aktualisasi dan implementasi, termasuk ilmu yang telah didapat oleh kaum perempuan. “Ilmu

¹⁴⁷ *Sabili* No. 22 TH. IX 2 Mei 2002/19 Shafar 1423, Lembar Khazanah, hal. 21.

¹⁴⁸ *Sabili* No. 21 TH. X 8 Mei 2003/6 Rabiul Awal 1424, Lembar Khazanah, hal. 2-3.

tanpa aktualisasi itu sama dengan pohon tanpa buah,” demikian bunyi pepatah Arab. Di samping itu, pendidikan, menurut Shipman, memiliki tiga fungsi.¹⁴⁹ Sosialisasi adalah fungsi pertama pendidikan. Sebagai agen sosialisasi, pendidikan merupakan sarana mengintegrasikan generasi muda atau elemen masyarakat yang lebih luas ke dalam nilai-nilai yang diikuti oleh masyarakat. Tentu saja, nilai-nilai yang disosialisasikan para agen masyarakat ini adalah nilai-nilai yang menopang proses keberlangsungan dan ketahanan masyarakat. Fungsi kedua pendidikan adalah *schooling*. Pendidikan berfungsi mempersiapkan para peserta didik bagi penempatan sosialnya dan memberi mereka kualifikasi-kualifikasi profesional dan pendidikan yang memungkinkan mereka menampilkan "peran sekunder"nya di masyarakat. Ini bisa disebut sebagai fungsi ekonomi pendidikan. Terakhir, pendidikan berfungsi sebagai *education*. Dalam pengertian luas, pendidikan dianggap sebagai agen bagi kontrol sosial dan politik.

Dengan sifat ilmu dan fungsi pendidikan seperti ini, maka perempuan dalam pandangan *Sabili* juga dapat berperan, tidak hanya dalam dunia “domestik,” tetapi juga dunia publik. Perempuan tidak hanya berhak “menguasai” rumah, tetapi juga dapat “menjelajahi” dunia luar rumah. Beberapa staf pegawai di kantor *Sabili*, misalnya, berasal dari kaum perempuan. Selain itu, perempuan juga menjadi bagian dari redaksi *Sabili*. Ketika penulis bertanya,

¹⁴⁹ Ghulam Nabi Saqib, *Modernization of Muslim Education in Egypt, Pakistan, and Turkey: A Comparative Study* (Lahore: al Faried, 1983), hal. 12.

“Mungkinkah perempuan menjadi pemimpin redaksi,” maka pemimpin redaksi S Rivai Hutapea mengatakan, “Mengapa Tidak?”¹⁵⁰

Dalam dunia politik, misalnya, Islam dalam pandangan *Sabili* memberikan peluang kepada muslimah untuk terjun. Ia memiliki peran penting di sana, terutama dalam membina kesadaran politik sesama perempuan. Dengan memiliki kesadaran politik yang baik, perempuan diyakini *Sabili* akan bisa menjalankan perannya sesuai dengan keadaan. Ia tahu bagaimana harus mencetak anak-anaknya untuk menjadi generasi pemimpin umat. Ia tahu bahaya yang dihadapi dan mampu mempersiapkan cara untuk menangkalnya. Ia juga tahu persis hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin negara dan, bila ada penyimpangan, ia tahu kewajibannya untuk mengoreksi dan mengkritiknya. Namun, aktivitas perempuan di dunia politik atau publik pada umumnya ini, bagi *Sabili*, tetaplah sekunder. Perannya sebagai ibu dan rumah tangga tetap menjadi prioritas. *Sabili* mengingatkan jangan sampai partisipasi perempuan dalam politik menyebabkan bahtera rumah tangga oleng.¹⁵¹

Hanya saja, tampaknya ada wilayah publik atau politik yang, menurut *Sabili*, tidak bisa dijamah oleh kaum perempuan. “Menjadi Pemimpin,” itulah wilayah yang terlarang bagi kaum hawa ini.¹⁵² Tentang perempuan menjadi presiden, misalnya, *Sabili* jelas-jelas menolaknya. Bagi *Sabili*, ada beberapa alasan perempuan tidak bisa menjadi presiden.

¹⁵⁰ Rivai Hutapea, Wawancara, 19 Nopember 2010.

¹⁵¹ *Sabili*, No. 22 TH. XI 21 Mei 2004/1 Rabiul Akhir 1425, hal. 70-3.

¹⁵² Lihat ‘Takwin: Hak-Hak Politik Wanita’ dalam *Sabili*, No. 9 TH. VI 11 Nopember 1998/21 Rajab 1419, hal. 10-11.

Pertama, *nash* (teks) al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam surah al-Qur'an (al-Nisa': 34) disebutkan, "*Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan.*" Dalam Hadis juga disebutkan tentang ketidakberuntungan negara yang menyerahkan kepemimpinannya kepada kaum perempuan. "*Ketika mendengar bahwa bangsa Persia mengangkat puteri Kisra sebagai raja, Rasulullah bersabda, 'Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan,'*" demikian bunyi hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Menurut Imam al-Syaukani, hadis ini merupakan dalil bahwa perempuan bukan termasuk kelompok *ahl al-wilāyāt* atau berhak dipilih sebagai pemimpin (negara). Di tempat lain, Ibn Hazm berpendapat bahwa kepemimpinan yang dilarang dijabat oleh perempuan adalah *wilāyah al-uzmā*, khilafah atau kepala negara. Bahkan, Ibn Taimiyah mengatakan bahwa bila ada orang yang membolehkan perempuan menjadi kepala negara, maka pertanda di otaknya ada penyakit, alisan tidak waras. Selain itu, *Sabili* menyebut larangan wanita menjadi pemimpin itu merupakan hasil konsensus jumbuh ulama, sebagaimana yang dikemukakan oleh FPI (Front Pembela Islam) bahwa "penolakan terhadap presiden wanita adalah ijma' ulama dan kitab *al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman a-Jaziri juz 5 hal. 416 menyebutkan bahwa di antara syarat seorang pemimpin adalah laki-laki."¹⁵³

Kedua, aspek kebahasaan. Hadis di atas, menurut *Sabili*, menggunakan kata */lan/* yang bermakna menegaskan sesuatu tanpa batas waktu tertentu di

¹⁵³ Lihat *Sabili*, No. 4 TH. IX 15 Agustus 2001/25 Jumadil Awal 1422, hal. 77.

masa datang. Dengan kata lain, larangan dalam hadis tersebut berlaku selamanya, kapan pun dan di mana pun.

Ketiga, dari perspektif sejarah Islam, menurut *Sabili*, tidak ada nabi atau khalifah perempuan. Sejak zaman Abu Bakara hingga akhir masa khilafah di Turki, umat Islam belum pernah mengangkat kaum perempuan sebagai pemimpin mereka. *Sabili* memang mengakui adanya banyak perempuan cerdas di masa itu, tetapi mereka hanya menduduki beberapa jabatan dalam bidang tertentu, bukan kursi pemimpin negara.

Keempat, aspek *wāqi' siyāsī* (realitas politik). Dalam sejarah umat Islam, kaum perempuan tidak pernah diberi tanggung jawab memimpin suatu kebijakan militer. Dalam peperangan, seperti Perang Uḥud dan Ḥunain, mereka hanya bertugas di garis belakang, bukan memimpin. Realitas ini bila ditransformasikan kepada kebijakan politik di suatu negara, Indonesia misalnya, kedudukan presiden otomatis menjadi panglima tertinggi militer. Dengan demikian, jabatan itu, menurut *Sabili*, tidak dapat diserahkan kepada perempuan.

Kelima, aspek psikologis. Perempuan, dalam pandangan *Sabili*, memiliki berbagai kendala kodrati yang membuatnya secara psikologis tidak dapat memangguk tanggung jawab yang besar dan luas. Kendala tersebut antara lain adalah rutinitas menstruasi, hamil, melahirkan, dan kondisi fisik perempuan pada umumnya yang membentuk emosi dan kecenderungan yang berbeda dengan kaum laki-laki.

Untuk menepis anggapan bahwa larangan perempuan menjadi presiden adalah sebuah bentuk diskriminasi, *Sabili* mengatakan bahwa larangan tersebut

bukanlah diskriminasi, melainkan bagian dari pembagian kerja. Lagi pula, menurutnya, secara fisik dan psikis, perempuan memiliki keterbatasan yang akan menggangukannya sebagai pemimpin, seperti melahirkan dan menyusui anak.

Menariknya, demi memperkuat pandangannya tentang ketidakabsahan perempuan menjadi presiden, *Sabili* bahkan mengutip pernyataan Bibel. Menurutnya, fatwa haramnya presiden perempuan itu telah menjadi harga mati dalam Bibel, karena dalam kitab Taurat disebutkan bahwa perempuan ditakdirkan bukan untuk berkuasa, melainkan untuk dikuasai, dan bahwa perempuan haram menjadi presiden. “*Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan mereka memerintah laki-laki; hendaklah ia berdiam diri.*” (I Timotius 2:12) *Sabili* pun mengajak umat beragama, Islam dan Nasrani, untuk konsekuen dengan pandangan teologis yang diajarkan kitab suci.¹⁵⁴

Selain pendidikan dan menjadi pemimpin, sikap *Sabili* terhadap perempuan juga bisa dilihat dari dua hal. Pertama, poligami. Bagi *Sabili*, poligami dalam Islam itu diperbolehkan meskipun harus disertai syarat “adil,” sebagaimana tertera dalam al-Qur’an (al-Nisa’: 3), yang lebih dimaknanya secara material-biologis, bukan immaterial. “Soal hukum poligami sendiri memang dianjurkan,” kata tim pengasuh rubrik Konsultasi Agama dalam *Sabili* “apabila memiliki kemampuan untuk menafkahi istri-istrinya secara fisik dan materi, dan mampu untuk bersikap adil tanpa menzalimi satu pun istri.”¹⁵⁵

¹⁵⁴ *Sabili*, No. 26 TH. XI 16 Juli 2004/26 Jumadil Awal 1425, hal. 93-3.

¹⁵⁵ *Sabili*, No. 22 TH. XI 21 Mei 2004/1 Rabiul Akhir 1425, hal. 106.

Baginya, ada sejumlah alasan yang membolehkan poligami, baik pragmatis, historis maupun sosiologis. Poligami dalam Islam, menurut *Sabili*, menjadi bagian dari pemecahan problem sosial, bukan hanya karena nafsu. Problem sosial dimaksud, misalnya, adalah masalah perselingkuhan.¹⁵⁶ Oleh karena itu, bila seseorang telah berpoligami, apalagi dengan istri empat, lalu masih selingkuh, maka dalam pandangan *Sabili* orang tersebut telah terjerat godaan setan. Secara historis, praktik poligami tidaklah aneh, tetapi lumrah di kalangan nabi dan khalifah. Secara sosiologis, poligami juga memecahkan ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan (lihat kasus di berbagai negara).¹⁵⁷

Mengenai pakaian perempuan, *Sabili* berpandangan bahwa pakaian perempuan haruslah yang menutup aurat, “Menurut pendapat mayoritas ulama,” demikian kata pengisi rubrik Konsultasi Agama dalam *Sabili* “aurat pria adalah antara pusar; sedang untuk wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan tangan.”¹⁵⁸ Oleh karena itu, bagi *Sabili*, yang dimaksud dengan busana muslimah adalah busana yang menutup aurat.

Sabili memang tidak secara eksplisit menolak pakaian lokal yang menutup aurat, tetapi tampaknya ia melihat jilbab atau hijab sebagai bentuk pakaian penutup aurat perempuan. Ini didasarkan pada ayat al-Qur’an surah *an-Nūr*/24:31, “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka,” dan surah al-Aḥzāb/33:59, “*Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-*

¹⁵⁶ *Sabili*, No. 22 TH. XI 21 Mei 2004/1 Rabiul Akhir 1425, hal. 107.

¹⁵⁷ *Sabili*, No. 22 TH. XI 19 Mei 1999/13 Shafar 1420, hal. 51.

¹⁵⁸ *Sabili*, No. 14 TH. X 30 Januari 2003/27 Dzul Qa’idah 1423, hal. 83.

anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."¹⁵⁹ Selain menutup aurat agar tidak diganggu dan tidak menjadi fitnah, tujuan pensyariatannya jilbab bagi Sabili adalah sebagai identitas agar mudah dikenali dari perempuan lain dan sebagai penghormatan bagi perempuan muslim.¹⁶⁰

Hanya saja, sikap *Sabili* tidak jelas, apakah jilbab yang dimaksudkannya itu jilbab dengan bagian wajah terbuka atau tertutup seperti cadar. Yang pasti, *Sabili* memberikan apresiasi kepada perempuan yang menutup aurat dengan dua bentuk jilbab ini. Di satu tempat ia mengatakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan, tetapi di tempat lain ia tidak menolak perempuan yang memakai cadar.

E. Islam dan Moralitas Masyarakat

Isu moral, baik individual maupun kolektif/masyarakat, tampaknya cukup menonjol dalam majalah *Sabili*. Ini wajar karena perbaikan moralitas menjadi bagian penting dari proyek memperbaiki kondisi umat Islam, mengejar ketertinggalannya dari Barat, dan bahkan meraih supremasinya atas peradaban dunia sebagaimana dulu pernah terjadi dalam sejarahnya. Apalagi, moral ini dirasakannya sebagai celah yang ditinggalkan oleh kemajuan peradaban Barat

¹⁵⁹ Sabili, No. 24 TH. X 19 Juni 2003/18 Rabiul Akhir 1424, "Dunia Perempuan," hal. 14.

¹⁶⁰ Sabili, No. 24 TH. VIII 23 Mei 2001/29 Shafar 1422, hal. 12.

yang bisa diisi oleh Islam. “Bukankah nabi Muhammad diturunkan ke dunia hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia?” demikian tampaknya argumentasi yang dikembangkan oleh *Sabili*.

Peradaban yang dikembangkan Barat adalah berpangkal dari prinsip kebebasan individu, baik dalam mengekspresikan maupun melakukan sesuatu. Kebebasan model Barat ini pada akhirnya bermuara pada keinginan untuk mengabaikan semua tatanan dan nilai-nilai yang menjadi sumber moral masyarakat. Kemodernan seseorang seolah-olah dilihat dan diukur dari seberapa jauh ia meninggalkan nilai-nilai lama (termasuk moralitas agama) dan seberapa besar ia mengadopsi hal-hal baru. Banyak anggota masyarakat yang tidak menunaikan ritual agamanya hanya karena sebab-sebab sepele. Tidak sedikit orang yang skeptis terhadap Allah. Orang lebih takut malu kepada orang daripada dosa. Orang mulai berani mengumbar asmara di jalan-jalan. Banyak orang menjalani hidupnya tanpa nilai. Masalah moral atau akhlak dianggap sebagai sesuatu yang paling remeh. Bahkan, jatuh ke jurang kenistaan tidak lagi mendatangkan penyesalan sedikit pun.

Pertama-tama, *Sabili* melihat pentingnya pendidikan agama sebagai basis kuat bagi perbaikan moral bangsa. Tanpa pondasi agama yang kuat, perbaikan kondisi umat yang dilakukan hanya akan melahirkan problem-problem baru yang bahkan tidak kalah massif dan dekonstruktif bila dibandingkan dengan problem-problem yang ada sebelumnya. Hal ini karena menurut Schopenhauer sebagaimana yang dikutip oleh A. Mukti Ali, “Untuk mengajar moralitas adalah mudah, tetapi untuk mencari dasarnya adalah sukar,” sementara agama, dalam

pandangan banyak orang, merupakan dasar yang paling kuat bagi moral.¹⁶¹ Di sisi lain, sebagaimana dikatakan oleh ‘Abd al-Raḥīm Pāshā ‘Īsa, salah seorang tokoh sekular fiktif dalam novel *al Sukkarīyah* karya Najīb Maḥfūz, "Moral itu beragam. Hakim dituntut bersih dan adil, menteri dituntut tanggung jawab publik, dan teman dituntut jujur dan setia. Manusia tidaklah memiliki nilai atau arti bila dirinya tidak bermoral."¹⁶²

Tidaklah mengherankan bila majalah *Sabili* termasuk media yang, sebagaimana telah disinggung di atas, getol mendorong diundangkannya RUU Sisdiknas. Dalam pasal 13 RUU tersebut dinyatakan bahwa pendidikan agama harus diajarkan oleh guru yang seagama. Sebagaimana dimakumi bahwa banyak anak-anak muslim sekola di lembaga-lembaga pendidikan non muslim. Ini tentu mengkhawatirkan masyarakat muslim, terutama orang tua siswa, bila anak-anak mereka harus mengikuti pelajaran agama non-Islam. Namun, bila RUU ini disahkan menjadi UU, maka anak-anak muslim tersebut harus mendapatkan pendidikan agama Islam dari guru yang juga beragama Islam.

Agama, bagi *Sabili*, adalah basis moralitas yang kokoh. Bila agama seseorang kuat, maka dapat dipastikan moralitasnya juga baik. Sebaliknya, bila pondasi agamanya lemah, maka ia akan mudah tergerus oleh arus deras modernitas yang membawa peradaban materialis, tempat spiritualitas dikesampingkan. Ketika mengulas langkah-langkah bagaimana mengkondisikan

¹⁶¹ W. M. Dixon, misalnya, berpendapat bahwa agama, betul atau salah, dengan ajaran-ajarannya yang percaya kepada Tuhan dan kehidupan akhirat, adalah dalam keseluruhannya, kalau tidak satu-satunya, merupakan dasar yang paling kuat bagi moral. Lihat, A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa ini* (Jakarta: Rajawali, 1987), hal. 58.

¹⁶² Najīb Maḥfūz, *al-Sukkarīyah* (Kairo: Maktabah Miṣr, tt.), hal. 303.

anak-anak agar memahami pekerti, misalnya, *Sabili* mendudukan agama dalam peringkat atas. “Hidupkan nuansa religi dalam kehidupan keluarga,” demikian tulis *Sabili*. Menurut *Sabili*, agama berada dalam rangking teratas untuk membentuk pribadi atau generasi muslim yang shalih, beriman, dan bertakwa. Kesalehan keluarga menjadi jaminan bagi kondusifnya mentalitas keluarga, dan anak secara otomatis termasuk dalam kesalehan tersebut.¹⁶³

Moralitas berbasis agama atau akhlak Islami inilah, dalam pandangan *Sabili*, yang paling diperlukan bagi manusia. Ia lebih dari sekedar kebaikan manusia biasa. Ia memiliki kekhususan dan menuntut kekhususan pula. Ia bersumber dari Islam. Akhlak ciptaan manusia tidaklah sebanding jika ditimbang dengan kekuatan akhlak Islami yang memiliki implikasi dahsyat dan besar sebagaimana telah terabadikan dalam al-Qur’an.¹⁶⁴

Pandangan *Sabili* ini, dalam beberapa hal, sama dengan pandangan Najīb Maḥfūz. Menurut sastrawan Mesir dan muslim pertama yang pernah meraih hadiah Nobel pada 1988 ini, kemajuan dan teknologi yang telah diwujudkan manusia itu pemanfaatannya digerakkan oleh dua kemungkinan: nilai-nilai kemanusiaan dan moral atau penilaian akal dan kepentingan saja. Akal dan kepentingan yang dilepaskan dari nilai-nilai dapat mendatangkan banyak malapetaka seperti dua perang dunia atau berbagai tindakan kriminal dan kekerasan yang banyak terjadi dewasa ini. Andai saja dikendalikan oleh nilai-nilai atau moral agama, maka prestasi manusia ini, menurut Najīb, akan menjadi

¹⁶³ *Sabili*, No. 15 TH. XI 13 Februari 2004/22 Dzulhijjah 1424, hal. 50.

¹⁶⁴ *Sabili*, No. 15 TH. XI 13 Februari 2004/22 Dzulhijjah 1424, hal. 68-9.

kebaikan bagi manusia.¹⁶⁵ "Ilmu pengetahuan tanpa agama bisa menjadi alat kejahatan, dan tanpa ilmu pengetahuan agama tidak bisa tegak (berfungsi secara baik)," tegas Najīb atas pentingnya agama sebagai pemberi nilai (baik) terhadap ilmu pengetahuan dan hasil-hasilnya.¹⁶⁶

Masalah lain yang kerap diangkat oleh *Sabili* dalam kaitannya dengan moral adalah pergaulan laki-laki dengan perempuan. Tidak seperti masa-masa sebelumnya, dunia modern menyaksikan kaum perempuan masuk dalam dunia yang selama ini hanya menjadi milik dunia laki-laki. Dalam bidang apa pun, tempat kaum laki-laki bekerja dan beraktivitas, perempuan juga dapat ditemukan. Kondisi ini pada gilirannya membuka peluang bagi pergaulan bebas antara dua makhluk berlainan jenis tersebut. Hal-hal yang dulu dianggap tabu dan biasanya hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, seperti bergandengan tangan, kini sering terlihat di jalan-jalan, laiknya sesuatu yang lumrah.

Untuk membuktikan bahwa fenomena pergaulan bebas ini bukanlah isapan jempol semata, *Sabili* menunjukkan hasil riset Laboratorium Antropologi FISIP UI yang diadakan pada 1999 di beberapa desa terpencil bekerja sama dengan Ford Foundation, salah satunya Desa Rambai Kalimantan Selatan. Di sana ada semacam atauran tidak tertulis bahwa jika seorang remaja lelaki berpacaran dan hanya berani berkirim surat, maka itu dianggap kuno. Oleh teman-temannya, ia akan dijuluki *hayam kampung* (ayam kampung) atau

¹⁶⁵ Najīb Maḥfūz, *Waṭanī Miṣr: Ḥiwārāt Ma'a Muḥammad Salmāwī* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1997), hal. 63.

¹⁶⁶ Majalah Niṣf al-Dunyā, *Wadā'an Najīb Maḥfūz*. Edisi 864, 3 September 2006, hal. 39.

babanciran (keban-ci-bancian). Bahkan, mereka terkadang dicemooh sebagai *kada kawa kajung* (tidak mampu ereksi). Apabila pergeseran nilai moral di desa sedemikian revolusioner, maka di kota-kota besar disebut *Sabili* sebagai bikin masyarakat kebat-kebit. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa satu dari lima perempuan, yang menikah dan berusia 20-24 tahun, melahirkan anak pertama sebagai buah dari hubungan seks pra nikah. Penelitian lain yang diadakan oleh Faturachman dan Soetjipto di Bali pada 1989 menunjukkan bahwa prosentasi remaja laki-laki di desa dan kota yang telah melakukan hubungan seks pra nikah masing-masing adalah 23,6% dan 33,5%.¹⁶⁷

Pegaulan bebas pun kemudian memunculkan banyak problem, seperti merajalelanya penyebaran penyakit HIV. Irian Jaya (Papua), misalnya, menjadi daerah terbesar di Indonesia yang terindikasi virus HIV/AIDS.¹⁶⁸ Padahal, agama, kata *Sabili*, telah memberikan batas-batas dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Pembatasan ini, bagi *Sabili*, bukan sebuah pengekanan kebebasan dari agama, melainkan tindakan antisipatif agama terhadap berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkannya.

Oleh karena itu, majalah *Sabili* sangat getol menyuarakan penolakannya terhadap berbagai bentuk pornografi dan porno aksi. Bentuk-bentuk semacam ini, bagi *Sabili*, akan membuat masyarakat muslim semakin terpuruk, dan ini dianggapnya sebagai bagian dari rekayasa musuh Islam untuk semakin menjauhkan pemeluknya dari agama, agar mudah dikuasai dan ditaklukkan.

¹⁶⁷ *Sabili*, No. 4 TH. XI 11 September 2003/14 Rajab 1424, Lembar Khazanah, hal. 6-7.

¹⁶⁸ *Sabili*, No. 9 TH. X 14 Nopember 2002/9 Ramadhan 1422, hal. 98.

“Penghancuran terhadap Islam Indonesia,” bagi *Sabili* “tidak hanya dengan memperlumah ekonomi umat, tetapi juga dengan merusak moral dan akhlak yang tidak terbatas. Upaya ini mereka lakukan secara terukur dan sistematis melalui media massa, jaringan pengedar narkoba, dan VCD porno.”¹⁶⁹

Dalam pandangan *Sabili*, dekadensi moral di berbagai negara Islam atau berpenduduk mayoritas Islam adalah sebuah *ghazw saqāfi* (perang budaya dan pemikiran) yang diambil kaum penjajah (baca: Barat) setelah jalan militer tidak cukup ampuh untuk melumpuhkan kekuatan Islam. Ini dimaksudkan untuk menggiring generasi muda agar mau mengikuti tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai kehidupan mereka. Salah satu sasaran mereka adalah wanita. Mereka menginginkan para muslimah menjadi seperti wanita-wanita Barat yang jauh dari nilai-nilai Islam: bebas bergaul dengan laki-laki, membuka aurat, menafikan kodrat wanita, dan berkompetisi dengan laki-laki dalam semua segi kehidupan.¹⁷⁰

Masalah lain terkait perbaikan moral masyarakat yang sering diangkat dalam pemberitaan *Sabili* adalah korupsi. Bagi *Sabili*, korupsi adalah kejahatan besar yang patut dihukum seberat-beratnya. Kejahatan ini tidak hanya berimbas kepada satu atau sejumlah orang, tetapi kepada bangsa secara keseluruhan. Ia menyebut koruptor sebagai perampok uang negara. Hanya saja, *Sabili* merasa geregetan melihat kejahatan besar dari perampok ini malah diperlakukan secara super istimewa dari penguasa. Tiga koruptor dana BLBI, yaitu Lauw Tjin Ho (Atang Latief), Jauw Thung Nung (James Januardy), dan Ulung Bursa, misalnya,

¹⁶⁹ Lihat, *Sabili*, No. 17 Tahun XIII, 9 Maret 2006/1427, hal. 5.

¹⁷⁰ *Sabili*, No. 19 TH. XIII 6 April 2006/7 Rabiul Awal 1427, hal. 71.

tidak diborgol oleh aparat keamanan dan bahkan dibawa dan diterima di istana presiden. Geregetan itu semakin terasa bila perlakuan itu dibandingkan dengan perlakuan yang diterima oleh para aktivis muslim yang “diduga” terlibat dalam gerakan terorisme.¹⁷¹

Patut pula disebut di sini adalah bahwa *Sabili* mengamini upaya rekonstruksi moral masyarakat melalui hal-hal yang sepintas tampak kurang berhubungan dengan moralitas dan, sebaliknya, oleh banyak pihak dianggap sebagai tidak cukup bermakna. Hal-hal kecil dimaksud adalah praktik-praktik seperti memanjangkan jenggot, makan dengan tangan kanan, dan mencukur kumis. Bagi *Sabili*, praktik-praktik ini merupakan bagian awal dari peneladanan hidup Rasulullah secara keseluruhan. “Untuk bisa melakukan hal besar, maka harus dimulai dari hal kecil,” inilah tampaknya alasan yang mendasari praktik yang sekilas terlihat sepele ini.

Dari uraian tentang wajah Islam dalam representasi *Sabili* ini tampak bahwa ketika menyajikan suatu pemberitaan, maka *Sabili* memilih untuk berada di “pihak” dan membela “kepentingan” Islam. Dalam hal ini, Islam yang disajikan *Sabili* adalah Islam yang, mengikuti kategori Youssef M. Choueri sebagaimana disebut dalam bab II, radikal. Radikalisme *Sabili* tampak dari pandangannya bahwa Islam adalah agama yang bersifat total dan *self sufficient* (serba mencakup), dari kecenderungannya menganggap praktik keberagaman yang berbeda (Islam liberal dan non muslim) sebagai rival, dan dari

¹⁷¹ Lihat, *Sabili*, No. 17 Tahun XIII, 9 Maret 2006/1427, hal. 21.

keengganannya untuk mengadopsi atau bahkan, kecurigaannya, atas apa pun yang berasal dari Barat.

Namun, radikalisme *Sabili* ini lahir akibat dari tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang cenderung tidak “ramah” terhadap Islam dan umat Islam, baik di tingkat lokal (Indonesia) maupun di tingkat global (dunia). Di sini dapat dikatakan bahwa sikap radikal yang diambil *Sabili* lebih merupakan sebuah reaksi terhadap agitasi eksternal. Di tingkat lokal, meskipun dipeluk oleh mayoritas penduduk, Islam nyaris tidak pernah menjadi bahan pertimbangan dan rujukan dalam pengambilan kebijakan publik. Islam tidak saja dianggap sebagai tidak bermakna, tetapi bahkan menghambat kemajuan sehingga harus disingkirkan. Di tingkat global, Islam dan umat Islam menjadi target terus-menerus dari upaya Barat atau non Muslim untuk mendefinisikan dirinya sebagai baik dan beradab yang berbeda dengan Islam atau muslim yang jahat dan tidak beradab.

Berpihak kepada kepentingan Islam dan umat Islam yang termarginalkan inilah prioritas *Sabili*. Akibatnya, *Sabili* tidak menampilkan diri sebagai berada di kelompok-kelompok yang selama ini dianggap radikal, seperti Tarbiyah (yang menjelma menjadi Partai Keadilan Sejahtera/PKS), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ia dapat disebut “tidak berada,” tetapi sekaligus “berada di antara dan di tengah-tengah” mereka. Ini bermakna bahwa pertemuan *Sabili* dengan kelompok-kelompok itu bukanlah dari ikatan struktural dan organisatoris, melainkan dari persamaan pandangan tentang Islam

dan tatanan kehidupan ideal, tentang ketertindasan umat Islam, dan tentang non Muslim yang dipandang sebagai tidak ramah terhadapnya.

Selain bermotif ideologis, pilihan posisi berada di antara kelompok-kelompok muslim ini juga tidak terlepas dari kepentingan bisnis. *Sabili* ingin menarik pembaca lintas kelompok. Ia ingin mengamankan kelangsungan eksistensinya, yang mengandalkan dari oplah, dengan mengambil pembaca ideologis, bukan kelompok atau organisatoris. Pembaca seperti ini diyakini *Sabili* dapat menjadi pembaca “fanatik”nya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Islam, dalam pemberitaan *Sabili*, adalah agama yang sempurna dan bersifat total, sehingga dapat menjadi sistem hidup yang kompatibel dengan segala ruang dan waktu. Oleh karena itu, untuk menjadi maju dan sejajar dengan Barat, umat Islam tinggal kembali dan menerapkan ajarannya, yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah, secara menyeluruh dalam semua segi kehidupan. Ketertinggalan dan ketertinggalan mereka dari Barat selama ini akibat dari pengabaian mereka terhadap ajaran Islam yang *self sufficient* (serba mencakup) dan gangguan non muslim (Barat) yang terus berupaya memperlemah umat Islam.

Dengan meyakini Islam sebagai serba mencakup, *Sabili* pun mengangankan sebuah tatanan hidup yang Islami, baik di ruang privat maupun ruang publik. Sistem politik dan kebijakan pemerintah harus didasarkan kepada Islam. Moralitas masyarakat juga haruslah moralitas Islami. Relasi laki-laki dan perempuan juga harus berdasar pada ketentuan yang diberikan oleh Islam. Dalam semua aspek kehidupan, manusia tidaklah berwenang memilih sistem. Ia hanya berwenang dan memiliki hak menerjemahkan sistem yang, dalam sejarahnya, pernah terbukti handal dan membawa kemajuan. Sistem apa pun yang bertentangan dengan sistem Islam ini dianggapnya sebagai rival dan cenderung dianggap musuh.

Radikalisme *Sabili* ini, dalam beberapa hal, merupakan reaksi terhadap sistem yang dianggapnya cenderung memusuhi dan menghadang keberlakuan Islam sebagai sistem hidup. Sistem politik lokal (Indonesia), menurutnya, sama sekali tidak mengakomodir aspirasi umat Islam sebagai mayoritas penduduknya, satu hal yang menjadi keniscayaan dalam politik representasi pada sistem demokrasi yang dianutnya. Demikian pula dengan sistem politik internasional. Bahkan, di level internasional, Islam di mata *Sabili* menjadi target atau musuh bersama dari non Muslim.

Hanya saja, sikap radikal *Sabili* mengalami sedikit perubahan. Perubahan ini, paling tidak, dapat diamati dari sikapnya terhadap rezim lokal. Di masa orde baru, *Sabili* tampak sangat antipati terhadap rezim meskipun ini diartikulasikannya secara agak tersembunyi. Namun, pasca Reformasi, *Sabili* tampak bergairah terhadap rezim atau kekuasaan, dan ini diartikulasikannya secara vulgar tetapi tetap kritis. Perubahan ini terkait dengan akses kepada kekuasaan bagi umat Islam yang berbeda dalam dua orde tersebut. Alasan akses ini antara lain diperkuat oleh tidak adanya perubahan yang ditunjukkan oleh sikap *Sabili* terhadap politik global karena tidak berubahnya sikap politik global terhadap umat Islam.

Dalam membela kepentingan Islam dan umat Islam ini, *Sabili* tidak terlihat berada di satu kelompok yang selama ini dipersepsi sebagai radikal. Tampaknya, sebagai media yang keberlangsungan hidupnya mengandalkan dari penjualan oplah, *Sabili* ingin menembus batas kelompok atau organisasi. Pembaca yang diinginkan dan diandalkannya adalah pembaca fanatik, dan

pembaca seperti ini hanya dapat lahir akibat kesamaan ideologis, bukan kelompok atau organisasi.

B. Saran

Berdasar pada kesimpulan di atas dan pada kenyataan bahwa lazimnya penelitian ilmiah, penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup tertentu dan dari sudut pandang tertentu, maka penulis ingin menyampaikan dua saran:

Pertama, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan beragam pendekatan, baik tentang majalah *Sabili* maupun majalah Islam pada umumnya di Indonesia, agar diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang keinginan dan aspirasi umat Islam Indonesia. Hal ini karena dapat diasumsikan adanya banyak pemahaman dan aspirasi Islam apabila faktor sosial politik setempat dipertimbangkan.

Kedua, para pembuat kebijakan perlu mencermati pemikiran-pemikiran dan aspirasi-aspirasi masyarakat luas sebagaimana yang terartikulasikan dalam media yang diterbitkannya agar kebijakan yang diambilnya tidak melahirkan sikap-sikap dan ekses-ekses yang kontra produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbarzadeh, S. dan B Smith. *The representation of Islam and Muslims in the media*, (Sydney: Monash University Press, 2005).
- Ali, A. Mukti, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa ini* (Jakarta: Rajawali, 1987).
- Altheide, D. L., *Consuming terrorism. Symbolic Interaction*, 2004.
- Anom, Erman, *Media Sebagai Alat Pembangunan Masyarakat Aceh*.
- Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juli 1945, dan Sejarah bKonsensus Nasional antara Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959* (Jakarta: Rajawali Press, 1986).
- Anshori, Ahmad Yani, *Islam dan Negara-Bangsa di Indonesia: Studi Terhadap Perjuangan ke Arah Negara Islam di Dalam Parlemen Konstituante (1956-1959) dan di Luar Parlemen*, disertasi pada UIN Syarif Hdayatullah 2006 tidak diterbitkan.
- Armado, Ade, "Citra Kaum Pembaharu Islam dalam Propaganda Media Dakwah" dalam *Ulumul Qur'an*, IV:3, 1993.
- Badawī, Jamāl, *Nazarāt fī Tārīkh Miṣr* (Kairo: Dār al-Syurūq, 1994).
- Barker, Chris, *Cultural Studies: Theory and Practice* (London: Sage Publications, 2000).
- , *The Sage Dictionary of Cultural Studies* (London: Sage Publications, 2004).
- Borchers, H., *Hardline Islamist Discourse in Indonesia: Sabili and the International Dimension*, <http://www.slideshare.net/h.borchers/borchers-h-2004-hardline-islamist-discourse-in-indonesiasabili>, 18 Nopember 2010.
- Brown, L. Carl, *Religion and State: the Muslim Approach to Politics*, (Colombia: Colombia University Press, 2000).
- Cachia, Pierre, *An Overview of Modern Arabic Literature* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990).
- Conboy, Ken, *INTEL: Inside Indonesia's Intelligence Service* (Jakarta-Singapore: Equinox Publishing, 2004).
- Damanik, Ali Said, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2003).
- Darmawan, Andy dkk., *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005).

der Mehden, Fred R. Von “Malaysia dan Indonesia,” dalam Shireen T. Hunter (ed.) *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan* (Yogya: Tiara Wacana, 2001).

Fairclough, *Language and Power* (London: Pearson Education Limited, 2001).

Farida, Ade Rina, *Konstruksi Realitas Islam Liberal dalam Media Cetak: Analisis Framing Majalah Gatra dan Sabili* (Jakarta: UI), Tesis tidak diterbitkan.

Fauzi, Arifatul Choiri, *Kabar-Kabar Kekerasan dari Bali*, Cet. I (Yogyakarta: LKiS, 2007).

Furqon, Aay Muhammad, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Teraju, 2004).

Gharbāl, Muḥammad Sāfiq, *al-Mausū‘ah al-‘Arabīyah al-Muyassarah*, jilid I (Beirūt: Iḥyā’ al-Ṭurās al-‘Arabī, 1960).

Guba, dkk. “Competing Paradigm in Qualitative Research” dalam Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (Editor), *The Sage Handbook of Qualitative Research* (London: Sage Publications, 2005).

Hall, Stuart, *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices* (London: The Open University, 2003).

Hamad, Ibnu, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik* (Jakarta: Granit, 2004).

Hamka, Rusydi dan Rafik (Peny.), *Islam dan Era Informasi* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989).

Hanazaki, Yasuo, *Pers Terjebak* (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1998).

Hefner, Robert W., *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (UK: Princeton University Press, 2000).

<http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=18083>, 5 Nopember 2010.

<http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=35483>, 7 Nopember 2010.

<http://olgariki.multiply.com/journal/item/8>, 23 Des 2010.

<http://pasangiklansabili.blogspot.com/search/label/profile%20pembaca>, 18 Desember 2010.

<http://www.discoverthenetworks.org/viewSubCategory.asp?id=100>, 5 Nopember 2010.

<http://www.discoverthenetworks.org/viewSubCategory.asp?id=98>, 4 Nopember 2010.

<http://www.geocities.com/martinkramerorg/Ballots.htm>, 4 Nopember 2010.

Hutapea, S Rivai, *Wawancara*, 19 Nopember 2010.

- Jahroni, Jajang, "Defending the Majesty of Islam: Indonesia's Front Pembela Islam (FPI) 1998-2003," *Studia Islamika*, 11, No. 2 (2003).
- Kholisyah, Umi, *Peristiwa Tanjungpriok 1984 (Sebuah Kajian Sejarah Sosial)*. Skripsi 2010 Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Universitas Negeri Malang, tidak diterbitkan.
- Khoury, Enver M., *The Patterns of Mass Movements in Arab Revolutionary Progressive States* (Paris: Mouton, 1970).
- Littlejohn, W. Stephen, *Theories of Human Communication* (USA: Wadsworth Publishing Company, 1996).
- Maarif, A. Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1996).
- Maḥfūz, Najīb, *al-Qāhirah al-Jadīdah* (Kairo: Maktabah Miṣr, tt.).
- , *al-Sukkarīyah* (Kairo: Maktabah Miṣr, tt.).
- , *Waṭanī Miṣr: Hiwārāt Ma'a Muḥammad Salmāwī* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1997).
- Majalah Niṣf al-Dunyā, *Wadā'an Najīb Maḥfūz*. Edisi 864, 3 September 2006.
- Malik, Dedi Jamaludin, "Kekuatan Media Bukan di Pihak Islam," wawancara khusus Suaka News Edisi 5, <http://suakaonline.com/2009/06/13/%E2%80%9Ckekuatan-media-bukan-di-pihak-islam%E2%80%9D/>, 31 Nopember 2010.
- Maufur, *Winning the Public Mind: A Study of the Sabili's Xenophobic Discourse and its Impact upon the Readers*. http://www.cres.ugm.ac.id/news.php?news_id=76, 17 Desember 2010.
- McLuhan, Marshal, *Understanding Media: The Extension of Man* (New York: McGraw-Hill Book Company, 1964).
- Mhd, Syafaruddin Usman, *Tragedi Patriot & Pemberontakan Kahar Muzakkar* (Narasi, 2009).
- Muhammad, Agus, *Jihad Lewat Tulisan: Kisah Sukses Majalah Sabili dengan Beragama Ironi*, www.pantau.com, Juli 2001.
- Muhammad, Herry, *Jurnalisme Islam dan Tanggung Jawab Moral Wartawan Muslim* (Surabaya: 1992).
- Muis, A., "Perkembangan Kehidupan Pers di Era Reformasi" dalam S. Sularto (ed.), *Humanisme Dan Kebebasan Pers; Menyambut 70 Tahun Jakob Oetama*, Cet. I (Jakarta: Buku Kompas, 2001).
- Pardini, Agung, *Majalah Islam Sabili: Media Revivalis Gerakan Tarbiyah (1988-1993)*, <http://www.scribd.com/doc/15912915/Majalah-Sabili-Media-Revivalis-Sejarah>, 5 Oktober 2010.

- Qomariyah, Nurul, *Kredibilitas Presiden Megawati Dalam Tajuk Rencana Media: Analisis Wacana pada Rubrik "Sekitar Kita" Majalah Islam Sabili* (Malang: UMM, 2004), Skripsi tidak diterbitkan.
- Riddell, Peter, *Islam and the Malay-Indonesian World: Transmissions and Responses* (Singapura: Horizon Book, 2001).
- Rippin, Andrew, *Muslims: Their Religious Beliefs and Practices. Volume 2: The Contemporary Period* (London and New York: Routledge, 1995), cet. II.
- Ross, Karen dan Virginia Nightingale, *Media and Audiences: New Perspectives* (Berkshire: Open University Press, 2003).
- Roy, Oliver *The Failure of Political Islam* (London: L.B. Tauris Publishers, 1994).
- Sabili, No. 06 TH. XI 9 Oktober 2003/13 Syaban 1424.
- , No. 1 TH. VIII 28 Juni 2000/25 Rabiul Awal 1421.
- , No. 18 TH. X 27 Maret 2003/24 Muharram 1424.
- , No. 19 TH. XI 9 April 2004/19 Shafar 1425.
- , No. 22 TH. IX 2 Mei 2002/19 Shafar 1423, "Lembar Khazanah."
- , No. 22 TH. VII 19 April 2000/14 Muharram 1421.
- , No. 24 TH. IX 24 Mei 2002.
- , No. 24 TH. X 19 Juni 2003/18 Rabiul Akhir 1424.
- , No. 26 TH. XI 16 Juli 2004/28 Jumadil Awal 1425.
- , No. 4 TH. IX 15 Agustus 2001/25 Jumadil Awal 1422.
- , No. 4 TH. XI 11 September 2003/14 Rajab 1424.
- , No. X 10 April 2003.
- , No. 14 TH XVII, 4 Pebruari 2010/1431.
- , No. 14 TH. X 30 Januari 2003/27 Dzul Qa'idah 1423.
- , No. 15 TH. XI 13 Februari 2004/22 Dzulhijjah 1424.
- , No. 17 TH XIII, 9 Maret 2006/1427.
- , No. 19 TH XI, 9 April 2004/1425.
- , No. 22 TH. XI 19 Mei 1999/13 Shafar 1420.
- , No. 24 TH. VIII 23 Mei 2001/29 Shafar 1422.
- , No. 24 TH. X 19 Juni 2003/18 Rabiul Akhir 1424, "Dunia Perempuan."

- , No. 26 TH. XI 16 Juli 2004/26 Jumadil Awal 1425.
- , No. 4 TH. IX 15 Agustus 2001/25 Jumadil Awal 1422.
- , No. 4 TH. XI 11 September 2003/14 Rajab 1424, “Lembar Khazanah.”
- , No. 5 TH XVIII, 14 Oktober 2010/1431.
- , No. 9 TH. VI 11 Nopember 1998/21 Rajab 1419.
- , No.3 TH. VI, 4 Agustus 1998.
- , No. 24 TH. VI 16 Juni 1999/2 Rabi’ul Awwal 1420.
- , No. 09 TH. X 14 Nopember 2002/9 Ramadhan 1423.
- , No. 9 TH. X 14 Nopember 2002/9 Ramadhan 1422.
- , No. 25 TH. X 3 Juli 2003/3 Jumadil Awal 1424.
- , No. 23 TH. X 5 Juni 2003/4 Rabiul Akhir 1424.
- , No. 21 TH. X 8 Mei 2003/6 Rabiul Awal 1424, “Lembar Khazanah.”
- , No. 21 TH. X 8 Mei 2003/6 Rabiul Awal 1424.
- , No. 22 TH. XI 21 Mei 2004/1 Rabiul Akhir 1425.
- , No. 11 TH. XII 17 Desember 2004/5 Dzul Qa’dah 1425.
- , No. 1 TH. XII 30 Juli 2004/12 Jumadil Akhir 1425.
- , No. 19 TH. XIII 6 April 2006/7 Rabiul Awal 1427.
- , No. 17 TH. XIII 9 Maret 2006/9 Shafar 1427.
- , No. 8 TH. XIV 2 Nopember 2006/10 Syawal 1427.
- , No. 02 TH. V 6-19 September 1992.
- , No. 04 TH. V 6-19 Oktober 1992.

Said, Edward, *Covering Islam: How the media and the experts determine how we see the rest of the world* (New York: Pantheon Books, 1981).

Said, Tribuana, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila* (Jakarta: GunungAgung, 1988).

Saputra, Ahmad Yasir, *Pemberitaan Piagam Jakarta Dalam Majalah Islam Sabili*, Skripsi tidak diterbitkan.

Saqib, Ghulam Nabi, *Modernization of Muslim Education in Egypt, Pakistan, and Turkey: A Comparative Study* (Lahore: al Faried, 1983).

Sen, Krishna dan David T. Hill, *Media, Culture, and Politics in Indonesia* (UK: Oxford University Press, 2000), 60.

- Shadid, W.A.R., *Religious Freedom and the Position of Islam in Western Europe: Opportunities and Obstacles in the Acquisition of Equal Right, with an extensive bibliography* (Den Haag: Kok Pharos Publishing House, 1995).
- Siddiqi, A., "Islam, Muslims, and the American media" dalam A. Haque (Ed.), *Muslims and Islamization in North America* (Maryland: Amana Publications, 1999).
- Smith, Edward C., *A History of Newspaper Suppression in Indonesia, 1949-1965* (Jakarta: Grafiti Press, 1983).
- Susanto, Astrid S, *Komunikasi Massa* (Bandung: Bina Cipta, 1982).
- al-Syaibani, Imam al-Ḥāfiẓ Abū Abdullāh al-Hākīm, *al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥain*, juz IV (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1978).
- Taher, Tarmizi (et.al), *Radikalisme Agama* (Jakarta: PPIM, 1998).
- The History of Sabili.
The Runnymede Trust, 1997.
- van Bruinessen, Martin, *Genealogies of Islamic Radicalism in post-Suharto Indonesia*,
http://www.let.uu.nl/martin.vanbruinessen/personal/publications/genealogies_islamic_radicalism.htm, 17 Nopember 2010.
- Yulianto, Dwi Pratomo, *Militer dan Kekuasaan: Puncak-Puncak Krisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia* (Yogyakarta: Narasi, 2005).
- Zalūm, 'Abd al-Qadīm, *al-Ḥamlah al-Amīrikīyah li a-Qaḍā'I 'alā al-Islām*, cet. I (London, Khilafah Publication, 1996).
- al-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad, *al-Fiḥ al-Islāmī fī Ṣaubih al-Jadīd* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1968).

*Lampiran 1:***Daftar Majalah *Sabili***

Tahun	Tahun	Tema
1992	No. 02/Th. V 6-19 September	Darah dan Air Mata di Bosnia
	No. 04/Th. V 6-19 Oktober	Bosnia: Afghan Kedua?
1998	No. 9 TH. VI 11 November	Buat Apa Habibi?
1999	No. 21 TH. VI 5 Mei	Bom Anti Islam
	No. 22 TH. VI 19 Mei	Amin Dipancing Islam Dituding
	No. 23 TH. VI 2 Juni	Investigasi dari Garut: Latihan Perang Pasukan Misterius
	No. 24 TH. VI 16 Juni	Pilih Islam atau Kita Jadi Pecundang
	No. 7 TH. VII 22 September	Islam Slogan atau Islam Sejati
2000	No. 22 TH. VII 19 April	Peta Gerakan Islam Indonesia
	No. 1 TH. VIII 28 Juni	Muslim Indonesia Siaga Satu
2001	No. 23 TH. VIII 9 Mei	Jelang Memo II: Lawanlah Api dengan Air
	No. 24 TH. VIII 23 Mei	Jihad Diadili Syariat Dibungkam
	No. 4 TH. IX 15 Agustus	Memo Umat buat Mega
2002	No. 22 TH. IX 2 Mei	Fardhu Ain: Jihad Bebaskan Palestina
	No. 03 TH. X 22 Agustus	Bom Syahid di Tengah NU: Saatnya Ulama Bangkit
	No. 05 TH. X 19 September	Kumandangkan Adzan di Tentena: Tentara Asing Turun di Poso
	No. 08 TH. X 31 Oktober	Kita Diserang
	No. 09 TH. X 14 November	Tegakkan Jamaah Islamiyah
	No2003. 14 TH. X 30 Januari	Boikot

	No. 16 TH. X 27 Februari	Mahasiswa Teruslah Bergerak
	No. 18 TH. X 27 Maret	Basmi Judi di Batam (lihat juga: Aqidah Islam Gentarkan US
	No. 21 TH. X 8 Mei	Agenda As-Zionis Pasca Irak
	No. 23 TH. X 5 Juni	Jin Salibis Murtadkan Umat
	No. 24 TH. X 19 Juni	TNI dan Aceh Tumbal Mega
	No. 25 TH. X 3 Juli	Belajar dari Kasus Sisdiknas: PDIP Partai Berbahaya
	No. 4 TH. XI 11 September	Proyek Memburu Mujahidin
	No. 6 TH. XI 9 Oktober	Berantas Terorisme Kok dengan Teror
	No. 7 TH. X 23 Oktober	Siapa Merekayasa Bom Desember
2004	No. 15 TH. XI 13 Februari	Awas: Intel Bangun Kerajaan
	No. 18 TH. XI 26 Maret	Kasus al-Haramain: Awas Adu Domba Amerika
	No. 19 TH. XI 9 April	Kader Partai Islam Diteror
	No. 22 TH. XI 21 Mei	Sekongkol Keji: Dibalik Rusuh Ambon Sampai Makassar
	No. 25 TH. XI 2 Juli	Capres Anti Syariat: Yadika Bermasalah Umat Jadi Korban
	No. 26 TH. XI 16 Juli	PKS Akhirnya....
	No. 1 Th. XII 30 Juli	Pemilu Presiden Cacat: SBY Golput
	No. 7 TH. XII 22 Oktober	Ba'asyir dan Konspirasi Menuju Invasi
	No. 11 TH. XII 17 Desember	Pintu Surga di Fallujah
2006	No. 17 TH. XIII 9 Maret	Koruptor Dimanja Aktivis Disiksa
	No. 19 TH. XIII 6 April	Di Blok Cepu Kita Tertipu
	No. 8 TH. XIV 2 November	Dari Layar Kaca Islam Diolok-olok
2007	No. 25 TH. XIV 28 Juni	Di Balik Tudingan Ideologi Transnasional: Awas Gerakan Islam Diadu Domba
2010	No. 14 TH. XVII 4 Pebruari	Pluralisme Sekarat

*Lampiran 2:***TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA (1)**

A : itu teman angkatan saya,!

B :oh, yang penelitian itu, dari kalimantan ya, yang sempat ngajar di UMY.

A : Oh, jadi dia sempat ngajar juga ya?

B : dia juga sempat ngurus-ngurus bareng seperti ke Australia,

A : oh gitu...

B : iya...

A : jadi di Refly gitu ya?

B: yang MK kemarin itu ya..

A : saya sering ketemu...

B : Berarti sejak tahun 1996 ya..

A : ya, ...di jakarta dia, eh kamu angkatan tahun berapa?

B : angkatan 1991.

A : wah.. SAMA , ya?

B: iya.

A: Anda itu dari Aliyah langsung ke ?

B: Saya, dari IAIN, langsung ngajar, S2 nya di UI, abis dari itu kembali lagi ngajar 2 tahun, terus sempat melanjutkan S3,

A: S3 dimana?

B: Di UIN Jakarta, mudah mudahan Desember inilah dapat selesai

A : Ambil tema apa?

B : Temanya tentang Islam dan moderenitas, karena saya lulusan sastra Arab ya, mau tidak mau ya ...

A: Oh, saya kira ambil Media..

B: ada sih teman ambil media, dan ini lagi buat penelitian kompetitif..

A: Oh gitu

B:..Terikat dari sini sejak kapan mas?

A: sejak tahun 98. Dan muncul kembali sejak tahun 92,berdirinya 84... jadi waktu itu era..., sejarahnya itu ada sebagian ...waktu itu masih jaman Orde Baru, umat Islam masih reflektif sekali . Dan banyak kasus kasus, ...

B : jd tidak hanya Umat Islam,tp arena Umat Islam dalah mayoritas, jd kira2 yg akan...

A : iya dan memang secara sentimen keagamaan jg kebijakan pemerintah jg dinilai sangat merugikan, kasus2 dugaan, kasus tunggal dan banyak umat islam yg dicurigai, shg posisinya merasa dikucilkan dan tdk dpat bergerak, jadi kajian demokrasi jg, umat islam, itu semua akhirnya pengalaman bhw umat islam merespon sikap pemerintah dgn cr konfrontatif dan dianggap sgt merugikan sekali ini banyak perubahan akhirnya kadang sebagian umat islam dihimbau agar dakwah dgn cara yg berbeda dan maka dibutuhkan...

B : IYA, kitakan udah punya ormas islam, media islam katakan hidayutulah, katakan suara muhamadiyah dan aulah di NU itu ngak cukup ya...?

A : dan itu dianggap tidak cukup dan slama ini tdk mampu untuk bergerak jg, NU bisa dikendalikan dan butuh sekali saluran2 untuk menyampaikan aspirasi umat islam dari ormas – ormas itu. Dan tidak ada celah sedikitpun

walaupun ormas – ormas yang berbaur islam, dan media itu belum bisa menjadi corak,meskipun corak itu juga merupakan media juga ini komproaktif oleh departemen peperangan. Tapi tetap pilihannya media dan itu medianya itu sabili waktu itu belum mendapatkan siu...sebagai media bawah tanah, terbit tahun 8038 an dan terbatas dari kalangan mahasiswa dari masjid ke masjid dari tangan ke tangan itu tadi dibawah tanah karenablum ada ijin.

B: Sirkulasinya dimana?

A: di bawah tanah terbit tahun 8038 an dan terbatas dari kalangan mahasiswa dari masjid ke masjid dari tangan ke tangan itu tadi dibawah tanah karena belum mendapatkan ijin...

B: alasan internalnya dan apa Itu FBI ?

A: susah mendapatkan ijin. Waktu itu FBI pokoknya internal...FBI sabili dan dari tangan ketangan dan secara diam2 juga dari terutama dari kalangan mahasiswa sehingga tampak terasa.....

B: dari tahun berapa?

A: dari tahun 8038 outnya juga sabili.

B: udah ganti pipinan berapa kali dan beberapa pengelola

A: pengurus dari awal berdirinya tidak dipungkiri itu dari teman – teman tarbiah yang sekarang itu rekarnasi dari pks. Tokoh2 ustad tarbiah dulu apa namanya seperti ustad rahmad abdullah...sebagai media jamaah..itu memberikan inspirasi kita semua...dan itu pertemuan – pertemuan awal

B: dan itu dari ui ya?

A: ya dari ui ya. Dulu kan kaya imam braid.....ya emang namanya tokoh – tokoh pks

B: ada hubungan emosional arap dengan pks

A: kalau hub historis ya ada dipungkiri ada hub. Historis orang gka bisa membaca.....sejarah menyebutkan bahwa tarbiah ini adalah semacam yang membedakan kelahiran sabili itu tidak bisa dipungkiri. Karena selain historis memang...

B: semangat nya sama gak dengan anak2 pks

A: dulunya awal – awal intinya dalam bentuk gerakan makanya sedikit berbeda dengan gerakan2 ormas dan partai2 yang sebuah gerakan mungkin juga semacam detektif dari kondisi umat islam yang ada

B: sabili itu reaksi bukan proses artinya bkn kegendak sendiri lebih kpd reaksi...

A: reaksi dari kondisi sabili ada spirit untuk membentuk umat kedepan seperti apa, nah ini ...maka awal2 berdirinya sabili bertema lebih bagaimana membentuk kepribadian seorang muslim, awal2nya. Idealnya seorang muslim itu susah dibentuk, tidak realistis emosional tp betul2 sebuah perancangan yg lbh kedepannya ..., klo umat yg lalu biarlah krna bgman membentuk umat kedepan...tema2 yg kita angkat bgmna pembentukan keluarga muslim, individu muslim. Klo hasil menurut antum sendiri gimana?

klo aku sih hasil dari pembaca sabili, hitungannya dari th ke-18 kira2 spt bangunan seperti apa yg bs dibentuk...krn bacaan itu bisa amempengaruhi...

B : tapi rumitnya klo sabili i2 kan pembacanya,...tdk spt anggota permat sabili, artinya pembacanya lain td spt muhammadia kn jelas ada ormas, keanggotaan shg kt bs melihat sejaumana prilaku dan sikap...

A: sabili pernah tembus 110.000 eks. Dibaca..., krn jk orang membaca sabili dipnjamkan ke temannya..

B : sy termasuk dl pembaca sabili, baca misalnya media dakwah, sy jadikan pembanding ktk sy membaca jurnal ulumul qur'an, ada sudut pandang yg berbeda ini mungkin masuk dr berbagai sisi yg lain..

A: makanya klo sudut awal kita bgmn membentuk bangunan masyarakat muslim yg ideal...

B : klo mau dihubungkan masy yg ingin bentuk dg masyarakat ormas sblmnya tentunya yg mau dibentuk sabili mgkin pribadi yg pleknya gmn kayak masyarakat sadar politik kayak gimana kayaknya hanya itu?

A: klo kt menganggap bhw islam itu menyangkut aspek keilmuan , itu jg yg ingin kita bangun tdk hanya skdr soal ibadah, ritual spritual, kita ingin berusaha semua aspek itu kita pahami secara benar sbg bangunan..., kebetulan jg selama ini ormas2 memang sisi politiknya memang terbatas karena meski jg ada eksternal atau kekuasaan yg mungkin tdk berkembang atau apa, tp kt mungkin istilanya melengkapi krn kt tidak menyalakan ormas yg lain, krn kontribusi dakwah mereka sudah terbagi..., bgman menuampaikan dakwah dlm hal...yg tk merubah subtansi dakwah,...lebih konfrensif yg smw apek kehidupan manusia hrs dipahami oleh semua, sabili jujur bhw tdk semata2 emosional...ada jg target yg lain yg ingin kt capai....

B : klo liat tv majallah sabili mw jd pengendali maksdx majalah mw mencermati isu oleh media lain shg sy hrs mencari peran disini apa spt i2 jg spt kompas, media indonesia media pembaharuan yg tdk selalu berpihak...

A: sy kr kt tdk terlalu...media lain untuk ...shg kt puas.., tempo skrg mengangkat tokoh2 yg ...sukarno.....sukarno hata yg garis politinya tdk pernah menyinggung...makanya semuanya menarik, makanya sabili selalu diharapkan dengan...kt sendiri tdk terlalu memusingkan dr apa yg...dr tempo.

B : atau ada paket khusus...dr sabili yg mcb meneropong islam dr mesia lain..

A: kt tdk ...kn salah satu peran media adalah memberian informasi yg sebagai penyeimbang informasi,...rd satu sisi ...memang krn salah satu tugas dr media adalah penyeimbang...seringkali kt...medi sudah jelas dan iu kasus tentang...selalu sabili posisinya dengan kalangan spt teroris...

B :....kan ada sisi baik yg tdk diabaikan, tp selalu diarahkan kesitu ya,.teror bom, tetapi sabili selalu ingin mengangkat sisi baik dr itu yg merupakan sisi baik...

A: bhw reaksi krisits dr peran rasul berangkat dari sisi pemerintah... ada y g sgt berlebihan yg melkukan politik...dan kemudian kit amencoba ... hampir smua media mendapatkan berita...sementara politik i2 kelihatanya berlebihan, maka kt coba mengangkat dari sisi yg yg setara...kini kita media yg memberikan informasi...sbg media pemberitaan yg mcb memberitakan yg ada dlm pikiran mereka, seperti ngebom, trs krn apa, ngapain? Misanya. Kt melihat media lain semuanya tdk sepperti itu...

B : katakan media lain...sabili munculdan menutupu yg tadi...krn kesanya titik tekanya ke sisi yg tdk terungkap oleh media lain....

A: klo tdk...justru kt mengkonfirmasi...kt menyebut sbg peran antar negara....jd negara serip politik....tetap ia ngotot dgn hal itu.....mestn klo dg umat islam jgn pernah mencurigai....seharusnya scr akomoditas disebutkan....

B : tp prinsipnyakan baik mayoritas ada yg baik & tdk baik apakah itu disadari ?

A: i2 kt sadari... mestinya sbg bahan pertimbangan bwt negara...., Pada hal kita meliputi...

B : sumber2 yg menjadi rujukan sbg nara sumber, ada kwalifikasinya gak?

A: ya jelas ada kita atur spt terorisme...itu skrg sdh dibenarkan bhw erorisme itu...skrg org melihat ...rekayasa global..jd sy kira kasus teroris sdh berjalan spt ambon, aceh, poso..kth informasi kasus tsb...kt angkat kasus tsb, ada kejadian spt ini...skrg org sadar oh ternyata ada konflik agama...

B : krn ibaratx akan memicu akibat lbh besar....

A: konflik agama itu muncul krn apa, krn ada sosok...yg bahkan ada rekayasa disitu, klo mrk itu murni ingin membangaun keharmonisan, mk tdk akan terjadi konflik agama.....

B :ingin membentuk pribadi yg kaffah untuk sampai kesana staf satbili itu spt apa kth merekrut ..itu kn tdk mudah u membtk pribadi yg berkualitas...

A: sbnarnya tdk perlu ada yg ...jd yg jelas klo proses perekrutan yg menjadi...kt cb mengangkat teman yg sesuai pemahamannya baik, tdk justru yg bertentangan ...

B : instrumen...

A : sy kira msh banyak pandangan2...klo kt sdh anggpp pandangan spt ini sbg pertimbangan...,krn sjk awal..sp mhsiswa UIN ...mgkin mrk aka..untuk memudahkan kita aja...untuk menjaga...

B : mempelajari pendekatan2 yg dianggap kontenporer, misallya....

A : ..klo spt i2 udah mendalam sekali....biasanya kt kasi..sabili harus memahami semua, yg penting komitmen, mrk akan mewarnai...singkron2 dr narasumber itu juga 7memang penulis meracik yg lbh..

B : yg diinginkan oleh sabili spt apa

A : ...artinya bisa spt itu & bs lbh menegaskan lg misalkan tulisan2 dari narasumberkita...

Krn keterbatasan kita undang orang2 yg ...

B : pernah nggak ada ...krn ada perubahan singkron

A : Memang ada,..kt jg membatasi org itu....

B : stafnya ada brp org ?

A : BAGIAN ISLAM 3, keuangan 3, yg jelas jumlahnya ada 30

B :

A : ...ada ikatan kekeluargaan, mungkin sebatas bekerja aja dan saling membantu, penggajian yg standar

B : pendanaan sabili murni dr investor atau apa?

A : dari pembaca, yg nantinya akan dibagi...jd lbh bnayk mengadakan penjualan...setiap 2 minggu sekali..

Edisi diedarkan kapanpun

B : promosinya spt apa?

A : kt sebatas komunikasi dg pembaca,....

B : pernah gk terjd semacam trouble, misal laku ngak atau dibaca nggak?

A : ...TDK semua, ..tema apapun yg dianggap sabili, tp kt melihat banyak majalah2 yg sejenis.yg persis, Cuma modelnya aja, pertimbangan bisnis masih ada disamping sisi keislamannya...

B : atau ada kualifikasi tertentu?

A : ada, tp sy melihat ada sis lain jg,...apalagi lo udah melihat sabili dan disadari adanyaponsorotan2 jg

B : kolo misalkan banyak iklan yg masuk persentasenya berapa atau harapannya spt apa?

A : persoalanya kt lbh ke ini aja, iklanya sedikit...

B : Pernah...ingin mengungkap pola, ..pd akhirnya kn agak..

A:awal spt konflik sosial, agama dll....sabili suatu media atau majalah yg dinilai keras...,kt lakukan dan akhirnya banyak org yg tersadarkan ,...

B : klo diliat dr awal kesadaran politiknya kan ckp tinggi, ada ruang...

A : sy kira blm tinggi,...msh sedang...kth era reformasi msh ada ruang gtu, ..

B : tp wajah kehidupan dr pinggir ke tengah ternyata hidupnya sama...

A : sy kira klo mslah kesejahteraan sama,.. makanya akhirnya sabili hrs jg menentukan sikapnya masing2, pakah mengangkat mrk dari tengah...

B : masuk tp kritis, artinya ada kebijakan bkn kebijakan memusuhi islam

A : Ia, klo sy melihat makanya kt jgyg merasa tersingkirkan,...ekonomi eagamaan,...

B : itu tercermin gak ?

A :sedikit2 ada, skrg kt blm smuanya mungkin kearah timur, msh dlm proses

B : dg kata lain citra penguasa ,...hitam apa putih,,,

A : ...bgmn membentuk negara yg ini...tp tidanya kekuasaan, posisi sabili jg hrs betul2

B : td sy karyawan nya ada ibu2, it bagian apa?

A : ia,bagian keuangan, redaktur..

B : ...klo ke jogja boleh mampir...

A : Klo dl jaman orde lama..

B :..Media jg terpecah tdk spt dulu..

A : klo sy liat faktornya berangkat dr mediax itu, skrg banyak media memilih...spt surya paloh dsb, pemilik media yg bs mengatur...

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA (2)

A : stabil, krn skrg soal politik..

B : untuk karyawan sabili gmn?

A : untuk standarsih blm, ini kt anggap...ada ikatan lain shg orng menganggap sbg,, ada semacam titk lain islam untuk berdakwah dan itu sy liat...seuai dgn standar perusahaan dan sebatas kelayakan

B : pernahkah ada godaan2, mjd corongx atau kebijakan mrk?

A : Ya adalah, klo legistlatif ada pencitraan...klo sabili ,,keras, menjauh betul spt media iklan , spt produk takut krn dinilai majalah paling keras

misalnya...skrg semua sampe sbg peran ...krn era online makanya kalo mau disusun dr skrng sabili msh berada di posisi paling atas, cm skrg kita mensiasati pad era ..yg dkt spt sabili online, ada radio...

B : tiap daerah ada distributorx atau agen?

A : untuk di jogja, pemasaran